

**HUBUNGAN PERUSAHAAN MULTINASIONAL
DENGAN MASYARAKAT LOKAL DALAM SEKTOR
PERTAMBANGAN**

**Studi Kasus : Implementasi *Community Development* (Comdev)
BHP Billiton di Kabupaten Murung Raya**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister Sains (M.Si)
Dalam Ilmu Hubungan Internasional**

**ELSI YULIA TRIASTUTI
0706187911**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JUNI 2009**



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang di kutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : ELSI YULIA TRIASTUTI

NPM : 0706187911

Tanda Tangan : 

Tanggal : 22 Juni 2009

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : ELSI YULIA TRIASTUTI
NPM : 0706187911
Program Studi : Pascasarjana Hubungan Internasional
Judul Tesis : Hubungan Perusahaan Multinasional Dengan Masyarakat Lokal Dalam Sektor Pertambangan. Studi Kasus : Implementasi *Community Development (Comdev)* BHP Billiton di Kabupaten Murung Raya.

Telah berhasil dipertabakan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Ilmu Politik kekhususan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : HARIYADI WIRAWAN, P.hD
Sekretaris Sidang : CHRISTIAN HARIJANTO, MA
Penguji Ahli : Dra. DWI ARDHANARISWARI, M. Phil
Pembimbing : TIRTA N. MURSITAMA, P.hD

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 22 Juni 2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini di buat untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Magister Sains (M.Si) Jurusan Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak TIRTA N. MURSITAMA. P.hD selaku dosen pembimbing yang dengan penuh perhatian dan kesabarannya telah memberikan bimbingan dan pengarahan yang sangat berarti sehingga selesainya penulisan tesis ini;
2. Bapak Makmur Keliat. P.hD, selaku Ketua Pengelola Program Pascasarjana Hubungan Internasional, Universitas Indonesia;
3. Bapak Bupati Barito Utara, Ir.H. Achmad Yuliansyah, MM yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Pascasarjana Hubungan Internasional, Universitas Indonesia;
4. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara, DRS. H.Sapto Nugroho, MM, yang telah memberikan ijin bagi penulis guna mengikuti pendidikan pada Program Pascasarjana Hubungan Internasional, Universitas Indonesia;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barito Utara dan staf Bidang Pengembangan dan Diklat Pegawai, yang telah membantu dan memberikan ijin bagi penulis guna mengikuti pendidikan pada Program Pascasarjana Hubungan Internasional, Universitas Indonesia;
6. Bapak Andreas dan Bapak Priyo Husada, Koordinator Bagian Hubungan Eksternal Dan Internal BHP BILLITON yang bersedia di wawancara peneliti;

7. Tokoh masyarakat dan Lurah Muara Tuhup yang telah membantu penulis dalam mendukung kegiatan wawancara, cerita terhadap pelaksanaan *Community Development* BHP BILLITON;
8. Segenap dosen maupun staf Akademika (pak Udin, mba itje, mba lina & mba nunung) Program Pascasarjana HI UI; yang telah banyak membantu penulis dalam berbagai ilmu dan pengetahuan serta pelayanan administrasi sampai suksesnya penyelesaian studi ini;
9. Ayahanda Drs. Simbun Nussa dan Ibunda Elmie Riawati,SE serta saudara-saudara penulis ; Suria Siri, Wanti, Nita, Aja dan pendukung setiaku Deddy atas dorongan, penghiburan dan bantuan yang memberikan semangat bagi penulis.
10. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa/i Program Pascasarjana HI UI khususnya teman-teman angkatan XIV, yang telah banyak membantu penulis di dalam penyelesaian tesis, terutama bude devy & mbak lita, serta pak Ishak.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Salemba, Juni 2009

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elsi Yulia Triastuti
NPM : 0706187911
Program Studi : Pasca Sarjana
Departemen : Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Hubungan Perusahaan Multinasional
Dengan Masyarakat Lokal Dalam Sektor Pertambangan.
Studi Kasus : Implementasi *Community Development* (Comdev)
BHP Billiton di Kabupaten Murung Raya.**

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Juni 2009

Yang menyatakan



(Elsi Yulia Triastuti)

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
PROGRAM PASCA SARJANA

Elsi Yulia Triastuti. 0706187911

xii + 112 Halaman, 7 Tabel, 18 Gambar

Daftar Pustaka: 30 Buku, 12 Jurnal, 5 Situs Internet, 3 Dokumen (2007-2009)

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Hubungan Perusahaan Multinasional Dengan Masyarakat Lokal Dalam Sektor Pertambangan, Studi Kasus : Implementasi *Community Development (Comdev)* BHP Billiton di Kabupaten Murung Raya". Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui pelaksanaan, manfaat dan kendala *community development* BHP Billiton di Kabupaten Murung Raya, dan 2) mengetahui model interaksi masyarakat lokal dan Perusahaan Multinasional yang saling menguntungkan di negara berkembang.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi atau pengamatan langsung dan telaah pustaka dan dokumen, yang selanjutnya dianalisis melalui perspektif hubungan internasional. Kasus ini dikaji dengan perspektif hubungan internasional karena keberadaan MNC's sebagai *non state actor* yang kiprahnya melintasi batas kedaulatan negara dan beroperasi melalui *foreign direct investment (FDI)* dan berinteraksi di wilayah negara lain.

Tulisan ini antara lain berisi telaah akademis tentang implementasi dari program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam bentuk program pengembangan masyarakat (*Community development*) PT Lahai Coal BHP Billiton di Kabupaten Murung Raya. Program *community development (comdev)* adalah program yang lazim digunakan sebagaimana perusahaan pada umumnya dalam menunjukkan tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat yang terkena dampak operasionalnya.

Pelaksanaan CSR PT Lahai Coal sebagai salah satu anak perusahaan BHP Billiton di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah, dilakukan melalui pelaksanaan *comdev* dalam bidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan kapasitas masyarakat. Sejumlah program *comdev* yang dilaksanakan PT LC dampaknya sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat lokal, khususnya dalam hal peningkatan derajat hidup mereka. Pendekatan CSR dilakukan melalui melalui keterlibatan langsung, dan melalui mitra dengan lembaga lain, yaitu NGO/LSM dan instansi pemerintah. Dalam kaitannya dengan hubungan antara MNC's dan masyarakat lokal menunjukkan bahwa hubungan ini bersifat positif atau saling menguntungkan satu dengan yang lain, dimana kedua belah pihak mendapat manfaat dari hubungan tersebut.

UNIVERSITY OF INDONESIA
FACULTY OF SOCIAL SCIENCE AND POLITICAL SCIENCE
DEPARTMENT OF INTERNATIONAL RELATIONS
POST GRADUATE PROGRAM

Elsi Yulia. 0706187911

xii + 112 pages, 7 Tables, 18 Figures

References: 30 Books, 12 Journals, 5 Websites, 3 Documents (2007-2009)

ABSTRACT

This research entitled " The Relation between Multinational Corporations (MNC's) with Local Community in The Mine Working Sector, Case Study : The Implementation of Community Development (Comdev) of BHP Billiton in Regency of Murung Raya, Centre of Borneo." This research aims to: 1) to examine the implementation, benefits and challenges of BHP Billiton's community development action in the Regency of Murung Raya, and 2) to know the model of interaction between The Local Community and The Multinational Corporations which mutually beneficial in developing countries.

The research methode which have been used is qualitative with case study approach. Collecting data is done through interviews, direct observations, literature studies (books, journals, and documents), and then being analyzed with the perspective of international relations. The case is reviewed with the perspective of international relations because of the existence of the MNC's as a non-state actor that action across state boundaries and sovereignty operates through foreign direct investment (FDI) and interaction in the other countries.

This paper contains of academic research about the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) program in the form of community development programs (comdev) of PT Lahai Coal BHP Billiton in the Regency of Murung Raya. Comdev program is commonly used as a company is generally indicated in the company's responsibility to the community in the area of operations affected due to the mine workings.

The implementation of CSR PT Lahai Coal as a subsidiary of BHP Billiton in Regency of Murung Raya in Central of Borneo is done through the implementation of community development in the field of education, health and capacity building for community. A numbers of PT LC's comdev programs impacted for local community, especially to increasing the degree of citizen's live. CSR approach were done through the direct involvement and relations with the other institutions, as NGO/NGOs and government institutions. In connection with the relationship between MNC's and local communities indicate that this relationship is mutually beneficial, or positive to one another, where both parties can have the benefit from the relationship.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pernyataan Orisinalitas	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar	iv
Lembar Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah.....	vi
Abstrak	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar.....	xii
Daftar Singkatan.....	xiv
BAB I Pendahuluan	1
I. 1 Perumusan Masalah	1
I.1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
I.1.2 Permasalahan Penelitian.....	11
I.1.3. Tujuan Penelitian.....	12
I.1.4. Kegunaan Penelitian.....	12
I.2 Kerangka Teori	12
I.2.1 Kajian Pustaka.....	12
I.3. Definisi Konsep/Variabel Penelitian.....	15
I. 3.1 <i>Multinational Corporations (MNC's)</i>	15
I. 3. 2. <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	19
I. 4. Hubungan antar Konsep/Antarvariabel.....	30
I. 5. Operasionalisasi Konsep ke dalam Indikator	31
I. 6. Perumusan Hipotesis.....	31
I. 7. Model Analisis	32
I.8. Metode Penelitian	32
I.8.1 Jenis Penelitian.....	32
I.8.2 Sumber Data.....	33
I.8.3. Teknik Pengumpulan Data.....	34
I.8.3.1 Data Primer	34

	I.8.3.2 Data Sekunder.....	34
	I. 9. Sistematika Penulisan	35
	I. 10.Rencana Analisis Data	36
BAB II	BHP Billiton & Borneo Gold Belt	38
	II.1. BHP Billiton Sebagai <i>Multinational Corporations</i> dalam Perekonomian Internasional.....	38
	II.2. <i>Borneo Gold Belt</i>	40
	II.2.1. Kabupaten Murung Raya.....	41
	II.3. Keberadaan BHP Billiton di <i>Borneo Gold Belt</i>	49
	II.3.1 Rencana Strategis PT LC.....	54
	II.4. Keberadaan Masyarakat Lokal di Wilayah Penambang PT.LC	57
BAB III	“Belum Ambil Sudah Andil” <i>Community Development</i> (Comdev) PT. Lahai Coal	62
	III.1 Belum Ambil sudah Andil.....	62
	III.2. Pelaksanaan Program <i>Community Development (Comdev)</i> PT.LC.....	69
	III.2.1. Bidang Pendidikan	69
	III.2.2 Bidang Kesehatan.....	75
	III.2.3 Peningkatan Kapasitas Masyarakat.....	84
	III.3. Menuju Sebuah Model Interaksi Masyarakat Lokal & MNC yang Saling Menguntungkan di Negara Berkembang	92
BAB IV	Kesimpulan	108
	IV.1 Kesimpulan	108
	IV.2. Rekomendasi.....	114
Daftar Pustaka		115

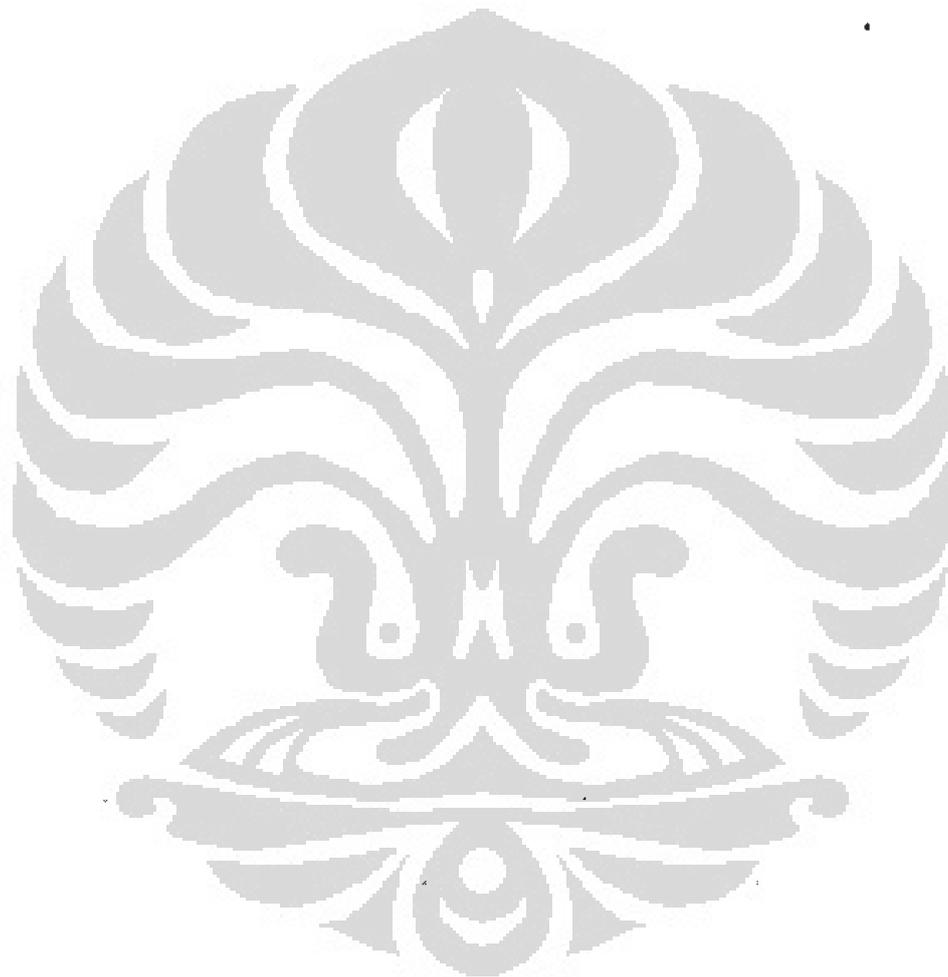
DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1. Operasionalisasi Konsep ke dalam Indikator	31
Tabel 2.1. Daftar Bahan Galian Menurut Jenis di Kabupaten Murung Raya.....	46
Tabel 2.2. Komposisi Penduduk menurut Jenis Kelamin, Rumah Tangga, Kepadatan, dan Sex Ratio di Kecamatan Laung Tuhup.....	58
Tabel 2.3. Data Kepadatan Kependudukan Di Sepuluh Desa Sekitar Pertambangan Batubara PT. Lahai Coal	58
Tabel 2.4. Sarana Pendidikan di Wilayah Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya	60
Tabel 2.5. Sarana Tempat Ibadah di Wilayah Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya Daftar Isi	61
Tabel 3.1. Anggaran Hubungan dan Pengembangan Masyarakat tahun 2008.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
Gambar 1.1.	Model <i>Triple Bottom Line</i> ("3P") yang diperkenalkan John Elkington pada tahun 1997	22
Gambar 1.2	Skema Model Analisis Penelitian.....	32
Gambar 2.1	Peta Geografis Kabupaten Murung Raya	42
Gambar 2.2	Skema BHP Billiton & Anak Perusahaan	50
Gambar 2.3	Lokasi Haju Mine (PT. Lahai Coal)	51
Gambar 2.4	Bkspor Batubara Jenis Kokas	53
Gambar 3.1	Piramida Hierarki Sistem BHP Billiton.....	63
Gambar 3.2	Pertemuan "Hapakat" yang diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat untuk membicarakan berbagai hal terkait dengan hubungan antara perusahaan dan masyarakat.....	67
Gambar 3.3	Pemberian beasiswa oleh PT LC kepada sejumlah siswa yang berprestasi dan kurang mampu	71
Gambar 3.4	Bantuan Beasiswa Bidang Pendidikan	72
Gambar 3.5	Program Pelatihan COPE	76
Gambar 3.6	Peserta pelatihan kader Posyandu, yang terdiri dari ibu-ibu rumah tangga dan remaja dari sejumlah desa/kelurahan di Kecamatan Muara Laung, Batu Bua dan Muara Tuhup	78
Gambar 3.7	Pelaksanaan kegiatan sikat gigi secara serempak di SDN 1 Muara Laung melibatkan seluruh murid dari kelas I – VI. Kegiatan ini diikuti secara antusias oleh para murid, yang pandu oleh fasilitator dari Yayasan Kusuma Buana (YKB).....	80
Gambar 3.8	Sarana air bersih di desa Muara Tuhup	81
Gambar 3.9	Penanaman dan pemeliharaan pohon serempak kerjasama PT LC dengan Pemda, warga masyarakat dan ratusan siswa pelajar di Murung Raya	85
Gambar 3.10	Suasana kegiatan salah satu KSM binaan PT.LC.....	86

<p>Gambar 3.11 Para peserta magang berjumlah 19 orang yang dikirim ke Pusat Pelatihan Institut Pertambangan Nemangkawi (IPN) PT Freeport Indonesia (PTFI) Kuala Kencana, Timika, Papua. Mereka mengikuti pemagangan selama 3 (tahun) tahun dengan spesialisasi yang beragam.....</p>	<p>87</p>
<p>Gambar 3.12 Para peserta pelatihan perkebunan karet mendapat pengarahan dari fasilitator. Selain mendapat pengetahuan tentang pertanaman karet petani juga dikenalkan dengan tanaman hortikultura seperti padi sawah dan kacang-kacangan.....</p>	<p>90</p>



DAFTAR SINGKATAN



MNC's	: Multinational Corporations
CSR	: Corporate Social Responsibility
3P	: Profit, People dan Planet,
Kalteng	: Kalimantan Tengah
MURA	: Murung Raya
PT LC	: PT Lahai Coal
PT MC	: PT Maruwai Coal
Comdev	: Community Development
Pemda	: Pemerintah Daerah
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
KSM	: Kelompok Swadaya Masyarakat
FDI	: Foreign Direct Investment
PMA	: Penanam Modal Asing
PKP2B	: Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
YBM2	: Yayasan Bina Masyarakat Mandiri
YKB	: Yayasan Kusuma Buana
PDB	: Produk Domestik Bruto
TI	: Tranperency International
HAM	: Hak Asasi Manusia
STD	: Submarine Tailings Disposal
SDM	: Sumber Daya Manusia
HSEC	: Health, Safety, Environment, Community
HAPAKAT	: Hubungan Antara Perusahaan dan Masyarakat
K3L	: Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan
UKS	: Usaha Kesehatan Sekolah
PPPK	: Program Penanaman dan Pelihara Pohon untuk Kehidupan

BAB I PENDAHULUAN

I. 1 Perumusan Masalah

I.1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi¹, yang diawali dengan ekonomi dan perdagangan berkembang pesat di dunia, sesuai dengan tujuan awal yang dibawa oleh bangsa Eropa untuk menciptakan saling ketergantungan ekonomi dan menjadikan penyatuan ekonomi dan sosial budaya yang konteksnya melewati batas-batas internasional. Perekonomian dunia melewati batas-batas negara dan memainkan perannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dikombinasikan dengan integrasi pasar dunia.

Lairson dan Skidmore menyebutkan bahwa globalisasi memiliki lima elemen definisi. *Pertama*, globalisasi dapat dipahami dengan melihat adanya pertumbuhan yang sangat cepat dalam transaksi pembayaran atau keuangan internasional. *Kedua*, adanya pertumbuhan yang sangat cepat dalam transaksi perdagangan antar perusahaan. *Ketiga*, adanya perpindahan investasi asing (FDI) yang dilakukan terutama oleh *multinational corporations (MNC's)*. *Keempat*, munculnya pasar global dan juga sistem nilai jual (harga) produk secara global. Dan, *kelima*, semakin meningkatnya penggunaan dan penemuan dalam bidang teknologi dan ide-ide baik dalam bidang komunikasi dan transportasi global.²

Sehubungan dengan itu *MNC's* atau sering disebut perusahaan multinasional tidak pelak dewasa ini memainkan peran yang penting dalam tata perekonomian global. Perusahaan multinasional merupakan wujud dari paradigma baru dalam jiwa globalisasi kegiatan ekonomi yang kegiatan

¹ Sejarah membuktikan bahwa sejak tahun 1500-an, praktek kegiatan ekonomi telah dikembangkan oleh bangsa Eropa dengan tidak mengenal batas-batas waktu, Negara dan pengaruhnya melalui system Kolonial. Hal ini mengalir dalam perkembangan sering disebut globalisasi. Paul Hirts dan Grahame Thompson, *Globalisasi adalah Mito*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 257.

² Thomas D. Lairson dan David Skidmore. *International political Economy: The Struggle of Power and Wealth*. Edisi Kedua. Fort worth: harcourt brace College Publishers, 1997.

bisnisnya bersifat internasional, dan lokasi produksinya terletak di beberapa negara. Perusahaan-perusahaan ini berskala besar dan mengendalikan semua aktivitas yang mendatangkan pendapatan di beberapa negara.³

Sebagai gambaran tentang perkembangan perusahaan multinasional di seluruh dunia, pada abad 17 terdapat sekitar 500 perusahaan multinasional (sekarangnya dalam bentuk prototipe), dan mengalami peningkatan pada abad 19 naik menjadi 1.500, memasuki abad 20 sudah menjadi 2.500. Pada awal Perang Dunia Pertama tahun 1914, terdapat 3000, selang 55 tahun kemudian melonjak dua kali lipat menjadi 7.258. Era 1980-an adalah tahun suburnya perusahaan multinasional . Pada 1988, tercatat 18.500 perusahaan multinasional , belum sampai 10 tahun angka itu melambung menjadi 59.902. pada 2000, ada 63.000 perusahaan multinasional , belum sampai 10 tahun angka itu sudah melambung menjadi 59.902. pada 2000, ada 63.000 perusahaan multinasional . Begitu pula dalam hal jumlah negara yang menjadi asal (*home*) atau penerima (*host*) bertambah dari 62 negara pada 1900 menjadi 220 negara pada 2000⁴.

Pada tahun 2000, dari 500 perusahaan multinasional terbesar, 185 di antaranya bemarkas di Amerika Serikat, Jepang di tempat kedua dengan 108 perusahaan multinasional , sementara Inggris dan Jerman masing-masing menyumbang 34 perusahaan multinasional dan Prancis 32 perusahaan multinasional . Kalau diukur menurut nilai aset yang dikumpulkan, perusahaan multinasional asal Amerika juga masih menduduki papan atas. Laporan *Business Week*⁵ menyebutkan bahwa delapan dari sepuluh perusahaan multinasional terbesar di dunia bemarkas di Amerika Serikat, yaitu Coca-

³ Nopirin. *Ekonomi Internasional*, Edisi 3, BPFE Jogjakarta, 1999

⁴ I Wibowo. *Sejarah Globalisasi dan Korporasi*. Termuat dalam Jurnal WACANA, Edisi 19. Tahun VI 2005, "Kuasa Korporasi: Dari Homogenisasi Rasa Sampai Hegemoni Pikiran." Yogyakarta: Insist Press, 2005. Hal 22.

⁵ *Business Week*, (4 - 11 Agustus, 2003)

Cola, Microsoft, IBM, GE, Intel, Disney, McDonald's dan Marlboro. Dari seratus seratus merek dunia, 62 di antaranya adalah dari Amerika Serikat.⁶

Dari segi kekayaan, perusahaan-perusahaan ini lebih kaya dibanding hampir semua negara berkembang. Pada tahun 2002, Anderson mencatat bahwa penjualan gabungan 200 perusahaan terbesar di dunia setara dengan 28.1% Produk Domestik Bruto (PDB) dunia, sementara jumlah karyawan mereka hanya 0.82% dari seluruh tenaga kerja dunia. Jika diperingkat antara kekayaan perusahaan multinasional dengan negara-negara di dunia dari 100 negara/perusahaan yang memiliki kekayaan tertinggi, 52 di antaranya dimiliki oleh perusahaan, dan 48 peringkat sisanya dimiliki oleh negara. Indonesia sendiri menduduki peringkat 31 dengan PDB lebih rendah dibanding angka penjualan lima perusahaan (Wal-Mart, General Motors, Exxon Mobile, Royal Dutch Sell dan British Petroleum) pada tahun 2002.⁷ Pada tahun 2004, penerimaan perusahaan mobil Amerika General Motors adalah 191.4 miliar dollar, lebih besar dari PDB 148 lebih negara. Pada akhir tahun fiskal 2005, perusahaan ritel Amerika Wal-Mart mendapatkan keuntungan sebesar 285.2. miliar dollar, atau lebih besar daripada PDB apabila seluruh negara di sub-Sahara Afrika dijadikan satu.⁸

Tidak dapat disangkal bahwa kehadiran perusahaan multinasional di negara berkembang dapat menjadi sebuah jalan keluar untuk dapat menjawab beberapa kesenjangan ekonomi di negara tujuan investasinya, dimana perusahaan multinasional ini dapat membantu memajukan proses pembangunan yang membutuhkan dana, mengurangi tingkat pengangguran dan juga mentransfer teknologi dan keahlian yang dimiliki *home country* perusahaan multinasional tersebut.

⁶ I Wibowo, *op.cit.* hal. 23

⁷ Sarah Anderson. *Kebangkitan Kekuatan Korporasi*. Termuat dalam Jurnal WACANA, Edisi 19. Tahun VI 2005, "Kuasa Korporasi: Dari Homogenisasi Rasa Sampai Hegemoni Pikir." Yogyakarta: Insist Press. Hal 31 – 49.

⁸ Joseph E Stiglitz *Making Globalization Work: Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia yang Lebih Adil*. Bandung: Penerbit Mizan, 2007. Hal. 276.

Namun di sisi lain, perusahaan multinasional juga memiliki pemahaman yang sangat kapitalis yang mengedepankan upaya memaksimalkan keuntungan (*profit oriented*) sehingga dalam implementasinya perusahaan multinasional lebih bersifat eksploitatif terhadap sumberdaya demi mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga bagi banyak orang, menurut Stiglitz⁹, perusahaan multinasional menjadi simbol segala keburukan dari globalisasi¹⁰.

Selain itu ada beberapa kritik terhadap dampak kehadiran perusahaan multinasional di negara berkembang, mulai dari tuduhan imperialisme jenis baru hingga menghasilkan sekelompok kecil elit yang menindas masyarakatnya sendiri. Peter Evans menyebutnya *dependent-development* dimana terdapat hubungan *triple alliance* antara perusahaan transnasional, negara dan pemilik modal lokal bekerja sama membantu proses industrialisasi negara, pada akhirnya hubungan ketiganya hanya menghasilkan keuntungan terhadap sekelompok kecil *elite* yang menindas rakyatnya.¹¹

Namun berbagai macam pertentangan ini tidak menyurutkan perusahaan multinasional untuk terus beroperasi mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya. Ada dua strategi yang dipakai oleh perusahaan multinasional. *Pertama*, perusahaan multinasional dapat menggunakan strategi yang dipakai oleh layaknya suatu kekuatan politik, yaitu ancaman (*threat*). Jika sederetan syarat yang diminta oleh perusahaan multinasional tidak dipenuhi, maka perusahaan itu dapat mengancam akan ke luar dari negara atau wilayah tertentu. Hal ini dapat dilakukan karena perusahaan multinasional dapat memindahkan perusahaannya di tempat mana pun di dunia (*foot-loose industries*).

⁹ Joseph E Stiglitz adalah ekonom peraih Nobel Ekonomi pada tahun 2001 dari Amerika Serikat yang kini mengajar di Columbia University. Ia pernah menjabat sebagai Senior Vice Presiden di Bank Dunia, lembaga yang kemudian banyak menjadi sasaran kritiknya. Selain banyak mengkritik Bank Dunia ia juga banyak mengkritik Dana Moneter Internasional (IMF) dan sejumlah lembaga internasional lainnya.

¹⁰ *Ibid*.

¹¹ Puspardi Syahdan, *Tanggung Jawab Sosial Dalam Perusahaan Trans Nasional Amerika, Studi Kasus PT. Freeport Indonesia*, 2001. Hal. 11.

Strategi *kedua*, dengan cara korupsi. Perusahaan multinasional mengirimkan uang suap kepada pejabat-pejabat pemerintah agar yang bersangkutan mau meloloskan permintaan dan tuntutan perusahaan multinasional. Hal inilah yang telah memicu yang disebut 'korupsi global'. Satu buku yang diterbitkan oleh *Transparency International (TI)*. *Global Corruption Report 2004*, mengungkapkan data yang mengejutkan tentang korupsi oleh para penanam modal asing. Laporan TI tahun 2004 itu memberi ulasan lebih panjang lagi tentang korupsi oleh para penanam modal asing. Dalam satu survei yang dilakukan bahwa *Control Risks Group* pada 50 perusahaan di Inggris, Jerman, Belanda, Amerika Serikat, Hong Kong, dan Singapura, ditemukan bahwa suap-menyuap memang terjadi. Banyak perusahaan lokal kalah bersaing karena suap yang dilakukan oleh para penanam modal asing. Perusahaan di Hong Kong dan Singapura merupakan korban yang paling menderita, masing-masing 60 dan 64 persen perusahaan di sana kalah bersaing.¹²

Indonesia sebagai negara dengan sumber daya alam yang berlimpah kemudian menjadi salah satu tujuan perusahaan multinasional ini untuk memperluas kegiatan bisnisnya. Kehadiran perusahaan multinasional di beberapa daerah di Indonesia, membawa dampak yang beraneka ragam terhadap lingkungan sekitar operasionalnya. Sebagai lingkungan sosial, masyarakat memang menjadi salah satu pihak yang merasakan dampak kehadiran perusahaan multinasional tersebut. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa aspek sosial dalam pengelolaan sumber daya alam ini kurang mendapatkan perhatian.

Akibat hal tersebut banyak persoalan sosial yang terkait dengan pengelolaan lingkungan harus dihadapi beberapa perusahaan multinasional di Indonesia akhir-akhir ini, khususnya konflik atau friksi sosial yang berkaitan dengan kesenjangan akses pada pemanfaatan sumber daya alam serta konflik akibat kasus pencemaran dan pengrusakan lingkungan serta masalah HAM.

¹² I Wibowo, *op.cit.* hal. 24

Bukti nyata yang dapat kita kaji antara lain dalam persoalan-persoalan perusahaan multinasional di Papua. Kehadiran PT. Freeport dengan berbagai konflik sosial yang berkepanjangan, dinilai tak terselesaikan dengan baik. Kerusakan lingkungan merupakan hal prinsip yang disebabkan PT. Freeport di Timika dan perlu tindakan serius. Terbukti bahwa tailing dari hasil produksi logam PT. Freeport telah merugikan masyarakat lokal dari sisi kesehatan dan lingkungan alam. Sistem sosial masyarakat juga terganggu akibat arus migrasi dari dampak arus pencari kerja karena lahan pekerjaan yang menggiurkan. Tak hanya itu, berbagai konflik sosial terjadi dan menyebabkan pelanggaran HAM yang tidak terselesaikan dengan baik. Penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal dan pemilik tanah pertambangan tidak diperhatikan sehingga menimbulkan konflik dan menciptakan situasi yang tidak nyaman, baik bagi pihak perusahaan dan masyarakat sekitarnya. Jika masalah ini tidak pernah ada jalan keluar yang benar-benar bermanfaat maka bagi perusahaan besar seperti PT. Freeport yang punya kekuatan mendongkrak perekonomian Indonesia, keadaan ini justru mengganggu perekonomian negara, nama baik perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya.¹³

Kasus lain yang serupa mengenai dampak penambangan ini terjadi pula di negara tetangga Indonesia yang bersebelahan dengan Provinsi Papua yaitu Papua Nugini. Di negara ini penambangan emas di Pulau Lihir dikelola oleh Perusahaan Tambang Rio Rinto pada tahun 1996. Perusahaan ini membuang campuran limbah tailing yang mengandung sulfide, tembaga, cadmium, timah dan arsenic ke laut sehingga menghancurkan terumbu karang sepanjang 7 km. Akibat ini agen asuransi risiko politis milik Amerika Serikat menolak mengasuransikan tambang Lihir berdasarkan pertimbangan bahwa *STD (submarine tailings disposal)* oleh Rio Rinto melanggar beberapa undang-undang dalam negeri Amerika Serikat termasuk undang-undang air bersih (*clean water*) dan undang-undang tentang penelitian dan perlindungan cagar alam (*Marine Protection Research and Sanctuaries Act*). Dampak sosial yang

¹³ Puspārīda Syahdan, *op.cit.* hal. 22

ditimbulkan antara lain konflik antara penduduk Lihir karena pembagian keuntungan yang tidak adil, diskriminasi etnik, ketegangan sosial akibat proses industrialisasi yang terlalu dini. Dampak yang besar ini pula tidak diimbangi dengan *Community Development* yang terpadu sehingga masyarakat menjadi tambah miskin di sekitar tambang dan banyak pengangguran akibat banyak keterampilan individu tidak memadai untuk tenaga pertambangan. Pengangguran ini menimbulkan tingkat kejahatan dan kriminal yang sangat tinggi di negara ini.¹⁴

Menyadari betapa pentingnya peranan perusahaan multinasional di negara-negara berkembang, yang berbanding lurus dengan dampak yang ditimbulkannya maka yang menjadi pertanyaan bagi perusahaan-perusahaan seharusnya adalah: apa yang harus dilakukan untuk meminimalkan kerusakan yang ditimbulkan dan memaksimalkan kontribusi mereka terhadap masyarakat?

Idealnya, wajar apabila perusahaan-perusahaan multinasional tersebut memaksimalkan keuntungannya (*profit oriented*). Namun kontribusi nyata kepada masyarakat sebagai wujud pertanggungjawaban perusahaan multinasional diharapkan dapat diberikan secara terpadu untuk bertumbuh bersama dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), karena masyarakat semakin sadar akan pentingnya perlindungan atas hak-hak mereka. Masyarakat menuntut perusahaan untuk lebih peduli pada masalah-masalah yang terjadi dalam komunitas mereka atau secara ekstrim masyarakat menuntut tanggung jawab sosial perusahaan. Pemikiran yang mendasari hal ini adalah bahwa perusahaan yang sehat secara finansial sekalipun tidak menjamin perusahaan tersebut terus eksis apalagi bertumbuh. Fakta menunjukkan bahwa masyarakat sekitar memiliki semacam "power" yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi eksistensi perusahaan tersebut.

¹⁴ *Ibid.* 23-24

Semakin baik citra perusahaan tersebut di tengah-tengah masyarakat sekitarnya, semakin kondusif pula iklim usaha bagi perusahaan tersebut.¹⁵

Persoalan tentang perusahaan multinasional tidak hanya terbatas kepada masalah lingkungan saja tetapi sudah menyangkut pula pada masalah sosial ekonomi, dan budaya masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perusahaan harus dapat mendefinisikan dengan baik bagaimana konsep tanggung jawab sosial yang tepat diterapkan bagi lingkungan dimana perusahaan tersebut beroperasi¹⁶. Dalam konteks ini yang kemudian melahirkan konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

CSR merupakan bentuk program kegiatan pengembangan masyarakat sebagai kompensasi yang wajib diberikan perusahaan multinasional yang melakukan investasi di negara berkembang. CSR diharapkan menjadi sebuah instrumen kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan perusahaan multinasional dalam tujuannya untuk menciptakan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan (*Sustainable Development*).

Upaya membangun perusahaan yang tidak hanya berorientasi profit tapi juga tetap memperhatikan lingkungan dan masyarakatnya dalam kerangka CSR dapat dilakukan melalui penerapan konsep *triple bottom line*.

Konsep ini pertama kali dipopulerkan oleh John Elkington pada tahun 1997 melalui bukunya "*Cannibals with Forks, Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*". Elkington mengembangkan konsep *triple bottom line* dalam istilah *economic prosperity*, *environmental quality* dan *social justice*.¹⁷

Menurut Elkington, perusahaan yang ingin berkelanjutan haruslah memperhatikan "3P". Selain mengejar keuntungan (*Profit*), perusahaan juga mesti memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat

¹⁵Gunawan Widjaja & Yeremia Ardi Pratama, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hal.19

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Yusuf Wibisono. *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility (CSR)*. Gresik: Fascho Publishing, 2006. Hal.32

(*People*) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*Planet*). Dalam gagasan ini, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpihak pada *single bottom line*, yaitu aspek ekonomi yang direfleksikan dalam kondisi *financial*-nya saja, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya.

Melalui konsep ini perusahaan haruslah melihat masyarakat sekitar perusahaan sebagai salah satu *stakeholder* penting bagi perusahaan, karena dukungan masyarakat sekitar sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan, maka sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat lingkungan, perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Selain itu juga perlu disadari bahwa operasi perusahaan berpotensi memberikan dampak kepada masyarakat sekitar. Karenanya pula perusahaan perlu untuk melakukan berbagai kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Intinya, jika ingin eksis dan akseptabel, perusahaan harus menyertakan pula tanggung jawab yang bersifat sosial.

Jika perusahaan ingin eksis dan ekseptabel maka harus disertakan pula tanggung jawab kepada lingkungan (*planet*). Kurangnya kepedulian pada lingkungan akan berdampak besar bagi kelangsungan hidup masyarakat sekitar dan kerap harus dibayar dengan harga yang mahal dengan timbulnya bermacam penyakit, bencana lingkungan atau kerusakan alam lainnya. Kasus luapan lumpur panas di Sidoarjo menjadi contoh yang dapat membayangkan bagaimana masyarakat dibikin repot karena kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian mereka, anak sekolah dan para guru harus terganggu aktivitas belajar-mengajarnya, karyawan dan industriawan kehilangan pekerjaan karena perusahaannya ikut terendam lumpur.¹⁸

Perusahaan yang paling menarik untuk dikaji lebih jauh pelaksanaan CSR-nya adalah perusahaan ekstraktif (perusahaan tambang dan manufaktur) karena mereka mengambil hasil alam, yang mana dampak terhadap masyarakat

¹⁸ *Ibid*

dan lingkungannya terlihat jelas. Salah satu di antara perusahaan tambang yang kini beroperasi di Indonesia adalah BHP Billiton.

BHP Billiton, salah satu perusahaan penanam modal asing (PMA) di Indonesia, merupakan sebuah perusahaan multinasional besar di dunia asal Australia dengan lebih dari 100 operasi dan kantor di 26 negara, yang berinvestasi di sektor tambang batubara. Perusahaan ini telah menanamkan investasinya dan telah memegang ijin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) di Kabupaten Murung Raya (Mura) Kalimantan Tengah.¹⁹

Dalam perjalanan investasinya di Kalimantan Tengah sejak tahun 1992, BHP Billiton yang telah menanamkan investasinya sebesar 66 juta dolar AS atau sekitar Rp 594 miliar di lokasi blok Haju²⁰, salah satu lokasi dari luas keseluruhan konsensi BHP Billiton Group yang mencapai 46.620²¹ hektar, belum pernah ada konflik maupun friksi sosial besar yang terjadi selain masalah pembebasan lahan. Hal ini dikarenakan meski telah melewati tahap eksplorasi dan masih dalam proses konstruksi (perusahaan menargetkan mulai berproduksi pada November 2009)²², perusahaan ini secara sekilas telah memberi andil bagi masyarakat di lingkaran tambang dalam pelaksanaan program *community development* sebagai bentuk tanggungjawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).

Dengan menanamkan komitmennya untuk berpihak pada masyarakat sekitar lokasi tambang dengan semboyan "belum ambil sudah andil", dapat dilihat BHP Billiton berupaya keras agar dapat diterima daerah lingkungan operasionalnya. Dimana masyarakat lokal dan perekonomian daerah dapat

¹⁹BHP Billiton Profile. *About Us*. Diakses pada <http://sustainability.bhpbilliton.com/2003/overview/profile.html>, 5 maret 2009

²⁰Areal blok Haju ini terletak di wilayah Siang, Danum dan Lahung serta sebagian kecil masuk Kabupaten Kutai Barat (Kubar) Kalimantan Timur dengan kandungan batubara sekitar 70 persen jenis kokas (coking coal) dan sisanya jenis thermal.

²¹ Pencerahan Online In Nasional & Regional Trackback. *BHP Billiton Investasi 66 Juta Dolar di Blok Haju Kalteng*. Diakses pada <http://pencerahanonline.wordpress.com/2007/09/12/bhp-billiton-investasi-66-juta-dolar-di-blok-haju-kalteng/>, 5 maret 2009

²²*Ibid.*

bertumbuh bersama dan mendapatkan manfaat yang berkelanjutan atas keberadaan perusahaan tersebut melalui investasi dalam pembangunan sosial ekonomi, pendidikan, infrastruktur dasar dan program kesehatan serta kebersihan.²³

Banyak kisah sukses yang menjelaskan bagaimana BHP Billiton berperan dalam penerapan *comdev*-nya pada masyarakat sekitar. Beberapa sektor yang banyak disentuh oleh pelaksanaan *comdev* perusahaan ini antara lain bidang pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat dan lingkungan, yang telah dimulai sejak tahun 2007. Pada tahun 2007 saja misalnya, perusahaan ini telah melakukan kegiatan penanaman pohon secara serentak di beberapa daerah, yang melibatkan karyawan, masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Dalam bidang pendidikan dan kesehatan usaha pengembangan masyarakat banyak dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan taraf hidup masyarakat, seperti pemberian beasiswa, pemagangan dan pelatihan tenaga medik, pengadaan sarana pendidikan dan kesehatan dan sebagainya. Dari sejumlah fakta tersebut sekilas terlihat adanya komitmen yang kuat dari BHP Billiton sebagai perusahaan multinasional dalam menerapkan konsep *triple bottom line* ini. Indikator kesuksesan pelaksanaan *comdev* perusahaan ini juga bisa dilihat dari tidaknya konflik-konflik atau penolakan masyarakat dalam skala besar atas keberadaan ini.

Berdasarkan kenyataan tersebut maka dapatlah diasumsikan bahwa keberadaan Perusahaan multinasional di negara-negara berkembang tidak selamanya berdampak buruk secara langsung pada masyarakat di negara dimana Perusahaan multinasional itu beroperasi. Semua dampak yang terjadi akan sangat tergantung pada pola hubungan yang terjadi antara Perusahaan multinasional tersebut dengan masyarakat lokal dimana perusahaan itu beroperasi. Penelitian ini diharapkan akan mampu menjawab hal tersebut, tentang bagaimana penerapan CSR di perusahaan-perusahaan multinasional

²³Egenius Soda. *PT Lahat Coal: Andil Dulu Baru Ambil*. Diakses pada http://www.majalah tambang.com/detail_berita.php?category=18&newsnr=1075%. 5 Maret 2009

dalam rangka membangun hubungan saling menguntungkan dengan masyarakat lokal dimana mereka beroperasi.

I. 1. 2 Permasalahan Penelitian

Berbagai studi menunjukkan semakin banyaknya konflik yang terjadi di masyarakat akibat operasional perusahaan multinasional. Namun hampir 12 tahun (sejak 1996) kehadiran BHP Billiton di Kabupaten Murung Raya tidak menimbulkan konflik atau friksi sosial yang besar. Berdasarkan hal tersebut identifikasi implementasi CSR BHP Billiton dalam operasionalnya di sektor pertambangan batubara di Kabupaten Murung Raya penting untuk dilakukan, untuk menjawab pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan, manfaat dan kendala *community development* BHP Billiton di Kabupaten Murung Raya?
2. Bagaimana model interaksi masyarakat lokal dan perusahaan multinasional yang saling menguntungkan di negara berkembang?

I.1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pelaksanaan, manfaat dan kendala *community development* BHP Billiton di Kabupaten Murung Raya.
2. Mengetahui model interaksi masyarakat lokal dan Perusahaan multinasional yang saling menguntungkan di negara berkembang.

I.1.4. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi di dalam studi HI khususnya dalam upaya memahami sikap, kebijakan serta dampak dari sebuah tanggungjawab sosial perusahaan multinasional (BHP Billiton) melalui program *Community Development* bagi masyarakat lokal di Kabupaten Murung Raya dan keberlanjutan operasional perusahaannya di daerah tersebut. Diharapkan juga, penelitian ini dapat memberikan sumbangan

informasi bagi mahasiswa dan praktisi Ilmu Hubungan Internasional sebagai referensi dalam tugas dan penelitian.

I.2 Kerangka Teori

I.2.1 Kajian Pustaka

Saling ketergantungan antara Perusahaan multinasional dan negara tujuan ternyata memunculkan hal-hal positif dan negatif. Keberadaan perusahaan multinasional memberikan kesempatan ekonomi sekaligus juga menjadi sumber berbagai masalah yang serius bagi negara berkembang yang menjadi tuan rumah (*host country*). Dimana kecenderungan kalangan bisnis untuk lebih mengedepankan ideologi pasar dalam operasionalnya menyebabkan terabaikannya aspek lainnya. Akibatnya adalah munculnya masalah-masalah seperti limbah industri, kurangnya perlindungan terhadap buruh, mutu produk yang buruk, kerusakan lingkungan sampai pada masalah *corporatism*.²⁴

Permasalahan yang akan diangkat melalui tulisan ini menarik untuk diulas karena dampak positif dan negatif dari kehadiran perusahaan multinasional di suatu negara membuat isu mengenai tanggung jawab sosial menjadi sangat relevan. Beberapa penelitian mengenai tanggungjawab sosial perusahaan ini antara lain, yang dilakukan oleh June Nash dan Max Kirsh mengenai permasalahan yang ditimbulkan sampai pada terjadinya konflik akibat produksi *polychlorinated byphenyls (PCBs)* oleh *General Electric* yang berada di Pittsfield, Massachusetts, Amerika Serikat. Dalam studi mereka pada tahun 1979 menunjukkan fakta bahwa pekerja yang berada pada divisi *power transformer* memiliki kecenderungan lebih besar menderita penyakit kanker.²⁵

General Electric sebagai perusahaan yang menjadi objek penelitian membantah hasil penelitian tersebut, dimana mereka menganggap bahwa data yang digunakan tidak akurat dalam menghasilkan kesimpulan tersebut.

²⁴ Pusparida Syahdan, *op.cit*, hal. 2.

²⁵ June Nash & Kirsh. *Corporate Culture and Social Responsibility; The Case Toxic Wastes in a New England Community*, 1994, hal. 357.

Sedangkan menurut data yang dikumpulkan memperlihatkan bahwa bahaya yang ditimbulkan akibat penggunaan PCBs sudah ditemukan sejak tahun 1968 di Jepang, dalam sebuah studi yang mengambil subjek beras yang dikonsumsi masyarakat yang terkontaminasi oleh PCB's.²⁶ Studi June Nash dan Max Kirsch menunjukkan bahwa *General Electric* membutuhkan waktu selama kurang lebih lima belas tahun untuk membersihkan PCB's dari produksi pabriknya. Usaha ini diluar dari upaya untuk memberikan kompensasi kepada para karyawan yang meninggal dan mengalami cacat serta kepada masyarakat yang terkena dampak negatif dari operasional pabrik ini.²⁷

Akibat perbedaan cara pandang ideologi telah menyebabkan pandangan *General Electric*, masyarakat, maupun pemerintah berbeda dalam memberikan tanggapan terhadap kasus ini. *General Electric* terkesan lambat dalam menyikapi dan menanggulangi permasalahan yang terjadi meskipun akibat yang ditimbulkan sudah sedemikian jelas, dimana beberapa karyawan sudah menjadi korban akibat bahan kimia tersebut. Hal ini disebabkan orientasi perusahaan semata-mata hanya kepada keuntungan belaka sehingga dampak negatif yang terjadi akibat operasional perusahaan, baik kepada karyawan, masyarakat, maupun lingkungan di sekitar kurang diperhitungkan oleh perusahaan.²⁸

Penelitian ini juga telah dilakukan oleh Yakoba Womsiwor tahun 2007 dengan judul "*Kerjasama LNG-Tanggung BP dengan pemerintah Kabupaten Bintuni-Papua Barat dalam program Community Development*" yang membahas mengenai program *community development* dan kerjasama yang dibangun antara proyek tangguh *British Petroleum* bersama pemerintah dan masyarakat. Secara umum mendeskripsikan tentang operasional BP dan program pengembangan masyarakat yang dilakukan. Penelitian ini lebih memfokuskan pada proses kerjasama yang dibentuk antara perusahaan dan pemerintah dalam kegiatan pembangunan konstruksi dan proses eksplorasi perusahaan.

²⁶ *Ibid.*, hal. 360.

²⁷ *Ibid.*, hal. 391.

²⁸ *Ibid.*, hal. 358.

Kemudian juga terdapat studi yang dilakukan oleh Pusparida Syahdan tahun 2001 tentang "*Tanggung Jawab Sosial dalam perusahaan Transnasional Amerika: Studi kasus PT Freeport Indonesia*". Penelitian ini menggambarkan bagaimana perusahaan transnasional Amerika mendefinisikan tanggung jawab sosial mereka dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini juga digambarkan secara khusus interaksi budaya yang berbeda antara PTFI dengan masyarakat Timika serta polemik yang terjadi dari tahap awal tahun 1967 sampai tahun 1999.

Selanjutnya, studi yang dilakukan oleh Chris Rumansi pada tahun 2007 yang berjudul "*Dampak Operasional Multinational Corporations terhadap Masyarakat Lokal*" yang mengambil objek penelitian pada PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika. Tulisan ini berisi telaah akademis tentang implementasi dari program pengembangan masyarakat (*Community development*) dalam bentuk program *Corporate Social Responsibility (CSR)* oleh PT Freeport Indonesia dengan melakukan program yang disebut dengan program *Dana Kemitraan* yang bekerjasama dengan yayasan dan lembaga pengembangan masyarakat adat yang biasa disebut LPMK. Berdasarkan hasil penelitiannya dalam implementasi di lapangan secara umum program pengembangan masyarakat ini sudah berjalan baik dan dievaluasi dan diperbaharui setiap tahunnya. Hanya saja dalam implementasinya masih terdapat banyak kekurangan dan penyimpangan dana bantuan dari tujuan utamanya. Selain penjelasan mengenai dana kemitraan dipaparkan juga tentang penerimaan negara dan manfaat lainnya yang telah diberikan oleh PT Freeport Indonesia, baik untuk Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten, dan masyarakat adat pemegang hak ulayat yaitu Amungme dan Kamoro.

Perbedaan beberapa penelitian di atas dengan penelitian ini adalah: penelitian ini menganalisa dan mengidentifikasi mengenai dampak implementasi CSR oleh BHP Billiton terhadap operasionalnya di Kabupaten Murung Raya, dengan melihat pada: (1) implementasi tanggung jawab sosial perusahaan melalui program *community Development* perusahaan tersebut

terhadap masyarakat, dan (2) sejauh mana keberadaan program *comdev* BHP Billiton membawa dampak terhadap sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Murung Raya dan (3) mengidentifikasi kendala yang dihadapi BHP Billiton ini dalam penerapan program *comdev* tersebut. Sehingga diharapkan dapat ditemukan sebuah contoh pola hubungan yang saling menguntungkan antara Perusahaan multinasional dan masyarakat lokal di negara berkembang.

I. 3. Definisi Konsep/Variabel Penelitian

I. 3.1 *Multinational Corporations* (Perusahaan multinasional)

Secara ringkas, pada dasarnya *Multinational Corporations* (Perusahaan multinasional), atau yang sering disebut pula *Multinational Enterprises* (*MNE's*) atau *Transnational Corporations* (*TNC's*), merupakan salah satu aktor yang memiliki *power* tersendiri yang mampu mempengaruhi aktivitas komersial untuk menghasilkan keuntungan di lebih dari satu negara (*...are powerfull actors that carry out commercial activities for profit in more than one country*).²⁹ Gilpin menyatakan secara sederhana bahwa perusahaan multinasional adalah suatu perusahaan dari negara tertentu yang sebagian atau secara keseluruhan kepemilikannya dimiliki pula oleh paling sedikit satu perusahaan nasional dari negara lainnya (*a firm of particular nationality with partially or wholly owned subsidiaries within at least one other national economic*).³⁰

Menurut Kamus Ekonomi, *Multinational Corporations* (perusahaan multinasional) adalah sebuah perusahaan yang wilayah operasionalnya meliputi sejumlah negara dan memiliki fasilitas produksi dan service di luar negaranya sendiri. Perusahaan Multinasional tersebut mengambil keputusan pokoknya dalam suatu konteks global tadi dengan negara-negara dimana perusahaan tersebut bekerja. Pertumbuhan perusahaan-perusahaan multinasional yang cepat

²⁹ Martin Griffiths dan Terry O'Callaghan. *International Relations: The Key Concepts*. London & New York : Routledge, 2003, hal. 199.

³⁰ Robert Gilpin. *The Political economy of International Relations*. Princeton, Princeton University Press, 1987.

serta kemungkinan bahwa timbul adanya konflik-konflik antara kepentingan perusahaan perusahaan multinasional dengan kepentingan negara individual dimana mereka beroperasi telah menimbulkan macam-macam perdebatan antara para ahli ekonomi pada tahun-tahun belakangan ini, sehingga disebut *international enterprise*.³¹

Menurut Perlmutter, *Multinational Corporation's* (Perusahaan multinasional) adalah sekelompok perusahaan yang mempunyai kendali operasi langsung di berbagai negara yang berbeda, yang mempunyai kecenderungan dan mengarah kepada pandangan global akan penguasaan perusahaan secara geocentris.³²

Pandangan lain dikemukakan oleh Nopirin, yang mendefinisikan perusahaan multinasional sebagai perusahaan yang kegiatan bisnisnya bersifat internasional dan lokasi produksinya terletak di beberapa negara. Dalam hal ini cabang luar negeri tidak hanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan induk tetapi juga operasi/kegiatan cabang tersebut dikontrol dan diawasi perusahaan induk³³.

Menurut Vernon, perusahaan multinasional adalah sekelompok perusahaan dari berbagai negara yang tergabung menjadi satu oleh ikatan kepemilikan bersama dan tanggap terhadap satu strategi manajemen bersama³⁴.

Sedangkan Gilpin mengetengahkan batasan Perusahaan multinasional dengan memperhatikan sejumlah sifat khasnya. Menurutnya perusahaan multinasional melakukan penanaman modal langsung di negara-negara asing dengan pendirian anak perusahaan/cabang atau pengambilalihan sebuah perusahaan asing di mana sasaran penanaman modal tersebut adalah pengawasan manajemen terhadap suatu unit produksi di suatu negara asing. Perusahaan multinasional ditandai dengan adanya perusahaan induk atau

³¹ Pandji Anoraga. *Perusahaan multinasional dan Penanaman Modal Asing*. Penerbit Pustaka Jaya, Jakarta, 1995.

³² Ibid

³³ Nopirin. *Op.cit.* Hal. 51

³⁴ Pandji Anoraga, *op.cit.* hal. 23

cabang perusahaan di berbagai negara dengan satu penampung bersama sumber-sumber manajemen, keuangan dan teknik. Dalam hal ini melalui integrasi vertikal dan sentralisasi pengambilan keputusan, perusahaan induk berusaha mengekalkan kedudukannya dalam hal teknologi, modal yang siap pakai dan seterusnya kemudian motivasi bagi penanaman modal langsung dan bagi pemilikan anak-anak perusahaan asing serta cabang-cabang di pihak lainnya, terutama adalah penguasaan pasar dan penguasaan manajemen.

Pendapat lebih ringkas dikemukakan Alan M. Rugman. Menurutnya perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi melintasi batas negara, berproduksi di luar negeri selain di dalam negeri. Perusahaan multinasional ini sedikitnya berproduksi di satu negara asing³⁵.

Menurut badan hukumnya, Perusahaan multinasional ini dibedakan menjadi 5 (lima) bentuk, yaitu:

- 1) Perusahaan cabang. Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perusahaan induknya.
- 2) Perusahaan Subsidiary (*Wholly Owned Subsidiary*). Merupakan anak perusahaan yang berbadan hukum sendiri. Saham perusahaan ini sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan induknya.
- 3) Perusahaan patungan (*Joint Ventura*). Merupakan perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh dua atau lebih perusahaan sebagai partner.
- 4) Perusahaan *go public* atau *Public Company*. Merupakan perusahaan yang berkedudukan lokal dan sebagian sahamnya dipegang oleh masyarakat;
- 5) Perusahaan dengan bentuk lain. Pembentukannya dapat didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang ada, seperti di bidang perbankan, pertambangan minyak dan gas bumi, perdagangan ataupun jasa lainnya³⁶.

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*

Dalam prakteknya di berbagai negara, bentuk badan hukum MNC mempunyai variasi. Pada suatu kasus dapat ditemui bentuk perusahaan *subsidiary* berubah menjadi *joint ventura* dan perusahaan *joint ventura* dalam perkembangannya berubah menjadi perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat atau *public company*.

Kehadiran dari perusahaan multinasional adalah kunci dari sebuah bentuk globalisasi dalam perekonomian dunia yang didominasi oleh korporasi-korporasi raksasa yang menguasai lembaga ekonomi global dan kekuasaan politik global. Dalam aktivitasnya terdapat beberapa hal terkait hubungan antara perusahaan multinasional dan *host countries*. Menurut argumentasi perusahaan multinasional, penanaman modal langsung (*FDI*) menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Perusahaan multinasional melengkapi kelangkaan sumber daya lokal dengan memberikan mereka paket yang berharga yang tidak dapat disediakan oleh perusahaan lokal. Hal itu seperti kapital, teknologi, tenaga manajemen yang berpengalaman, dan jaringan bisnis.³⁷

Perusahaan multinasional sering kali dihadapkan kepada berbagai kontroversi, bahkan mampu menimbulkan berbagai konflik. Meskipun sebagian konflik tersebut berkaitan dengan masalah ideologi, tapi tidak ada satupun yang meragukan bahwa secara ekonomi Perusahaan multinasional tersebut sangat penting.

I. 3. 2. Corporate Social Responsibility (CSR)

Saat ini *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau tanggung jawab sosial dari perusahaan-perusahaan yang mengelola sumber daya alam terhadap masyarakat, banyak diliput di berbagai media. Berbagai pihak telah mengkampanyekan pentingnya tanggung jawab sosial bagi perusahaan, baik untuk menjaga kelangsungan produksi sampai untuk membangun legitimasi sosial. Sebagai konsep yang berkembang dari ideologi liberal di bidang

³⁷ Thomas D. Lairson dan David Skidmore, *International Political Economy, the Struggle For Power and Wealth*, Harcourt Brace College Publishers, 1997, hal. 307-308.

ekonomi, konsep ini masih bersifat ambigu.³⁸ Di satu sisi perusahaan merupakan lembaga ekonomi yang bertujuan mencari profit sebanyak-banyaknya, namun di sisi lain masyarakat atau komunitas yang menjadi *stakeholder* perusahaan, khususnya yang berada di sekitar perusahaan berada, tentunya membutuhkan dukungan perusahaan baik moral maupun finansial sebagai sumbangsih atas dampak yang mungkin timbul dari operasional usaha yang mereka lakukan.³⁹

CSR merupakan bentuk program kegiatan pengembangan masyarakat sebagai kompensasi yang wajib diberikan perusahaan multinasional yang melakukan investasi di negara berkembang. CSR diharapkan menjadi sebuah instrumen kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan perusahaan multinasional dalam tujuannya untuk menciptakan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan (*Sustainable Development*) di daerah operasional perusahaan tersebut.

Berbagai definisi tentang CSR dikemukakan oleh sejumlah ahli dan badan dunia. *World Business Council for Sustainable Development*, yang berpusat di Kanada mengartikan CSR sebagai sebuah komitmen yang berkelanjutan untuk menjunjung tinggi etika bisnis sekaligus memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi makro dan mikro, sedemikian hingga dapat meningkatkan kualitas hidup para pekerja beserta seluruh keluarga dan anggota komunitasnya baik dalam skala lokal maupun yang lebih besar.

Sedangkan menurut Bank Dunia, CSR memiliki arti sebagai komitmen secara penuh dari para pelaku bisnis untuk memberikan kontribusi terhadap semua kegiatan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, yang bekerjasama dengan seluruh jajaran stakeholdernya, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka, baik dalam segi materi maupun immateri.

³⁸Rochman Achwan. *Corporate Social Responsibility: Pertikaian Paradigma Dan Arah Perkembangannya*. *Jurnal Filantropi Dan Masyarakat Madani*, Vol. 1, No.2 Januari 2006, hal. 84.

³⁹Chris Rumansi, *Dampak Operasional Multinational Corporation (MNC) terhadap Masyarakat Lokal: Studi kasus PT. Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika-Papua Periode 2001-2005*, Tesis S2 Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.

Pandangan lain tentang CSR yang lebih komprehensif dikeluarkan oleh *Prince of Wales – International Business Forum* melalui konsep lima pilarnya. Pertama, *building human capital*, yaitu perusahaan dituntut melakukan pemberdayaan, biasanya melalui *community development*, menuju peningkatan kesejahteraan dan kemandirian. Kedua, *strengthening economies*, yaitu memberdayakan ekonomi komunitas. Ketiga, *assessing social cohesion*, yaitu perusahaan harus menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat di sekitarnya agar tidak muncul konflik. Keempat, *encouraging good governance*, maksudnya perusahaan harus dijalankan dalam tata kelola yang baik. Dan kelima, *protecting the environment*, maksudnya perusahaan harus selalu menjaga kelestarian dan kualitas lingkungan⁴⁰.

Berangkat dari pemahaman di atas, maka CSR tidak hanya dilaksanakan untuk eksternal perusahaan, tetapi juga berguna untuk meningkatkan kompetensi internal perusahaan. Idealnya, sebelum mempraktekkan CSR, manajemen internal perusahaan telah dikelola dengan baik atau *good corporate governance* yang mencakup tiga segi, yaitu *Transparency*, *Accountability*, dan *Responsibility*. Diharapkan, dengan terwujudnya GCG akan membawa pengembangan bisnis perusahaan ke arah yang berkesinambungan sehingga akan mempermudah aplikasi CSR di lapangan.

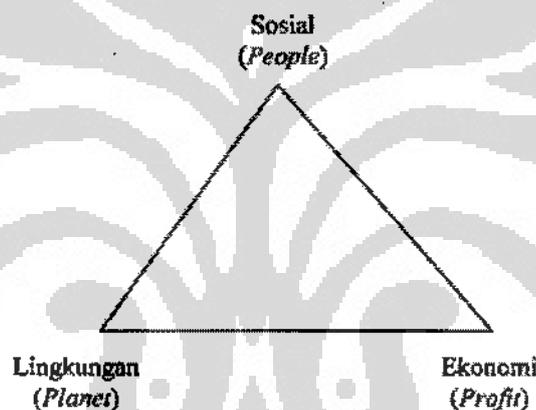
Sebuah terobosan besar dalam konteks CSR dikeluarkan oleh John Elkington pada tahun 1997, dalam bukunya *Cannibals with Forks, the Tripple Bottom Line of Twentieth Century Business*. Elkington mengembangkan konsep *triple bottom line* menjadi istilah *economic prosperity*, *environmental quality management* dan *social justice*. Elkington menawarkan sebuah solusi *Sustainable Capitalism* untuk merujuk bahwa pada akhirnya kapitalisme yang ingin berkelanjutan haruslah tidak semata-mata meningkatkan *shareholder value* tetapi harus memperhatikan 3 P. Selain *Profit*, perusahaan juga harus

⁴⁰ Mohammad Jamil, C.Z., K. Alwi dan R. Mohamed. *Corporate Social Responsibility Disclosure in the Annual Reports of Malaysian Companies: A Longitudinal Study* (WP-10/2001; Kedah, Malaysia: Universiti Utara Malaysia), 2001.

terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*People*), dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*Planet*).⁴¹

Menurut Elkington, perusahaan yang ingin berkelanjutan haruslah memperhatikan “3P”. Selain mengejar keuntungan (*Profit*), perusahaan juga mesti memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*People*) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*Planet*). Hubungan kemudian diilustrasikan dalam bentuk segi tiga sebagai berikut:

Gambar 1.1 Model *Triple Bottom Line* (“3P”) yang diperkenalkan John Elkington pada tahun 1997



(Sumber: Yusuf Wibisono, 2006).

Dalam gagasan tersebut, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpihak pada *single bottom line*, yaitu aspek ekonomi yang direfleksikan dalam kondisi *financial*-nya saja, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya. Untuk menjelaskan berbagai konsep tersebut dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini:

⁴¹ Yusuf Wibisono, *op.cit.* hal. 32

1. *Profit* (Keuntungan).

Profit merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama dari setiap kegiatan usaha. Tak heran jika fokus utama dari seluruh kegiatan dalam perusahaan adalah mengejar profit atau mendongkrak harga saham setinggi-tingginya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Inilah bentuk tanggung jawab ekonomi yang paling esensial terhadap pemegang saham. Profit sendiri pada hakikatnya merupakan tambahan pendapatan yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Sedangkan aktivitas yang dapat ditempuh untuk mendongkrak profit antara lain dengan meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi biaya, sehingga perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif yang dapat memberikan nilai tambah semaksimal mungkin. Peningkatan produktivitas bisa diperoleh dengan memperbaiki manajemen kerja melalui penyederhanaan proses, mengurangi aktivitas yang tidak efisien, menghemat waktu proses dan pelayanan. Termasuk juga menggunakan material sehemat mungkin dan memangkas biaya serendah mungkin.⁴²

2. *People* (Masyarakat).

Menyadari bahwa masyarakat sekitar perusahaan merupakan salah satu *stakeholder* penting bagi perusahaan, karena dukungan masyarakat sekitar sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan, maka sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat lingkungan, perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Selain itu juga perlu disadari bahwa operasi perusahaan berpotensi memberikan dampak kepada masyarakat sekitar. Karenanya pula perusahaan perlu untuk melakukan berbagai kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Intinya, jika ingin eksis dan akseptabel, perusahaan harus menyertakan pula tanggung jawab yang bersifat sosial.

⁴² Yusuf Wibisono, op.cit. hal. 33

Memang tak bisa dipungkiri adanya anggapan bahwa tanggung jawab sosial bukanlah aktivitas utama bagi pelaku bisnis. Fokus utama bisnis adalah mendongkrak laba. Namun diyakini penganut aliran pemikiran ini kian sedikit karena tidak masuk akal dan tidak sesuai kenyataan. Dampak yang diakibatkan bisnis kepada masyarakat, juga perlu diantisipasi dan diperhitungkan. Tak sedikit kemudian yang mengakui perlunya tanggung jawab sosial itu. Namun sifatnya hanya instrumental. Maksudnya, tanggung jawab sosial perusahaan hanya sekedar saran untuk menggapai maksimalisasi profit sebagai tujuan utama. Anggapan ini membawa perusahaan melihat tanggung jawab sosial sebagai hal eksternal dalam kegiatan bisnis, atau lebih bersifat sebagai lipstik atau aksesoris saja, bukan sebagai aktivitas yang termasuk pada “jantung hati” kegiatan bisnis. Ironisnya, dengan berbagai alasan, barangkali penganut paham aliran inilah yang dominan saat ini. Aliran pemikiran yang semakin diminati dan semakin punya daya tarik untuk masa yang akan datang nampaknya adalah aliran yang meyakini bahwa kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*). Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi terkait lainnya, termasuk dimensi sosial. Sudah sangat cukup fakta bagaimana resistensi masyarakat sekitar muncul ke permukaan terhadap perusahaan yang dianggap tidak peduli dengan keadaan masyarakat di sekitarnya. Untuk memperkokoh komitmen dalam tanggung jawab sosial ini perusahaan memang perlu memiliki pandangan bahwa CSR adalah investasi masa depan. Artinya, CSR bukan lagi dilihat sebagai sentra biaya (*cost centre*), melainkan sentra laba (*profit centre*) di masa mendatang. Karena melalui hubungan yang harmonis dan citra yang baik timbal baliknya masyarakat juga akan ikut menjaga eksistensi perusahaan.⁴³

⁴³ Yusuf Wibisono, *op.cit.* hal. 34

3. *Planet* (Lingkungan).

Unsur ketiga yang mesti diperhatikan juga adalah *planet* atau lingkungan. Jika perusahaan ingin eksis dan ekseptabel maka harus disertakan pula tanggung jawab kepada lingkungan. Lingkungan adalah sesuatu yang terkait dengan seluruh bidang kehidupan kita. Semua kegiatan yang kita lakukan mulai kita bangun di pagi hari hingga kita terlelap di malam hari berhubungan dengan lingkungan. Air yang kita minum, udara yang kita hirup, seluruh peralatan yang kita gunakan, semuanya berasal dari lingkungan dapat menjadi teman atau musuh kita, tergantung bagaimana kita memperlakukannya. Hubungan kita dengan lingkungan adalah hubungan sebab akibat, di mana jika kita merawat lingkungan, maka lingkungan pun akan memberikan manfaat kepada kita. Sebaliknya, jika kita merusak, maka kita akan menerima akibatnya. Dengan kata lain, apa yang kita lakukan terhadap lingkungan tempat tinggal pada akhirnya akan kembali kepada kita sesuai dengan apa yang telah kita lakukan. Apakah kita akan menerima manfaat atau justru menderita kerugian, semuanya tergantung pada bagaimana kita menjaga lingkungan. Namun sayangnya, sebagian besar dari kita masih kurang peduli dengan lingkungan sekitar. Hal ini antara lain disebabkan karena tidak ada keuntungan langsung di dalamnya. Keuntungan merupakan inti dari dunia bisnis dan itu merupakan hal yang wajar. Maka, kita melihat banyak pelaku industri yang hanya mementingkan bagaimana menghasilkan uang sebanyak-banyaknya tanpa melakukan upaya apapun untuk melestarikan lingkungan. Padahal, dengan melestarikan lingkungan, mereka justru akan memperoleh keuntungan yang lebih terutama dari sisi kesehatan, kenyamanan, disamping ketersediaan sumberdaya yang lebih terjamin kelangsungannya. Sebaliknya, kurangnya kepedulian terhadap lingkungan kerap harus dibayar dengan harga yang mahal dengan timbulnya bermacam penyakit, bencana lingkungan atau kerusakan alam lainnya. Kasus luapan lumpur panas di Sidoarjo menjadi contoh yang dapat

membayangkan bagaimana masyarakat dibikin repot karena kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian mereka, anak sekolah dan para guru harus terganggu aktivitas belajar-mengajarnya, karyawan dan industriawan kehilangan pekerjaan karena perusahaannya ikut terendam lumpur. Timbul kerugian pada banyak pihak yang tidak dapat dinilai dengan materi. Mendongkrak laba dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi memang penting, namun tak kalah pentingnya juga memperhatikan kelestarian lingkungan. Di sinilah perlunya penerapan konsep *triple bottom line* atau 3BL, yakni *profit*, *people* dan *planet*. Dengan kata lain, “jantung hati” bisnis bukan hanya *profit* (laba) saja, tetapi juga *people* (manusia) dan jangan lupa, *planet* (lingkungan).

CSR yang baik memadukan empat prinsip *good corporate governance*, yakni *fairness*, *transparency*, *accountability* dan *responsibility*, secara harmonis. Ada perbedaan mendasar diantara keempat prinsip tersebut. Tiga prinsip pertama cenderung bersifat *shareholders-driven*, karena lebih memerhatikan kepentingan pemegang saham perusahaan.⁴⁴

Sebagai contoh, *fairness* bisa berupa perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas; *transparency* menunjuk pada penyajian laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu; sedangkan *accountability* diwujudkan dalam bentuk fungsi dan kewenangan RUPS, komisaris, dan direksi yang harus dipertanggung jawabkan.

Sementara itu, prinsip *responsibility* lebih mencerminkan *stakeholders-driven*, karena lebih mengutamakan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan.⁴⁵

Stakeholders perusahaan bisa mencakup karyawan beserta keluarganya, pelanggan, pemasok, komunitas setempat dan masyarakat luas, termasuk pemerintah selaku regulator. Di sini, perusahaan bukan saja dituntut mampu

⁴⁴ Sita Supomo. “*Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Prinsip GCG*” dalam *Republika*, 20 Oktober 2004

⁴⁵ *Ibid*

menciptakan nilai tambah (*value added*) produk dan jasa bagi stakeholders perusahaan, melainkan pula harus sanggup memelihara kesinambungan nilai tambah yang diciptakannya itu. Namun demikian, prinsip *good corporate governance* jangan diartikan secara sempit. Artinya, tidak sekadar mengedepankan credo beneficence (*do good principle*), melainkan pula nonmaleficence (*do no-harm principle*).⁴⁶

Perusahaan yang hanya mengedepankan beneficence cenderung merasa telah melakukan CSR dengan baik. Misalnya, karena telah memberikan beasiswa atau sunatan massal gratis. Padahal, tanpa sadar dan pada saat yang sama, perusahaan tersebut telah membuat masyarakat semakin bodoh dan berperilaku konsumtif, misalnya, dengan iklan dan produknya yang melanggar nonmaleficence.⁴⁷

CSR yang baik memadukan kepentingan shareholders dan stakeholders. Karenanya, CSR tidak hanya fokus pada hasil yang ingin dicapai. Melainkan pula pada proses untuk mencapai hasil tersebut. Lima langkah di bawah ini bisa dijadikan panduan dalam merumuskan program CSR, termasuk *comdev*.

1. *Engagement*. Pendekatan awal kepada masyarakat agar terjalin komunikasi dan relasi yang baik. Tahap ini juga bisa berupa sosialisasi mengenai rencana pengembangan program CSR. Tujuan utama langkah ini adalah terbangunnya pemahaman, penerimaan dan trust masyarakat yang akan dijadikan sasaran CSR. Modal sosial bisa dijadikan dasar untuk membangun "kontrak sosial" antara masyarakat dengan perusahaan dan pihak-pihak yang terlibat.
2. *Assessment*. Identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat yang akan dijadikan dasar dalam merumuskan program. Tahapan ini bisa dilakukan bukan hanya berdasarkan needsbased approach (aspirasi

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Edi Suharto. *Corporate Social Responsibility: What is and Benefits for Corporate Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Apa itu dan Apa Manfaatnya Bagi Perusahaan*. Makalah yang Disampaikan pada Seminar Dua Hari CSR (*Corporate Social Responsibility*): Strategy, Management and Leadership, Intipesan, Hotel Aryaduta Jakarta 13-14 February 2008. Hal.8

masyarakat), melainkan pula berpijak pada rights-based approach (konvensi internasional atau standar normatif hak-hak sosial masyarakat).

3. *Plan of action*. Merumuskan rencana aksi. Program yang akan diterapkan sebaiknya memerhatikan aspirasi masyarakat (stakeholders) di satu pihak dan misi perusahaan termasuk shareholders di lain pihak.
4. *Action and Facilitation*. Menerapkan program yang telah disepakati bersama. Program bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat atau organisasi lokal. Namun, bisa pula difasilitasi oleh LSM dan pihak perusahaan. Monitoring, supervisi dan pendampingan merupakan kunci keberhasilan implementasi program.
5. *Evaluation and Termination or Reformation*. Menilai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program CSR di lapangan. Bila berdasarkan evaluasi, program akan diakhiri (termination) maka perlu adanya semacam pengakhiran kontrak dan exit strategy antara pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, melaksanakan TOT CSR melalui *capacity building* terhadap masyarakat (stakeholders) yang akan melanjutkan program CSR secara mandiri. Bila ternyata program CSR akan dilanjutkan (reformation), maka perlu dirumuskan lessons learned bagi pengembangan program CSR berikutnya. Kesepakatan baru bisa dirumuskan sepanjang diperlukan.⁴⁸

Awal perkembangan konsep CSR di Indonesia dimulai dengan penandatanganan kerjasama antara pemerintah Indonesia (Ditjen Pertambangan Umum) dengan Pemerintah Kanada pada tahun 1992. Kerjasama itu mencakup konsep pengembangan CSR di wilayah pertambangan.⁴⁹ Hal ini dipertegas lagi dengan Konferensi Pembangunan Berkelanjutan pada 2002 di Johannesburg,

⁴⁸ *Ibid.* Hal. 9 -10

⁴⁹ Simon F. Sembiring, *Dana CSR Jangan Masuk Ke Kas Daerah*, Majalah Bisnis & CSR, Januari 2008, hal 110.

Afrika Selatan, dimana dicanangkan bahwa sektor ESDM perlu memperhatikan dampak-dampak berkenaan dengan pengolahan ESDM yang tidak terbarukan.

Konsep CSR ini sudah dilakukan sejak lama melalui program *community development* atau *comdev* di sektor pertambangan. Dengan adanya *comdev*, sektor ini telah memberikan *multiplier effect* cukup besar bagi masyarakat, meliputi pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan ekonomi rakyat, pengembangan sumber daya manusia (SDM), dan sebagainya. Secara hakikat, *comdev* merupakan suatu proses adaptasi sosial budaya yang dilakukan oleh perusahaan, pemerintah pusat dan daerah terhadap komunitas lokal. Artinya bahwa perusahaan adalah sebuah elemen dari serangkaian elemen hidup yang berlaku di masyarakat.

Upaya penerapan CSR sendiri bukannya tanpa hambatan. Dari kalangan ekonom sendiri juga muncul reaksi sinis misalnya, mengkritik konsep CSR, dengan argumen bahwa tujuan utama perusahaan pada hakikatnya adalah memaksimalkan keuntungan bagi pemilik saham, dengan mengorbankan hal-hal lain.⁵⁰

Ada juga kalangan yang beranggapan, satu-satunya alasan mengapa perusahaan mau melakukan proyek-proyek yang bersifat sosial adalah karena memang ada keuntungan komersial di baliknya. Yaitu, mengangkat reputasi perusahaan di mata publik ataupun pemerintah. Oleh karena itu, para pelaku bisnis harus menunjukkan dengan bukti nyata bahwa komitmen mereka untuk melaksanakan CSR bukanlah main-main.

Manfaat dari CSR itu sendiri terhadap pelaku bisnis juga bervariasi, tergantung pada sifat perusahaan bersangkutan, dan sulit diukur secara kuantitatif. Meskipun demikian, ada sejumlah besar literatur yang menunjukkan adanya korelasi antara kinerja sosial/lingkungan dengan kinerja finansial dari perusahaan. CSR pada akhirnya akan menguntungkan perusahaan. Tetapi, tentu saja, perusahaan tidak diharapkan akan memperoleh imbalan finansial jangka

⁵⁰ Jalal. *Menimbang CSR Secara Rasional*, dalam *Kompas*, September 2006

pendek, ketika mereka menerapkan strategi CSR. Karena, memang bukan itu yang menjadi tujuannya.

I. 4. Hubungan antar Konsep/Antarvariabel

Globalisasi ekonomi dunia telah memperluas pemahaman tentang CSR. Dengan semakin menipisnya batas-batas negara, banyak perusahaan-perusahaan dengan kekuatan modal yang besar melakukan ekspansi usahanya keluar dari negara asalnya. Perusahaan-perusahaan tersebut disebut dengan perusahaan multinasional atau perusahaan transnasional. Perusahaan multinasional didefinisikan sebagai "*a corporation or enterprise that manages production establishments or delivers services in at least two countries*".⁵¹

Pada umumnya perusahaan multinasional melakukan ekspansi usahanya dengan membangun pabrik-pabrik besar di negara-negara berkembang, dimana aturan-aturan hukum masih lemah, terutama dalam masalah tenaga kerja dan standar pengelolaan lingkungan yang buruk sehingga dapat menghemat biaya operasional perusahaan tersebut.

Bagi negara-negara berkembang yang menerima investasi langsung (*direct investment*) perusahaan-perusahaan besar tersebut, investasi akan disambut dengan sangat baik karena selain mendatangkan pemasukan negara, investasi tersebut juga akan membantu negara berkembang tersebut mengatasi masalah pengangguran di negaranya.

Masalahnya, upaya ekspansi perusahaan dengan maksud menghemat biaya operasional ini tidak selamanya berjalan mulus. Masyarakat pada negara berkembang semakin maju dengan kesadaran akan tanggungjawab perusahaan akan semakin baik yang kemudian menuntut bukti nyata bahwa perusahaan tersebut melaksanakan CSR-nya.⁵²

Diakui atau tidak, kelahiran CSR pada mulanya adalah "sogokan", derma dan pembangunan fisik dari perusahaan kepada masyarakat yang sering

⁵¹ Gunawan Widjaja. *Op cit*, hal 9

⁵² *Ibid*, hal 8.

dirugikan akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh operasional perusahaan. Namun bagi banyak perusahaan saat ini, melaksanakan CSR dengan baik tidak lagi dilihat sebagai biaya ekstra tapi beban manajemen. Bahkan, CSR dilihat tidak hanya untuk menciptakan citra bisnis yang baik dari suatu perusahaan multinasional tetapi juga memberikan kontribusi kemakmuran jangka panjang dan mempertahankan eksistensi perusahaan multinasional tersebut. Bagi masyarakat yang terkena dampak manfaat CSR sungguh besar dimana anggota masyarakat atau komunitas dapat mengaktualisasikan diri dalam mengelola lingkungan hidup yang ada di sekitarnya. Juga dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri, tanpa tergantung kepada perusahaan maupun pemerintah. Sehingga iklim usaha yang kondusif dapat tercipta.

I. 5. Operasionalisasi Konsep ke dalam Indikator

Tabel 1.1 Operasionalisasi Konsep ke dalam Indikator

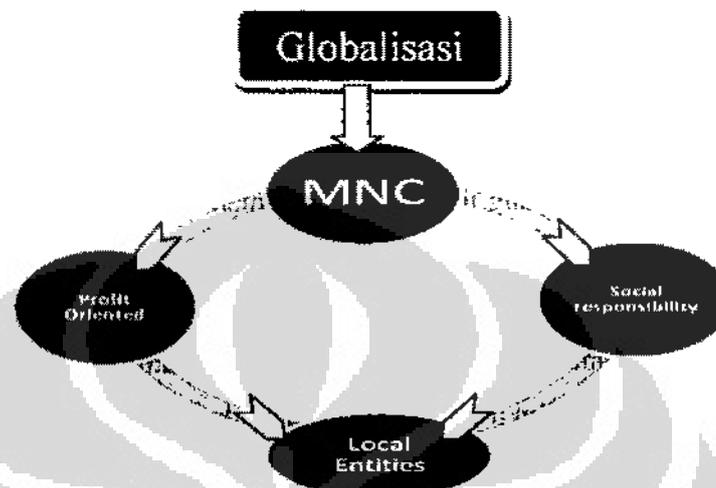
Kompensasi sosial BHP Billiton	1. Bidang ekonomi 2. Bidang sosial
Dampak Terhadap Masyarakat Kabupaten Murung Raya	1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pemberdayaan ekonomi 4. Tenaga kerja

I. 6. Perumusan Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah keberadaan Perusahaan multinasional tidak selalu menimbulkan dampak negatif tetapi juga memberi manfaat kepada masyarakat lokal di negara penerima melalui program *Community Development (Comdev)*.

I. 7. Model Analisis

Gambar 1.2. Skema Model Analisis penelitian



I.8 Metode Penelitian

I. 8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Prof. Sugiyono mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara Triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁵³

Untuk menjelaskan pokok permasalahan dalam penelitian, penulis menggunakan metode kasus. Kasus yang diteliti adalah dampak implementasi CSR BHP Billiton dalam operasionalnya di Kabupaten Murung Raya yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara implementasi pelaksanaan *comdev* BHP Billiton terhadap operasionalnya di Kabupaten Murung Raya.

⁵³ Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Penerbit Alfabeta Bandung, 2005. Hal 2

Metode studi kasus tergolong dalam penelitian kualitatif. Kata “kasus” ini mengandung makna khusus, unik, spesial, keluar dari pola biasanya. Metode Studi Kasus digunakan bila ingin mengkaji suatu fenomena secara lebih mendalam, memiliki ciri-ciri khusus yang tidak dimiliki fenomena lain. Penemuan dalam studi ini tidak perlu digeneralisasikan ke konteks lain, dan hal-hal yang berkaitan dengan konsep generalisasi temuan seperti populasi, sampel, statistik inferensial tidak diperlukan dalam studi kasus.⁵⁴ Metode penelitian studi kasus mempunyai kelemahan lain yaitu kurang obyektif karena memungkinkan peneliti agak terlibat secara emosional terhadap obyek kasus yang diteliti. Karena itu, untuk mempertajam data penelitian, penulis melakukan penelitian ini dengan cara observasi.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian untuk mengetahui dampak pelaksanaan *comdev* yang dilakukan oleh BHP Billiton dalam operasionalnya di Kabupaten Murung Raya, merupakan Penelitian Kualitatif menggunakan metode Studi Kasus yang didukung dengan Observasi.

I. 8.2 Sumber Data

Penelitian kualitatif membutuhkan pengumpulan data dalam rangka menggambarkan kejadian-kejadian rutin atau penting dan memahami keadaan obyek penelitian. Data yang perlu diperoleh berupa hasil wawancara atau catatan laporan bacaan dari buku-buku, artikel-artikel dan juga data-data yang tidak tertulis seperti foto-foto, gambar atau film. Disamping itu penelitian ini juga mengandalkan data dari penelitian terdahulu dan penelitian lain mengenai terhadap permasalahan tanggung jawab sosial perusahaan ini. Penelitian ini juga di dukung dengan data-data pembanding dengan obyek dan topik yang menunjang penelitian. Oleh karena itu, dalam melengkapi pengumpulan data melalui observasi lapangan penulis akan melakukan *indepth interview* (pertanyaan bebas) terhadap beberapa narasumber yang relevan.

⁵⁴ Prasetyo Irawan. *Logika dan Prosedur Penelitian*, Jakarta:STIA-LAN Press, 1999. Hal 32.

I.8.3. Teknik Pengumpulan Data

I.8.3.1 Data Primer

- **Wawancara**

Data akan diperoleh melalui wawancara langsung dengan sumber terkait antara lain dari lingkungan eksternal perusahaan yaitu sasaran penerapan *comdev* BHP Billiton; masyarakat sekitar tambang, dan dari lingkungan internal BHP Billiton, yaitu karyawan perusahaan yang sering berhubungan langsung dengan masyarakat yaitu manajemen pelaksanaan *comdev* perusahaan. Teknik pengumpulan data ini menggunakan alat panduan wawancara, yang dilakukan dengan *indepth interview*, sehingga jawaban dari informan bersifat terbuka.

- **Observasi Lapangan**

Dalam observasi lapangan penulis akan melakukan pengamatan tentang lingkungan obyek penelitian secara umum dan lingkungan responden yang di wawancara di lokasi penelitian. Keadaan pada lapangan penelitian selain sebagai *cross check* data yang telah di peroleh, juga penulis dapat temui hal-hal baru yang dapat menunjang data yang telah ada sebelumnya.

I.8.3.2 Data Sekunder

- **Penelitian Terdahulu**

Diakui bahwa penelitian terhadap tanggungjawab perusahaan multinasional bukanlah yang pertama. Untuk itu penelitian-penelitian sebelumnya sangat membantu dan digunakan dalam menunjang penelitian ini.

- **Instansi pemerintah terkait di Indonesia**

Laporan maupun jurnal dan berbagai penelitian yang terkait pada jaringan ini menjadi dasar dan memberi gambaran tentang obyek penelitian.

- **Laporan Tahunan Perusahaan**

Laporan dan beberapa edisi jurnal sesuai kegiatan BHP Billiton dapat menjadi sumber data tentang bagaimana perkembangan tanggungjawab sosial perusahaan yang telah dilakukan.

- **Hasil Publikasi Media Cetak**

Pengumpulan data dari berbagai lembaga non-formal sipil dalam yang memiliki fokus dan ketertarikan dalam masalah ini, menjadi masukan penting dalam penelitian ini.

- **Internet**

Kemajuan Teknologi Informasi sangat penting dan sangat membantu penulis dalam pengumpulan berbagai data perbandingan dan lainnya sehubungan dengan penelitian. Data melalui internet terutama kasus-kasus yang sama dengan penelitian, dan juga kosep-konsept dari berbagai variabel penelitian.

I. 9 Sistematika Penulisan

- Bab I.** Pendahuluan yang terdiri atas perumusan masalah, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II.** Berisikan gambaran umum lokasi penelitian dan profil perusahaan BHP Billiton.
- Bab III.** Berisikan Implementasi *comdev* BHP Billiton dan kendala-kendala yang dihadapi serta dampaknya bagi sosial dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Murung Raya. Sehingga dapat diketahui bagaimana penerapan CSR di perusahaan multinasional dalam rangka membangun hubungan saling menguntungkan dengan masyarakat lokal dimana mereka beroperasi.
- Bab IV.** Penutup, berisikan kesimpulan umum dari keseluruhan persoalan yang telah di bahas dalam bab-bab sebelumnya, serta saran-saran bagi kepentingan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial BHP Billiton di Kabupaten Murung Raya.

I.10 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip *interview*, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang di dapat, yang kesemuanya itu dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap suatu fenomena dengan membantu untuk mempresentasikan penemuan terhadap orang lain.⁵⁵

Bogdan dan Biklen memberi rambu-rambu dalam analisis data⁵⁶ yaitu:

1. Mempersempit cakupan penelitian
2. Menemukan Tipe atau metode Riset sedini mungkin
3. Mengembangkan pertanyaan-pertanyaan analisis
4. Merencanakan pengumpulan data untuk esok hari berdasarkan pengumpulan data hari ini atau hari sebelumnya
5. Membuat catatan dan komentar terhadap data mentah
6. Membuat memo atau rangkuman
7. Mengujicobakan beberapa ide kepada subyek peneliti
8. Mengkaji literatur pada saat analisis data
9. Memanfaatkan berbagai metafora, analogi dan konsep dalam analisis dan interpretasi data.

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis secara kualitatif, sedangkan angka-angka yang bersifat kuantitatif fungsinya memperjelas dan memperkuat analisis kualitatif.

Dengan demikian maka penelitian terhadap Dampak Implementasi CSR melalui Program *comdev* yang dilaksanakan oleh BHP Billiton bagi masyarakat di Kabupaten Murung Raya terhadap operasionalnya adalah:

1. Menentukan BHP Billiton, PEMDA Kabupaten Murung Raya dan masyarakat di wilayah lahan tambang sebagai areal penelitian
2. Memilih studi kasus dengan observasi lapangan sebagai metode penelitian

⁵⁵ *Ibid*, hlm 100.

⁵⁶ *Ibid*, hlm 101

3. Memberi pertanyaan-pertanyaan yang singkat dan jelas sehingga jawaban yang diberikan terbuka dan dapat dianalisis
4. Memanfaatkan sebagian dari penelitian terdahulu untuk menganalisis data
5. Melakukan identifikasi implementasi *comdev* yang sudah dilakukan oleh BHP Billiton di kabupaten Murung Raya
6. Melakukan analisis Implementasi program *comdev* BHP Billiton terhadap operasional perusahaan dan hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat lokal dan perusahaan.
7. Analisis diakhiri dengan kesimpulan dan saran mengenai dampak Pelaksanaan CSR oleh BHP Billiton melalui program *comdev* bagi masyarakat di Kabupaten Murung Raya untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

BAB II

BHP BILLITON & BORNEO GOLD BELT

II.1. BHP Billiton Sebagai Perusahaan Multinasional dalam Perekonomian Internasional

Perusahaan multinasional atau *Multinational Corporations* (MNC's) merupakan aktor utama dalam panggung bisnis internasional. Jenis perusahaan ini pada saat sekarang ini memegang peranan penting untuk sebagian transaksi internasional. Kekuasaan dan pengaruh perusahaan multinasional makin menarik perhatian pemerintah mengingat semakin besarnya pengaruh mereka. Terdapat berbagai karakteristik yang muncul dalam pembahasan perusahaan multinasional tersebut. Namun hal yang menjadi sifat khasnya menurut Gilpin adalah bahwa perusahaan multinasional melakukan penanaman modal langsung di negara asing dengan pendirian anak perusahaan/cabang atau pengambil alihan sebuah perusahaan asing dimana sasaran penanaman modal tersebut adalah pengawasan manajemen terhadap satu unit produksi di suatu negara asing. Perusahaan multinasional ditandai dengan adanya perusahaan induk atau cabang perusahaan di berbagai negara dengan satu penampung bersama sumber manajemen, keuangan dan teknik. Dalam hal ini melalui integrasi vertikal dan sentralisasi pengambilan keputusan, perusahaan induk berusaha mengekalkan kedudukan monopolinya dalam hal teknologi, modal yang siap pakai dan seterusnya kemudian motivasi bagi penanaman modal langsung dan bagi pemilik anak-anak perusahaan asing serta cabang-cabang di pihak lainnya terutama dalam penguasaan pasar dan penguasaan manajemen.⁵⁷

⁵⁷Gilpin, Robert. *Global Political Economy: Understanding The International Economic Order*. New Jersey: Princeton University Press, 2001.

BHP Billiton sebagai perusahaan multinasional dalam operasionalnya mempunyai karakteristik yang sama dengan pandangan Gilpin diatas, dimana BHP Billiton memiliki anak perusahaan di berbagai negara. BHP Billiton adalah sebuah Perusahaan merger antara BHP Limited (sekarang BHP Billiton Limited) dengan Billiton Plc (sekarang BHP Billiton Plc), yang dilakukan pada tanggal 29 Juni 2001. Perusahaan ini bergerak dalam bisnis aneka tambang, menempati posisi penting dalam bisnis komoditas yang besar/utama, termasuk aluminium, energi batu bara dan metalurgi batu bara, tembaga, batu kawi, bijih besi, uranium, nikel, perak dan titanium mineral, dan juga memiliki minat yang besar dalam minyak, gas, gas alam cair dan berlian.

BHP Billiton Limited dan BHP Billiton Plc meneruskan keberadaan sebagai perusahaan yang terpisah, tetapi dalam menyelenggarakan eksplorasi tetap sebagai BHP Billiton. Sampai sekarang perusahaan ini telah mempunyai 41.000 karyawan yang bekerja di lebih dari 100 Eksplorasi-eksplorasi yang ada di 25 negara. Kantor pusat BHP Billiton Limited dan Kantor pusat gabungan (Merger) BHP Billiton Group berada di Melbourne, Australia sedangkan BHP Billiton Plc berada di London, Inggris Raya. Kedua perusahaan ini mempunyai susunan direksi yang sama (identik) dan dijalankan oleh tim manajemen yang kompak. Pemegang saham di masing-masing perusahaan memiliki hak ekonomi dan voting yang setara/sama dalam BHP Billiton Group secara keseluruhan.⁵⁸

Dengan falsafah perusahaan bahwa BHP Billiton adalah sebuah perusahaan sumber daya terkemuka di dunia bertujuan untuk menciptakan nilai jangka panjang melalui penemuan, pengembangan, dan pengolahan sumber daya alam, serta memberikan solusi inovatif yang berorientasi pada pelanggan dan pasar.

⁵⁸ BHP Billiton Profile. *About Us*. Diakses pada <http://sustainability.bhpbilliton.com/2003/overview/profile.html>, 5 maret 2009

II.2 Borneo Gold Belt

Siapa pun pasti akan mengakui bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang tidak terhitung banyaknya. Bahkan kekayaan tersebut meliputi seluruh sektor, mulai dari kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan darat dan laut, sampai pada pertambangan. Salah satu daerah di Indonesia yang paling banyak menyimpan potensi alamnya adalah Kalimantan Tengah.

Secara geologis, Kalimantan Tengah terdiri atas satuan batuan beku (25%), bantuan sedimen (65%) dan batuan metamorf (10%). Ketiga satuan batuan ini membawa potensi bahan galian tambang yang beragam. Karena itulah Kalimantan Tengah memiliki areal pertambangan yang luar biasa. Menurut peta Geologi lembar Kalimantan, pada bagian utara Kalimantan Tengah dikenal "*Borneo Gold Belt*", sebuah jalur mineralisasi yang menghasilkan berbagai mineral bernilai ekonomi seperti: Au, Ag, Cu, Zn, Pb, Fe dan intan serta mineral-mineral industri seperti: Kaolin, Pasir Kwarsa, Bentonite maupun Granit.

Sumber daya mineral ini merupakan sumber daya yang memiliki nilai ekonomis paling besar. Jumlah cadangan sangat besar dan kandungan bijih logam (emas, uranium, tembaga, intan, batu bara, dan lain-lain) sangat tinggi, bahkan cadangan emas dan batu bara di wilayah ini merupakan cadangan tertinggi di Pulau Kalimantan.

Dalam pertambangan batubara, daerah ini memiliki potensi sekitar 3,5 miliar ton.⁵⁹ Angka yang amat fantastis untuk bisa mengangkat kesejahteraan rakyatnya. Dari angka tersebut, diperkirakan ada sekitar satu miliar ton yang merupakan batubara pembuat kokas (cooking coal), yaitu jenis batubara terbaik dengan harga yang relatif tinggi. Sejauh ini, batu bara terbaik hanya ada di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Artinya, peluang untuk mengembangkan sektor pertambangan bagi Kalimantan Tengah, sangatlah besar. Bayangkan saja, saat ini harga batu bara jenis kokas mencapai US\$100

⁵⁹ Milimeter Indonesia. *Batu Bara kalteng*. Diakses pada <http://milimeterindonesia.com/news/kalimantan/batu-bara-kalteng.html>, 22 Mei 2009 pukul 10.53

per ton, sementara harga batubara jenis termal US\$60 per ton. Namun, pasar batu bara kokas masih terbatas, karena hanya menjadi konsumsi pabrik peleburan baja.⁶⁰

Di Kalimantan Tengah telah ada lebih dari 247 kuasa pertambangan (KP) batubara dan 15 pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara (PKP2B). Ke-15 perusahaan tambang itu tersebar di Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, dan Barito Timur.

II.2.1. Kabupaten Murung Raya

Kabupaten Murung Raya sebagai salah satu daerah pemekaran baru di bagian utara Provinsi Kalimantan Tengah dan merupakan daerah yang di lewati oleh jalur mineralisasi "borneo gold belt", di karuniai berbagai macam sumber daya alam yang sangat besar yang berupa : bahan mineral, hutan, cagar alam, dan lain-lain yang tersimpan di dalamnya.

Kabupaten ini di bentuk berdasarkan UU RI Nomor 5 Tahun 2002 dan diresmikan pada tanggal 3 Juli 2003. Kabupaten Murung Raya terletak di pedalaman pulau kalimantan dan terletak di daerah khatulistiwa yaitu pada posisi 114° 27' 00" - 115° 49' 00" Bujur Timur dan 0° 58' 30" Lintang Selatan 1° 26' 0" Lintang Selatan (BPS, 2007). Wilayah ini berbatasan antara lain sebelah utara dengan Propinsi Kalimantan Barat dan Propinsi Kalimantan Timur, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara, sebelah timur dengan Propinsi Kalimantan Timur, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas dan Propinsi Kalimantan Barat.

⁶⁰ *Ibid*

Gambar 2.1 : Peta Geografis Kabupaten Murung Raya



Sumber : Murung Raya dalam Angka, 2008

Kabupaten Murung Raya merupakan kabupaten terluas di Kalimantan Tengah, dengan luas 23.700 Km², yang terdiri dari 10 Kecamatan, 115 Desa dan 9 Kelurahan, yaitu: Kecamatan Permata Intan, Kecamatan Murung, Kecamatan Laung Tuhup, Kecamatan Tanah Siang, Kecamatan Sumber Barito, Kecamatan Sungai Babuat, Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kecamatan Seribu Riam, Kecamatan Ut Murung. Kecamatan dengan luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Seribu Riam, dengan luas wilayah sebesar 6.065 km² atau mencakup 25,59% dari total luas kabupaten, dan terkecil adalah Kecamatan Barito Tuhup Raya dengan luas 236 km² atau 1% dari luas wilayah kabupaten.

Jumlah penduduk Murung Raya tahun 2007 ada 89.716 orang, dengan 48,33 % perempuan dan 51,67 % laki-laki, dengan kepala keluarga sebanyak 22.034 jiwa dan sex ratio sebesar 107. Distribusi penduduk terbesar terletak di Kecamatan Murung dengan jumlah penduduk sebesar 25.014 jiwa atau 27,88%

dari total penduduk dan terkecil di Kecamatan Sungai Babuat dengan penduduk 2.650 jiwa atau 2.95% dari total penduduk. Berdasarkan luas wilayah dibanding dengan jumlah penduduk yang ada, kepadatan penduduk Murung Raya tergolong jarang, dimana ada hanya sekitar 4 orang per km persegi.

Dari keseluruhan penduduk Murung Raya, 71,49 % berumur 10 tahun ke atas yang merupakan penduduk usia produktif secara ekonomis. Sebagian besar penduduk (35,96%) berumur 10 tahun ke atas bekerja di sektor pertanian, sedangkan sektor terkecil penyerapannya adalah sektor konstruksi yakni 0,31%. Relatif masih rendahnya tingkat pendidikan SDM yang bekerja, terlihat dari tingkat pendidikan penduduk yang bekerja itu sendiri. Berdasarkan jumlah pencari kerja yang terdaftar tercermin tidak seimbangnya antara pencari kerja dan kesempatan kerja yang tersedia. Rata-rata setiap tahunnya tidak lebih dari 16,64% dari seluruh jumlah pencari kerja terdaftar yang mendapat pekerjaan, dan sisanya sekitar 83,36% masih belum mendapatkan kesempatan.

Dari segi keagamaan masyarakat Kabupaten Murung Raya memiliki tingkat keberagaman yang cukup besar, khususnya untuk 4 (empat) agama resmi di Indonesia (Islam, Protestan, Katolik dan Hindu). Agama dengan penganut terbesar adalah Islam dengan penganut sebanyak 45.589 jiwa (51.63%), sedangkan terkecil adalah agama Budha dengan jumlah penganut sebanyak 6 jiwa (0.0068%).

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas SDM. Gambaran umum keadaan pendidikan di Kabupaten Murung Raya antara lain tercermin dari jumlah prasarana pendidikan (sekolah), murid dan guru. Tahun 2007 jumlah sekolah menurut strata yaitu pendidikan dasar, lanjutan dan tinggi menunjukkan peningkatan. Sedangkan rasio murid terhadap guru belum ideal dimana rata-rata seorang guru menangani tidak lebih dari 14 orang murid untuk tingkat pendidikan dasar.

Di bidang kesehatan pembangunan prasarana kesehatan untuk masyarakat seperti puskesmas, posyandu, pos obat desa dan rumah bersalin dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Rasio dokter (Dokter Umum) per jumlah

penduduk hingga tahun 2007 relatif belum ideal karena seorang dokter harus menangani lebih dari 6.901 orang. Pada tahun 2007 jumlah tenaga kerja kesehatan di Kabupaten Murung Raya yang terdiri atas dokter, bidan, pengatur rawat, apoteker dan tenaga teknis lainnya sebanyak 193 orang.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Murung Raya ditunjukkan oleh pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dan harga berlaku. Keadaan PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi selama tahun 2005–2007 di Kabupaten Murung Raya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Murung Raya atas dasar harga konstan sejak tahun 2005 hingga tahun 2007 cenderung positif. Pertumbuhan tahun 2001 sebesar -0,05%, selanjutnya pada tahun 2002 dan 2003 masing-masing -16,58% dan -0,46%. Kemudian pertumbuhan atas dasar harga berlaku pada tahun 2001 mencapai 13,78%, pada tahun 2002 terjadi pertumbuhan negatif (-12,04%), dan pada tahun 2003 pertumbuhan mencapai 4,49%.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Murung Raya baik atas dasar harga berlaku (4,49%) maupun atas dasar harga konstan (-0,46%) lebih rendah jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi di tingkat propinsi (Laju pertumbuhan ekonomi di tingkat propinsi atas dasar harga berlaku mencapai 14,61% atas dasar harga konstan 4,86%).

Pertumbuhan ekonomi regional sangat erat hubungannya dengan pertumbuhan masing-masing sektor yang membentuknya. Besarnya masing-masing sektor ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Murung Raya selama tahun 2001 – 2003, Pada tahun 2003 perekonomian Kabupaten Murung Raya masih merasakan dampak krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Murung Raya pada tahun 2001 sebesar minus 0,05%, kemudian pada tahun 2002 sebesar minus 16,58%, dan pada tahun 2003 tumbuh sebesar minus 0,46%. Hal ini berarti menunjukkan perekonomian Kabupaten Murung Raya telah menuju ke arah yang membaik.

Dilihat dari besarnya kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap pembentukan PDRB kabupaten, maka perekonomian Kabupaten Murung Raya

didominasi oleh tiga sektor yaitu: sektor Pertanian, sektor Pertambangan dan Penggalian, serta sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Pada tahun 2003 ketiga sektor tersebut mampu memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Murung Raya masing-masing 41,21%; 21,04% dan 20,21%. Sedangkan kontribusi sektor-sektor lainnya hanya berkisar antara 0,25% hingga 5,66%.

Pendapatan regional perkapita sering digunakan sebagai salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat. Apabila laju pertumbuhan ekonomi secara riil lebih besar dari pertumbuhan penduduk, maka akan terjadi peningkatan pendapatan regional perkapita masyarakat. Sebaliknya jika laju pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari laju pertumbuhan penduduk, maka pendapatan perkapita masyarakat akan mengalami penurunan. Pendapatan regional perkapita masyarakat Kabupaten Murung Raya pada tahun 2003 atas dasar harga konstan tahun 1993 mencapai Rp 2.741.096, - dan atas dasar harga berlaku mencapai Rp 9.633.695, -.

Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Kabupaten Murung Raya pada tahun 2004 mencapai 23,99%. Dimana Potensi bahan galian tambang di Kabupaten Murung Raya dapat digolongkan menjadi 3 golongan yaitu :

- (1) Golongan A, yaitu bahan galian golongan strategis, antara lain : Minyak, Gas Bumi, dan Batu Bara;
- (2) Golongan B, yaitu bahan galian vital antara lain : Emas, Intan, dan Antimonit dan
- (3) Golongan C yaitu bahan galian yang tidak termasuk golongan strategis dan vital yaitu : Batu Kapur, Bentonite, Basal, Phosphat, Kaolin, Mika, Andesit, Granit dan Gabro.

Bahan galian yang telah dan sedang menjadi primadona bagi Kabupaten Murung Raya sekarang ini adalah Batubara, Emas dan Intan. Bahan tambang emas yang terdapat di Kabupaten Murung Raya merupakan tipe endapan primer

dengan cadangan indikasi sebesar 3,8 juta ton. lokasi potensi bahan tambang emas ini terdapat di Kecamatan Permata Intan, Tanah Siang, Sumber Barito dan Murung. Untuk penambangan emas skala besar oleh perusahaan sudah cukup banyak. Untuk kegiatan penambangan umum emas di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 6 buah KK dan 3 buah KP. Dari jumlah tersebut yang beroperasi di Kabupaten Murung Raya terdapat 3 buah KK dan 6 buah KP (3 buah KP dalam proses penyelesaian perijinan) dengan luas areal pengusahaan sampai tahun 2004 mencapai 1.942.010 ha. Banyaknya perusahaan tambang emas yang beroperasi di Kabupaten Murung Raya menunjukkan besarnya peluang untuk berinvestasi di pertambangan emas di kabupaten ini.

Tabel 2.1. Daftar Bahan Galian Menurut Jenis di Kabupaten Murung Raya

Jenis Bahan Galian	Kecamatan	Tipe Endapan	Cadangan Indikasi	Sumber
1	2	3	4	5
Batubara	Tanah Siang	Sedimenter	85.000.000	Distamben Prop.Kalteng
	Permata Intan	Sedimenter	60.000.000	
	Sumber Barito	Sedimenter	735.000.000	
	Laung Tuhup	Sedimenter	102.530.000	
Emas	Tanah Siang	Primer	3,8 juta	Distamben Prop.Kalteng
	Murung	Primer	1 juta	
Intan	Murung	Alluvial	1,7 juta	Distamben Prop.Kalteng
	Permata Intan	Alluvial	1,7 juta	
Kapur	Murung	Sedimen	500.000	Distamben Prop.Kalteng
	Permata Intan	Sedimen	-	
Pasir/ kerikil	Murung	Alluvial	-	Distamben Prop.Kalteng
	Permata Intan	Alluvial	-	
	Sumber barito	Alluvial	-	

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Murung Raya, *Profil Investasi*, Tahun 2008

Sementara itu, bahan tambang intan merupakan tipe endapan Alluvial, dengan cadangan indikasi sebesar 3,4 juta ton. Lokasi potensi bahan tambang

intan terdapat di Kecamatan Murung dan Permata Intan. Khususnya untuk bahan tambang intan, sampai sekarang belum ada perusahaan penambangan skala besar berinvestasi untuk menggali potensi bahan tambang ini, yang ada masih berupa tambang rakyat.

Selain emas dan intan, Batubara merupakan jenis bahan tambang potensial yang ditemukan di Kabupaten Murung Raya.⁶¹ Potensi bahan tambang di Kabupaten ini terdiri dari :

- (1) tipe lignit dengan potensi sumberdaya terkira sekitar 60,6 juta ton;
- (2) tipe termal dengan potensi sumberdaya terkira sekitar 22,2 juta ton;
- (3) tipe premium atau semi-coking dengan potensi sumberdaya terkira sekitar 866,3 juta ton.

Tentunya gambaran data tersebut setiap saat dapat berubah seiring dengan kemajuan tahapan penyelidikan. Lokasi potensi bahan tambang Batubara tersebut terdapat di Kecamatan Tanah Siang, Permata Intan, Sumber Barito dan Laung Tuhup

Dalam rangka menarik dan meningkatkan investasi, maka ditetapkan strategi kebijakan investasi daerah Kabupaten Murung Raya yang menitik beratkan pada : *Pemetaan (mapping)* tentang wilayah yang akan dikembangkan berdasarkan potensi sumberdaya yang dimiliki sesuai dengan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya, *meningkatkan/membangun sarana dan prasarana fisik yang diperlukan* untuk menjamin kelancaran usaha-usaha di daerah, agar fasilitas yang dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal, dengan prioritas pembangunan pada wilayah-wilayah yang menjadi atau dekat dengan pusat-pusat pertumbuhan dan sesuai dengan jenis usaha yang potensial untuk dikembangkan, kemudian *melakukan identifikasi berbagai peluang usaha yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif* sesuai dengan potensi sumberdaya alam (resource based) yang dimiliki yang kemudian dituangkan dalam bentuk profil-profil proyek peluang investasi yang menarik, sebagai bahan promosi, *Meningkatkan efektifitas pelaksanaan*

⁶¹ Bappenamoda Kabupaten Murung Raya, 2008

kegiatan promosi investasi, dengan memperkaya ragam dan jenis serta mutu layanan informasi dan menyelenggarakan kegiatan pameran investasi, *memberikan pelayanan prima, cepat, mudah, murah, transparan dan memiliki akuntabilitas* dengan prinsip pelayanan satu atap agar tingkat efisiensi pelayanan perijinan dapat ditingkatkan, *mengkondisikan masyarakat* terutama yang berada di lingkungan lokasi-lokasi proyek untuk menghindarkan terjadinya konflik kepentingan antara masyarakat dengan investor, sehingga dapat terciptanya keamanan, kenyamanan dan kepastian berusaha, *merintis dan melaksanakan pemerintahan dengan prinsip good governance* yang memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi, *meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumberdaya manusia daerah*, baik aparatur daerah maupun pelaku bisnis, melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan.

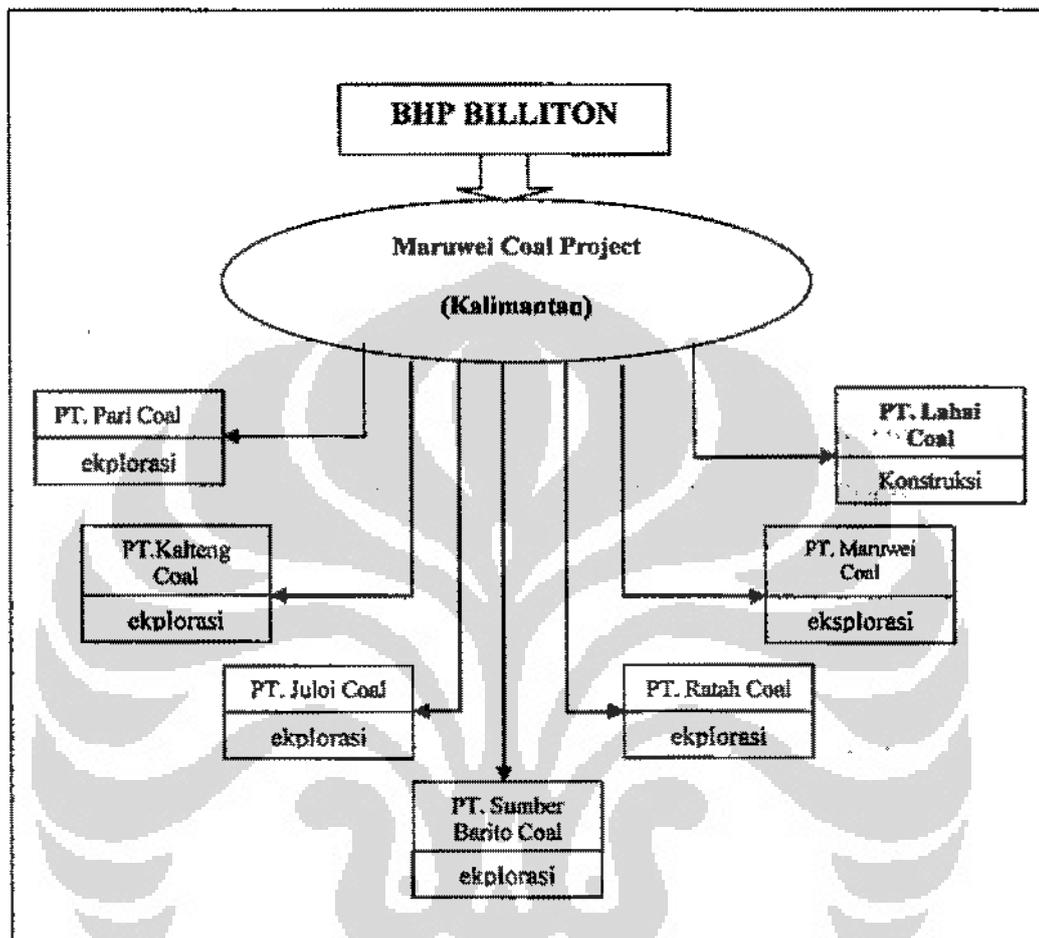
Dengan jumlah cadangan sumber daya mineral yang sangat besar dan sangat tinggi dan adanya strategi kebijakan investasi daerah Kabupaten Murung Raya tersebut, tidak heran daerah jalur mineralisasi Borneo Gold belt ini mengundang para investor dari dalam maupun luar negeri untuk menanamkan investasinya di daerah ini.

Perusahaan yang beroperasi mengusahakan batu Bara di Kabupaten Murung Raya meliputi 10 PKP2B dan 8 KP (sebagian masih dalam proses penyelesaian perijinan), dengan luas areal pengusahaan mencapai 747.541 Ha. Banyaknya perusahaan Batubara yang beroperasi di Kabupaten Murung Raya, menunjukkan besarnya peluang untuk berinvestasi di pertambangan Batubara di Kabupaten ini.

II.3 Keberadaan BHP Billiton di *Borneo Gold Belt*.

Keberadaan *Borneo Gold Belt* sebagai kawasan yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, khususnya di dalam hal potensi bahan tambang menarik investor asing untuk datang. Salah satu perusahaan multinasional yang tertarik pada besarnya sumber daya alam dalam pertambangan batubara di Kabupaten Murung Raya adalah BHP Billiton. Bukti keseriusan BHP Billiton dalam menangani pengelolaan tambang di kawasan ini dapat dilihat dari banyaknya anak perusahaan MNC ini yang beroperasi khusus di kawasan ini. Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa BHP Billiton memiliki 7 (tujuh) anak perusahaan yang tergabung dalam Maruwai Coal Projects, sebuah proyek penambangan batubara yg berkelanjutan, antara lain PT Sumber Barito Coal, PT Kalteng Coal, PT Julai Coal, PT Pari Coal, PT Ratah Coal, dan PT Maruwei Coal. Total luas wilayah konsesi tambang batubara BHP Biliton di Kalimantan Tengah mencapai 355.000 Ha di sekitar perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Timur tepatnya Kabupaten Murung Raya ini. Skema BHP Biilliton dan anak perusahaannya yang beroperasi di kawasan Borneo Gold Belt ini dapat dilihat pada gambar 2.2 di bawah ini:

Gambar 2.2 : Skema BHP Billiton & Anak Perusahaan



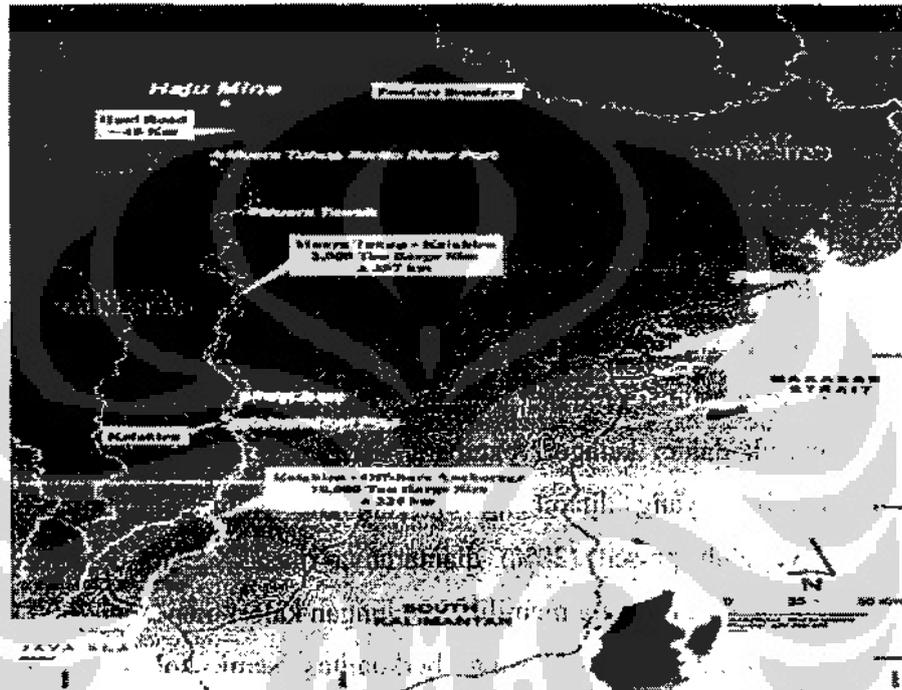
Sumber : Analisa data Andal PT. LC, 2008

Meskipun memiliki 7 (tujuh) anak perusahaan, namun belum semua anak perusahaan ini telah beroperasi secara penuh. Salah satu anak perusahaan BHP Billiton yang telah memasuki tahap konstruksi adalah PT Lahai Coal (PT LC), sehingga perusahaan ini dianggap sebagai objek penelitian yang memadai untuk penelitian ini.

PT.LC ini sendiri telah menandatangani suatu Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi III dengan Pemerintah Indonesia pada tanggal 6 September 2000 berdasarkan surat persetujuan Presiden Republik Indonesia No.B1/Pres/1/2000 tertanggal 18 Januari 2000.

Dari keseluruhan konsesi BHP Billiton, untuk PT. LC saja lahan yang menjadi kawasan konsesi seluas 98.230 hektar, yang dapat dilihat pada gambar 2.3 di bawah ini.:

Gambar 2.3. Lokasi Haju Mine (PT. Lahai Coal)



Sumber: RKAB PT. Lahai Coal, 2008.

PT. LC telah melakukan kegiatan eksporasi batubara sejak Juli 2000 dan telah mengidentifikasi adanya 3 (tiga) daerah cadangan batubara yang berpotensi untuk dapat di tambang yaitu daerah cadangan batubara Usai, Malibu dan Haju yang berlokasi di Kecamatan Lahai, Kabupaten Barito Utara dan Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya.

Pada tanggal 22 Januari 2003, program penciutan pertama wilayah PKP2B telah dilakukan sehingga total wilayah saat ini berkurang menjadi 46.620 hektar (Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.003.K/40.00/MEM/2003). Dikarenakan lokasi cadangan Malibu dan Usai berada di dalam wilayah Hutan Lindung dimana berdasarkan Undang-Undang

Tentang Kehutanan No.41/1999 penambangan dengan metode tambang terbuka dilarang di wilayah hutan lindung, maka untuk tahap pertama, PT. LC merencanakan mengambakan daerah cadangan Haju yang meliputi wilayah sekitar 4900 hektar di sekitar batas Barat Daya wilayah PKP2B PT. LC di Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, untuk dapat ditambang dan di produksi. Pada sisa wilayah seluas 41.720 hektar akan terus dilakukan kegiatan eksplorasi. Dari luas ini, baru lebih kurang 829 Ha yang telah mengantongi Ijin Prinsip Pinjam Pakai dari Departemen Kehutanan sejak 18 Juli 2007.

Jumlah cadangan yang dapat ditambang (*mineable reserve*) di Tambang Haju diperkirakan sebesar 4 juta ton. Rencana produksi per tahun 1-2 juta ton. Ini artinya, masa tambang (*mine life*) Tambang Haju, berumur sekitar 4 tahun dengan asumsi produksi per tahun 1 juta ton. Batubara yang ada di wilayah ini masuk dalam katagori batubara kokas (*coking coal*). Namun, bukan berarti batubara yang ditambang di Tambang Haju seluruhnya batubara kokas. Tigapuluh persen (30%) diantaranya masuk dalam katagori *High Quality Thermal Coal*, yang memiliki kandungan kalori mencapai 7000 Kcal.

Batubara Haju yang berkualitas semi kokas (*semi soft cooking*) diperuntukkan untuk pencampuran dengan batubara kokas berkualitas tinggi (*hard coking coal*) dalam pembuatan kokas. Oleh karena itu nilai ekonomis batubara kokas Haju sangat marginal di pasaran kokas dunia. Sedangkan untuk batubara Haju yang berkualitas thermal, dapat dikelompokkan dalam jenis yang mempunyai kalori yang tinggi.

Karena nilai kokas yang rendah dan produksi yang tidak begitu banyak ini, maka batubara Haju akan dipasarkan untuk mengisi disela-sela pemasaran batubara kokas yang dikelola oleh bagian pemasaran corporate yang juga memasarkan batubara kokas dari beberapa tambang di luar Indonesia. Daya tarik dari kokas tambang haju ini adalah kadar abu yang rendah, sehingga dapat digunakan atau dicampur dengan batubara kokas premium yang mempunyai kadar abu yang relatif tinggi.

Pasar utama batubara kokas dari tambang Haju adalah Asia, khususnya Jepang yang merupakan produsen utama baja di Asia, disamping China. Beberapa produsen baja dari Korea Selatan juga akan dijanggi untuk memasarkan kokas ini. Meskipun negara-negara Eropa dalam waktu mendatang diperkirakan akan lebih banyak mengimpor batubara kokas, namun hal ini tidak akan menjadikan pasar yang baru untuk batubara Haju. Hal ini dikarenakan biaya pengapalan yang mahal untuk dapat dipasarkan di Eropa. Jadi untuk tahun-tahun mendatang, batubara Haju akan masih tetap dipasarkan di Wilayah Asia seperti Jepang, China, Korea dan India dengan melihat perkembangan industri baja dan pasokan batubara kokas di pasar dunia.

Gambar 2.4. Ekspor Batubara Jenis Kokas



Sumber : RKAB PT. LC Tahun 2008

Dalam perjalanan investasinya di Kalimantan Tengah, BHP Billiton melalui PT LC ini telah menanamkan investasinya sebesar 66 juta dolar AS atau sekitar Rp 594 miliar di lokasi blok Haju.

Untuk itu BHP Billiton berkomitmen untuk tetap menanamkan investasinya di Indonesia, memberikan pengalaman operasional di wilayah

pertambangan, memperkenalkan produk kokas Indonesia kepada pasar kokas dunia dan menunjukkan komitmen menyeluruh BHP Billiton terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Lingkungan Hidup dan Pengembangan Masyarakat kepada semua pemangku kepentingan.

II.3.1 Rencana Strategis PT LC

Kegiatan perhitungan cadangan dan sumberdaya telah dilakukan pada Februari 2008 mencakup seluruh lokasi di wilayah PKP2B PT Lahai Coal dengan menggunakan piranti lunak Vulcan untuk blok yang sudah memiliki data pemboran sedangkan bagi yang belum dihitung dengan cara manusia.

Kegiatan Blok lain selain Blok Haju konstruksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan yang berkelanjutan dari rencana tambang di Blok Haju yang akan berproduksi selama 5 tahun.

Blok Bara merupakan bagian dari sumber daya batu bara di PT Lahai Coal yang mungkin akan dikembangkan lebih lanjut setelah Blok Haju. Pemboran di Blok Baru dengan spasi antar lubang bor 500 m pada tahun 2009, diharapkan hasil perhitungan sumber daya batu bara yang dihasilkan akan menjadi acuan untuk melakukan kegiatan kajian kelayakan lebih lanjut.

Kegiatan eksplorasi yang dilakukan di wilayah PKP2B PT Lahai Coal merupakan bagian dari program yang berkelanjutan dalam pengembangan batubara di wilayah PKP2B PT Lahai Coal selain dari Blok Haju Konstruksi. Sehingga diharapkan dari program ini perusahaan akan mendapatkan informasi yang jelas mengenai keadaan batubara pada blok ini selain seperti Bara dan Usai. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan pemboran, pemetaan biologi, survey topografi dan geofisika logging dilakukan pada seluruh lubang bor.

Rencana penambangan di wilayah pengembangan tambang Haju direncanakan akan dilaksanakan pada akhir tahun 2009 selama kurang lebih lima tahun operasi. Kegiatan mulai dengan aktivitas pembersihan areal tambang, pengambilan tanah pucuk top soil dan subsoil, penggalian material tanah penutup dan penambangan batubara.

Penambangan dimulai dari Pit Siang, lalu ke Pit Danum, Pit Lahung, Pit Beriwit Selatan, PT Beriwit Tengah dan berakhir di Pit Beriwit Utara.

Metode pemindahan tanah penutup yang akan dilakukan di area pengembangan tambang Haju adalah dengan menggunakan alat gali excavator dan alat angkut truk. Material tanah penutup akan digali menggunakan excavator dengan kapasitas 260 ton dan diangkut menggunakan truk dengan kapasitas 100 ton. Material tanah penutup ini pada awal pembukaan tambang akan ditumpuk di luar tambang sampai lokasi penumpukan di dalam tambang siap untuk digunakan.

Batubara yang terpapar akan dibersihkan dengan menggunakan excavator dengan ukuran kecil kapasitas 30 ton yang didesain khusus untuk membersihkan batubara (mangkuk rata). Kegiatan pembersihan permukaan batubara ini bertujuan untuk meminimalkan terikutnya material non batubara yang masih menempel pada permukaan batubara sehingga kualitas batubara bisa dikontrol. Sedangkan batubara bersih akan dimuat dengan menggunakan excavator dengan kapasitas 100 ton dan diangkut dengan menggunakan truk dengan kapasitas 30 ton yang selanjutnya akan ditumpuk di lokasi penumpukan batubara (ROM) sebelum dibawa ke pelabuhan.

Selama tahap konstruksi dan operasi diperkirakan akan membutuhkan lebih dari 500 orang karyawan. Staf dan non staf ini mencakup para profesional dan spesialis, ekspatriat, profesional, spesialis teknis, tenaga terampil dan penyelia dari berbagai kota di Indonesia, serta tenaga kerja semi terampil dan tidak terampil dari masyarakat setempat.

Dalam rangka pengelolaan lingkungan PT LC telah mengikuti Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) untuk kegiatan penambangan batubara di Blok Haju-PT Lahai Coal selama periode persiapan, operasi penambangan dan pasca penambangan sesuai dengan RKL/RPL yang telah disetujui oleh komisi AMDAL provinsi.

Dalam hal pengelolaan lingkungan, berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran tahap konstruksi PT LC tahun 2009, pengelolaan lingkungan perusahaan ini dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan teknis, dengan menggunakan praktek pengelolaan lingkungan terbaik di dunia dalam industri pertambangan.
2. Pendekatan sosial-Ekonomi-Budaya, dengan memaksimalkan keterlibatan masyarakat.
3. Pendekatan institusi, melalui koordinasi dengan pemerintah, universitas, LSM dan institusi lainnya dalam pengelolaan lingkungan.

Rencana pengelolaan lingkungan (RKL) yang akan dilakukan berupa: Pengelolaan pembersihan lahan dan tanah pucuk, Pengelolaan penempatan batuan penutup (overburden), Pengelolaan air asam tambang, Pengendalian erosi dan pembuatan drainase, Rehabilitasi lahan terganggu, Pengelolaan limbah, Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3), Pengelolaan keanekaragaman hayati (biodiversity), Pengembangan masyarakat.

Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) meliputi pemantauan komponen sebagai berikut: iklim, kualitas udara, kebisingan dan emisi, kualitas air permukaan dan air tanah, kualitas tanah, flora dan fauna (daratan dan perairan), rehabilitasi dan penanganan limbah, komponen sosial-ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat.

Sementara untuk bidang investasi, kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan ini dalam rencana pelaksanaan tambang Haju yaitu terdiri komponen seperti di bawah ini:

Modal tetap yaitu modal yang terdiri atas total seluruh biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan PT Lahai Coal dimana sampai akhir tahun fiskal 2008 tercatat sebesar \$55.6 juta termasuk di dalamnya komponen biaya untuk konstruksi sekitar \$28.8 juta dari total biaya konstruksi sekitar \$85 juta.

Modal kerja operasi penambangan batubara yaitu biaya yang diperlukan untuk operasional tambang yaitu berupa biaya mobilisasi, biaya pendukung, biaya penggaruan dan penggalian batuan penutup, biaya pemuatan dan

pengangkutan batuan penutup, biaya penambangan sampai pengangkutan batubara ke ROM, pengangkutan batubara dari ROM ke stockpile, biaya sampai pemeliharaan jalan angkut batubara, perulangan biaya tidak langsung, biaya tak terduga yang terdiri atas tambahan biaya pengiriman bahan bakar selama musim kemarau dan demobilisasi peralatan sehingga dibutuhkan modal kerja selama 5 tahun sebesar \$157.4 juta.

Modal kerja operasi pengolahan dan pengapalan batubara dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya langsung yang timbul dengan adanya kegiatan *cushing* di *port site*, sampling dan analisis batubara, biaya pengiriman batubara menggunakan tongkang ke tempat pengapalan, biaya sewa *floating crane* dan lain-lainnya. Biaya-biaya tersebut sangat berfluktuasi yang dipengaruhi oleh harga bahan bakar yang digunakan. Sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya-biaya penunjang operasional seperti kantor, camp, administrasi, biaya logistik, dan lainnya. Dan perhitungan yang didasarkan pada harga bahan bakar, maka diperkirakan modal kerja selama 5 tahun adalah \$187 juta.

II.4. Keberadaan Masyarakat Lokal di Wilayah Penambangan PT.LC.

Kecamatan Laung Tahup, Kabupaten Murung Raya adalah wilayah dimana PT LC dibangun dan menjadi pusat operasi dari perusahaan ini. Jumlah penduduk yang terdapat di wilayah Kecamatan Laung Tuhup adalah 21.816 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 4.836 KK dan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 4,11 jiwa/km² dengan sex ratio sebesar 111, sebagaimana dirunjukkan Tabel 2.2 di bawah:

Tabel 2.2. Komposisi Penduduk menurut Jenis Kelamin, Rumah Tangga, Kepadatan, dan Sex Ratio di Kecamatan Laung Tuhup

Uraian	Jumlah
Kepadatan (jiwa/km ²)	4,11
Rumah Tangga (KK)	4.836
Laki-Laki (jiwa)	11.496
Perempuan (jiwa)	10.320
Jumlah laki-laki dan Perempuan (jiwa)	21.816
Sex Ratio	111

Sumber : Kabupaten Murung Raya Dalam Angka, 2008

Jumlah penduduk tersebut tersebar ke dalam 35 desa dan bagian terbanyak penduduknya adalah Desa Muara Laung. Hal ini dapat terlihat pada tabel 2.3 di bawah:

Tabel 2.3. Data Kepadatan Kependudukan Di Sepuluh Desa Sekitar Pertambangan Batubara PT. Lahai Coal

No.	Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas (ha)	Kepadatan
1	Penda Siron	345	13.000	0,03
2	Tawai Haui	240	3.100	0,08
3	Maruwei I	493	2.000	0,25
4	Maruwei II	900	1.150	0,78
5	Muara Tuhup	2.900	20.300	0,14
6	Kohong	346	13.000	0,03
7	Batu Tojah	160	1.000	0,16
8	Tumbang Bauh	498	5.010	0,10
9	Dirung Salarung	150	500	0,30
10	Muara Laung I	4.265	308.000	0,01
	Jumlah	10.297	367.060	0,03

Sumber : Kabupaten Murung Raya Dalam Angka, 2008

Dari Tabel 2.3 di atas diketahui bahwa untuk jumlah penduduk, desa dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Desa Muara Laung I, dengan jumlah penduduk sebanyak 4.265 jiwa, sedangkan desa dengan jumlah paling sedikit adalah Desa Dirung Salarung, dengan jumlah penduduk sebanyak 150 jiwa. Untuk luas wilayah, kawasan terluas berada di Desa Muara Laung I, dengan luas wilayah 308.000 ha, sedangkan daerah dengan luas daerah terkecil adalah Desa Dirung Salarung, seluas 500 ha. Sedangkan wilayah yang memiliki tingkat kepadatan tertinggi berada di Desa Maruwei II dengan tingkat kepadatan sebesar 0.78, sedangkan desa dengan tingkat kepadatan terendah adalah Desa Muara Laung I sebesar 0.01.

Untuk kondisi sosial ekonomi, secara umum mata pencaharian utama penduduk disekitar lokasi penambangan di wilayah Kecamatan Laung Tuhup adalah sektor pertanian dan perkebunan, dan sebagian lagi sebagai pedagang, Pegawai Negeri dan sebagai karyawan perusahaan swasta yang terdapat di wilayah tersebut. Persentase jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian sebagai petani dan perkebunan adalah sekitar 85 %, sedangkan sisanya adalah pedagang, pegawai dan lain-lain.

Di sektor pendidikan, masyarakat Kecamatan Laung Tuhup yang melanjutkan pendidikannya tingkat SD sebesar 10 %, SLTP sebesar 82 %, SLTA sebesar 25 % dan yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi hanya sebesar 8 %. Secara umum, fasilitas pendidikan di lokasi studi dapat dikatakan belum memadai. Keadaan sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Laung Tuhup dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Sarana Pendidikan di Wilayah Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya

Jenjang Pendidikan	Jumlah (Unit)
Taman Kana-Kanak (TK)	6
Sekolah Dasar (SD)	44
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	3
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	1
Perguruan Tinggi	0
Jumlah	54

Sumber : Murung Raya Dalam Angka 2008

Rendahnya tingkat pendidikan di kecamatan ini terutama disebabkan keikutsertaan anak membantu mencari nafkah, misalnya berladang, berburu, atau mencari ikan. Di samping itu persepsi masyarakat terhadap pendidikan masih sederhana.

Untuk kondisi sosial keagamaan, berdasarkan data dari Murung Raya dalam Angka 2008, pada umumnya pemeluk agama di Kecamatan Laung Tuhup cukup heterogen. Masyarakat yang memeluk agama Islam berjumlah 13.421 jiwa, Kristen Protestan berjumlah 2.179, Kristen Katolik 945 jiwa, Hindu 3.339 jiwa, Budha 7 jiwa dan lainnya sebanyak 99 jiwa. Di Muara Laung dan Muara Tuhup, aktivitas keagamaan masing-masing pemeluk agama seperti tersebut di atas cukup lancar karena ditunjang dengan kelengkapan sarana peribadatan. Sedangkan daerah yang berada jauh di bagian hulu Sungai Laung (ke arah daratan) masih sangat banyak desa yang belum memiliki sarana peribadatan.⁶² Berdasarkan pengamatan lapangan tampak bahwa kehidupan keagamaan dalam tatanan sosial kemasyarakatan sebagai suatu komunitas masyarakat kelihatan cukup rukun.

Mengenai keadaan fasilitas sarana tempat peribadatan yang ada di Kecamatan Laung Tuhup dilihat pada Tabel 2.5.

⁶² Murung Raya dalam Angka, 2008

Tabel 2.5. Sarana Tempat Ibadah di Wilayah Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya

Sarana Ibadah	Jumlah (Unit)
Masjid/Langgar	15
Gereja	3
Pura	1
Balai Basarah	-
Lain-lain	-
Jumlah	19

Sumber : Murung Raya Dalam Angka 2008

Dari Tabel 2.5 di atas diketahui bahwa sebagian besar tempat ibadah yang berada di daerah ini adalah Masjid, yaitu sebanyak 15 buah. Hal ini disebabkan karena memang sebagian besar penduduk daerah ini beragama Islam, yaitu sebanyak 13.421 jiwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

BAB III
COMMUNITY DEVELOPMENT (COMDEV) PT. LAHAI COAL
“BELUM AMBIL SUDAH ANDIL”

III.1 Belum Ambil sudah Andil

Meski telah melewati tahap eksplorasi dan masih dalam proses konstruksi, dimana perusahaan menargetkan mulai memproduksi pada November 2009⁶³, perusahaan ini telah memberi andil bagi masyarakat di lingkaran tambang. Dengan menanamkan komitmennya untuk berpihak pada masyarakat sekitar lokasi tambang, dapat dilihat bahwa PT LC berupaya keras agar masyarakat lokal dan perekonomian daerah mendapat manfaat yang berkelanjutan atas keberadaan perusahaan tersebut melalui investasi dalam pembangunan sosial ekonomi, pendidikan, infrastruktur dasar dan program kesehatan serta kebersihan.⁶⁴

Hal ini terlihat dalam program pengembangan masyarakat/*community development (Comdev)* yang telah dilakukan semenjak awal kegiatan eksplorasi, melalui program pengembangan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, air dan sanitasi, kesempatan kerja serta usaha bagi penduduk lokal. Dalam pelaksanaannya, PT.LC memiliki komitmen yang tinggi untuk bekerjasama dengan masyarakat sekitar wilayah pertambangannya, termasuk dengan pemerintah daerah, LSM dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya dalam rangka mendapatkan izin beroperasi sekaligus menjamin kegiatan PT LC.

Adanya komitmen yang kuat PT LC dalam rangka pengembangan masyarakat sebenarnya tak terlepas dari visi BHP Billiton sebagai perusahaan induknya. Visi BHP Billiton untuk pembangunan berkelanjutan adalah ingin menjadi sebuah perusahaan pilihan, yang menciptakan nilai berkesinambungan

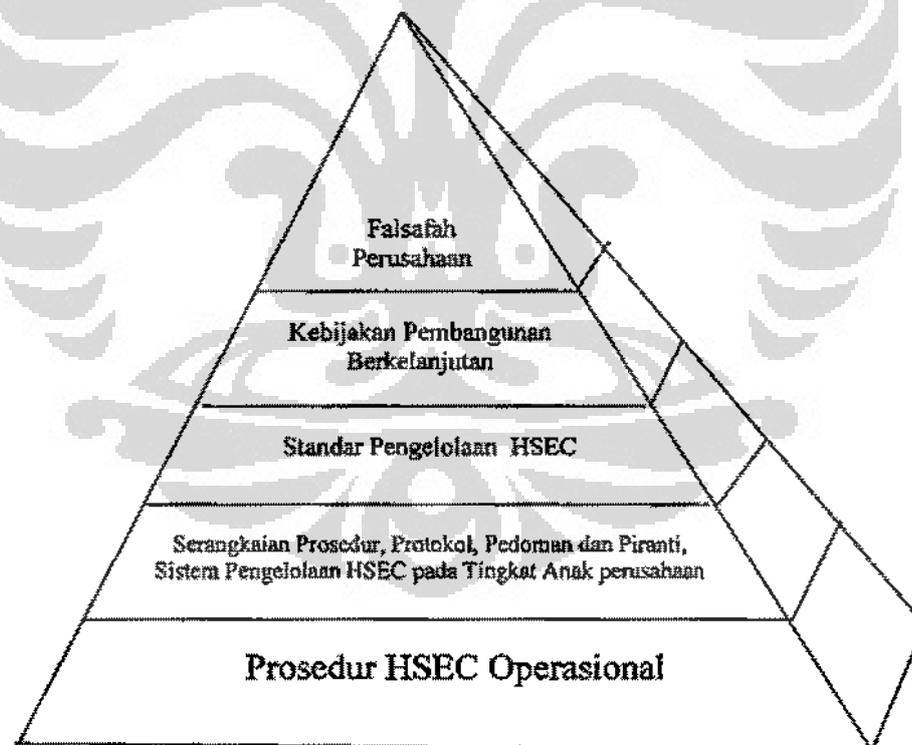
⁶³ Diakses pada <http://www.apbi-icma.com/news.php?pid=6133&act=detail>

⁶⁴ Diakses pada http://www.majalah tambang.com/detail_berita.php?category=18&newsnr=1975, % Maret 2009

bagi pemegang saham, karyawan, kontraktor, pemasok, pelanggan, mitra bisnis dan juga masyarakat. Titik perhatian dari visi tersebut ialah dengan dicanangkannya “Nihil Kerugian” (*Zero Harm*) kepada orang-orang, masyarakat tuan rumah dan lingkungan. Dalam hal ini BHP Billiton mengartikan Nihil Kerugian sebagai tekad untuk menciptakan sebuah tempat bekerja yang bebas dari kecelakaan, penyakit dan insiden. Perusahaan akan terus berupaya untuk mengadopsi sebuah pendekatan pencegahan dan meminimalisir serta jika memungkinkan menghilangkan dampak lingkungan⁶⁵.

Untuk memastikan itu semua, BHP Billiton menjalankan bisnis berdasarkan sebuah hierarki sistem, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.1 : Piramida Hierarki Sistem BHP Billiton



Sumber: Majalah Sangkarali, Volume IV Triwulan 2, 07/08

⁶⁵ Majalah Sankarali, Volume IV Triwulan 2, 07/08.

Pada puncak piramida terdapat Falsafah Perusahaan, di tingkat berikutnya adalah Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan, kemudian Standar Pengelolaan HSEC (*Health, Safety, Environment, Community*), Serangkaian Prosedur, Protokol, Pedoman dan Piranti, Sistem Pengelolaan HSEC pada Tingkat Anak Perusahaan dan paling bawah adalah Prosedur HSEC Operasional.

Falsafah Perusahaan BHP Billiton adalah “sebuah perusahaan sumber daya terkemuka di dunia bertujuan untuk menciptakan nilai jangka panjang melalui penemuan, pengembangan dan pengolahan sumber daya alam, serta memberikan solusi inovatif yang berorientasi pada pelanggan dan pasar.” Agar berhasil dan mencapai pertumbuhan yang nyata, maka perusahaan berkomitmen: Dengan giat mengelola dan mengembangkan portofolio yang terdiri dari aset dan jaya bermutu; Melanjutkan upaya menuju organisasi berkinerja tinggi, dimana setiap individu menerima tanggung jawab dan dihargai sesuai hasil yang dicapainya; Mendapatkan kepercayaan dari karyawan, pelanggan, pemasok, masyarakat dan pemegang saham melalui sikap jujur dalam berkomunikasi dan senantiasa konsisten dalam memenuhi komitmen.

Selain itu perusahaan juga senantiasa menjunjung tinggi:

- *Keselamatan kerja dan lingkungan.* Komitmen yang sangat tinggi pada keselamatan kerja, tanggung jawab lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
- *Integritas.* Termasuk berbuat sesuai dengan apa yang dikatakan.
- *Unjuk kerja yang tinggi.* Ketertarikan dan kepuasan atas keberhasilan mencapai usaha yang luar biasa dan meningkatkan kemampuan pribadi;
- *Hubungan yang saling menguntungkan.* Menjalin hubungan yang menitikberatkan pada terciptanya manfaat bagi semua pihak;
- *Keberanian mempelopori perubahan.* Memikul tanggung jawab untuk mengilhami dan menghasilkan perubahan yang positif dalam menghadapi kesulitan;

- *Saling menghargai satu sama lain.* Menerima perbedaan, diperkaya dengan keterbukaan, saling berbagi, kepercayaan, kerjasama tim dan keterlibatan.⁶⁶

Semua itu akan dianggap berhasil menciptakan manfaat jika para pemegang saham mendapatkan keuntungan yang tinggi dan modal yang mereka tanam, para pelanggan dan pemasok diuntungkan dalam menjalin usaha, masyarakat di lokasi operasi perusahaan menghargai keberadaan segenap karyawan sebagai warga mereka, dan karyawan dapat menjalankan kerjanya dengan senang hati, penuh totalitas serta merasakan kepuasan dalam bekerja.⁶⁷

Melalui sejumlah prinsip tersebut maka upaya *Community Development (comdev)* perusahaan kemudian dijabarkan melalui berbagai program dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan dan ketenagakerjaan.

Program *comdev* PT. LC adalah program yang berorientasi pada perbaikan kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah pertambangan yang dijalankan langsung oleh PT.LC dengan besaran yang ditentukan sendiri oleh Perusahaan.⁶⁸ Besaran anggaran yang disediakan untuk divisi hubungan dan pengembangan masyarakat dan tiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 misalnya, anggaran yang disiapkan mencapai Rp 4.2 miliar dan meningkat menjadi Rp 4.7 miliar pada tahun 2008. Peningkatan anggaran ini antara lain disebabkan karena semakin besarnya tingkat kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi. Sebagai sebuah gambaran akan anggaran yang disiapkan PT LC dapat dilihat pada rincian anggaran untuk hubungan dan pengembangan masyarakat 2008 di tabel di bawah ini:

⁶⁶ Majalah Sankarafi, Volume IV Triwulan 1, 07/08.

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ Hasil *depth-interview* dengan Bapak Priya Husada, Koordinator Hubungan Media dan komunikasi PT.LC, Kamis 7 Mei 2009, jam 16.15.

Tabel 3.1. Anggaran Hubungan dan Pengembangan Masyarakat untuk tahun 2008

Program	Biaya
Program Hubungan Masyarakat	
Media komunikasi	29,440,000
Forum Hapakat	478,400,000
Diskusi Kelompok Desa	96,140,000
Upacara Tradisional	29,440,000
Bantuan dan Sponsor	84,640,000
Survey Warisan Budaya	41,400,000
Pembuatan Buku Jipen	34,040,000
Kejadian Luar Biasa	110,400,000
Program Pengembangan Masyarakat	
Peningkatan kapasitas masyarakat	1,608,213,600
Program kesehatan	365,458,640
Program pendidikan	1,095,866,650
Infrastruktur	798,100,000
Total	4,771,538,890

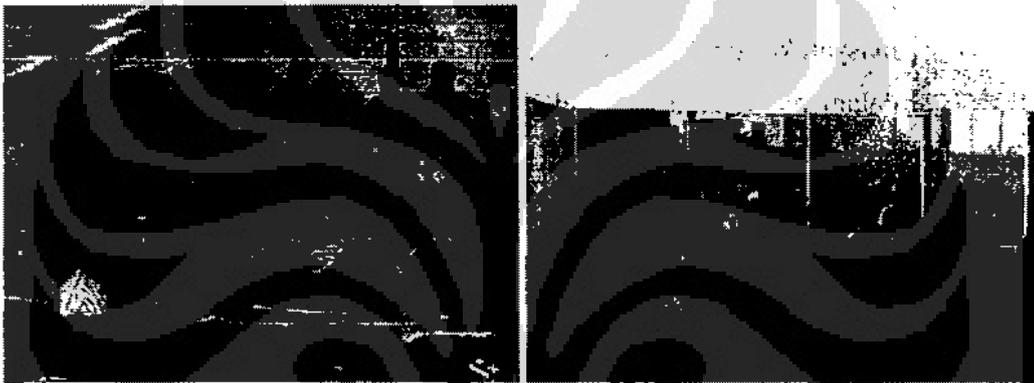
Sumber: Laporan Kegiatan PT Lahai Coal, 2008

Dalam merumuskan program *comdev* yang akan dilaksanakan, tidaklah diputuskan begitu saja oleh perusahaan, tapi dibicarakan secara terbuka dengan berbagai *stakeholder* yaitu pemerintah daerah, masyarakat luas, LSM/Ormas, pihak perusahaan dan berbagai *stakeholder* terkait lainnya. Proses penjarangan aspirasi dan penyusunan program yang dilakukan secara partisipatif ini dilakukan melalui sebuah forum yang dinamakan “Hapakat”⁶⁹ (Hubungan

⁶⁹ Secara harfiah “Hapakat” berasal dari bahasa Dayak Murung, Siang, Uut Danum dan Bakumpai yang berarti “kesepakatan”, selayaknya hubungan persaudaraan. Butir-butir yang nantinya disepakati baik oleh masyarakat dan perusahaan akan menjadi semacam kontrak sosial yang mengikat semua pihak. Memang seringkali harapan masyarakat sedemikian tinggi demi peningkatan mutu hidup mereka dikarenakan kehadiran perusahaan di tengah-tengah mereka, kehadiran BHP Billiton di tengah-tengah masyarakat tidak untuk menggantikan peran pemerintah dan juga masyarakat dalam

Antara Perusahaan dan Masyarakat), yang dilaksanakan secara rutin setiap tiga bulan sekali sejak tahun 2007. Berbagai hal yang dibicarakan dalam Hapakat ini, antara lain: informasi kemajuan kegiatan perusahaan, isu-isu mengenai kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan (K3L), isu-isu ketenagakerjaan dan peluang pengembangan usaha, isu-isu kehutanan, lahan, keamanan dan isu-isu kemasyarakatan lainnya.⁷⁰

Gambar 3.2 : Pertemuan “Hapakat” yang diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat untuk membicarakan berbagai hal terkait dengan hubungan antara perusahaan dan masyarakat



Sumber: Humas PT LC, 2008

Dalam operasionalnya, forum Hapakat ini dibagi menjadi III group: Group I; Desa Muara Tuhup – desa sekitar pelabuhan Muara Tuhup. Group II: Desa-desanya Tumbang Baloi, Batu Tojah, Tumbang Bauh, Tumbang Masalo, Liang Nyaling, Hingang Tukong dan Kohong—desa-desanya sekitar rencana Tambang yang menghubungkan lokasi Tambang Haju dan Pelabuhan Muara Tuhup.

membangun desa dan memenuhi kesejahteraan masyarakat. Forum Hapakat menjadi salah satu sarana bagi perusahaan dalam membicarakan segala aspek industri pertambangan bersama dengan masyarakat. Aspek-aspek yang mesti dikomunikasikan ada lima, yaitu: keselamatan, hubungan eksternal, rekayasa (disain) dan konstruksi, hubungan dan pengembangan masyarakat serta sumber daya manusia.

⁷⁰ Hasil *depth-interview* dengan Bapak Priya Husada, Koordinator Hubungan Media dan komunikasi PT.LC, Kamis 7 Mei 2009.

Sedangkan Desa-deso Murawai I, Murawai II, Hawaii Haui dan Pendan Siron—desa-deso sekitar rencana alokasi penambangan—masuk ke dalam group III.

Butir-butir yang nantinya disepakati dalam forum pertemuan ini, baik oleh masyarakat dan perusahaan akan menjadi semacam kontrak sosial yang mengikat semua pihak. Bagi perusahaan masukan dari para pihak kemudian akan diterjemahkan menjadi program *comdev* apa saja yang akan diberikan oleh perusahaan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Memang seringkali harapan masyarakat sedemikian tinggi terhadap perusahaan demi peningkatan mutu hidup mereka dikarenakan kehadiran perusahaan di tengah mereka. Namun kehadiran PT.LC di tengah-tengah masyarakat tidak untuk menggantikan peran pemerintah dan peran masyarakat dalam membangun desa dan memenuhi kesejahteraan mereka. Visi dan misi program *comdev* PT. LC lebih diarahkan pada pemberdayaan, konsultasi, kemitraan, keikutsertaan dan kebersinambungan.

Program *comdev* menurut konsep PT.LC ini lahir sebagai suatu tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar yang menurut konsep PT.LC berada di bawah Departemen *Community Relation & Development & Land Accusition*.⁷¹ Selain itu PT.LC mengembangkan program *comdev* dengan bertujuan untuk meningkatkan sumber daya masyarakat sekitar sehingga dalam proses kesinambungan, masyarakat mampu memahami bahwa kemajuan dan kesejahteraan yang dicapainya lahir dari mereka sendiri dan PT. LC hanya sebagai pendukung respons masyarakat. Dalam persepsi yang penting, PT.LC berusaha menjadi mitra dan tetangga yang baik dengan masyarakat sekitar proyek dengan membantu membiayai, mendorong dan memberikan transparansi tentang perkembangan proyek dan apa yang hendak dilaksanakannya. Selain itu program *comdev* ini diperkirakan akan melatih, membiasakan dan memampukan masyarakat menghadapi perkembangan proyek dengan pengaruhnya ke depan.

⁷¹ Ibid

III.2. Pelaksanaan Program *Community Development* (Comdev) PT.LC

Pelaksanaan program *comdev* sebagai tanggung jawab PT.LC, dijalankan sendiri oleh perusahaan pada tingkat masyarakat, namun tingkat konsultasi dan kordinasinya tetap melalui pemerintah. Beberapa program *comdev* yang menjadi kebijakan dan tanggungjawab PT.LC dalam konsepnya yang telah berjalan adalah di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan peningkatan kapasitas masyarakat.

III.2.1. Bidang Pendidikan

Pendidikan adalah bagian terpenting untuk terus dikembangkan tahun demi tahun, terutama di Kabupaten Murung Raya. Dilihat dari kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang memadai, Kabupaten Murung Raya belum mendapatkan porsi yang proporsional. Sebagai contoh di Kabupaten Murung Raya masih bisa dikatakan masih terbelakang bila dibandingkan dengan kabupaten yang lainnya. Sarana penunjang sekolah dan tenaga pengajar masih merupakan persoalan utama bagi pengembangan kualitas sumber daya manusia di kabupaten ini.

Survei rona awal yang dilakukan oleh PT.LC pada Tahun 2006 lalu menunjukkan bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor terbesar penyebab kebodohan dan kemiskinan di Kabupaten Murung Raya. Oleh karena itu pada Tahun 2007-2008 PT.LC bekerjasama dengan Sampoerna Foundation (SF) sebuah yayasan filantropis terkemuka di Indonesia yang bergerak di dalam bidang pendidikan untuk mengembangkan suatu program peningkatan kapasitas untuk tenaga pendidik di wilayah tersebut.

PT.LC dan SF bekerjasama selanjutnya mengembangkan program peningkatan kapasitas untuk guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah. Program ini sejalan dengan program pemerintah yaitu MURA Cerdas 2013, yang menargetkan pada tahun 2013 Kabupaten Murung Raya sudah bebas dari kebodohan dan kemiskinan. Sejauh ini sudah 38 tenaga pendidik lokal (guru,

kepala sekolah & pengawas) yang mendapatkan kesempatan belajar seta meningkatkan kapasitasnya.⁷²

Di Kecamatan Laung Tuhup, yang merupakan wilayah operasional PT.LC, masyarakat usia sekolah SLTP hingga perguruan tinggi (14 – 24 tahun) berjumlah 21.816 jiwa, diketahui yang melanjutkan pendidikannya pada tingkat SD sebesar 10%, SLTP sebesar 90%, SLTA sebesar 20% dan yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi sebesar 3%.⁷³ Melalui data ini dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Laung Tuhup masih rendah. Rendahnya tingkat pendidikan ini terutama disebabkan keikutsertaan anak membantu mencari nafkah, misalnya berladang, berburu, atau mencari ikan. Di samping itu fasilitas pendidikan di lokasi studi dapat dikatakan belum memadai dan persepsi masyarakat terhadap pendidikan masih sederhana. Melihat hal tersebut, pengembangan program *comdev* bidang pendidikan di wilayah sekitar tambang PT. LC, umumnya berupa pemberian beasiswa dan pelatihan peningkatan mutu guru.

Beasiswa diberikan kepada siswa yang berprestasi dan untuk mencegah putus sekolah bagi anak dari keluarga tidak mampu namun memiliki prestasi belajar. Dua tujuan umum dari penyediaan beasiswa kepada para pelajar di sekitar lokasi perusahaan. *Pertama*, membantu mengurangi jumlah siswa yang tidak menyelesaikan pendidikan formal (*drop out*) lantaran kesulitan dana. *Kedua* merangsang para siswa siswi asal kabupaten Mura untuk lebih berprestasi dalam belajar sehingga berhak untuk mendapatkan beasiswa dari perusahaan.

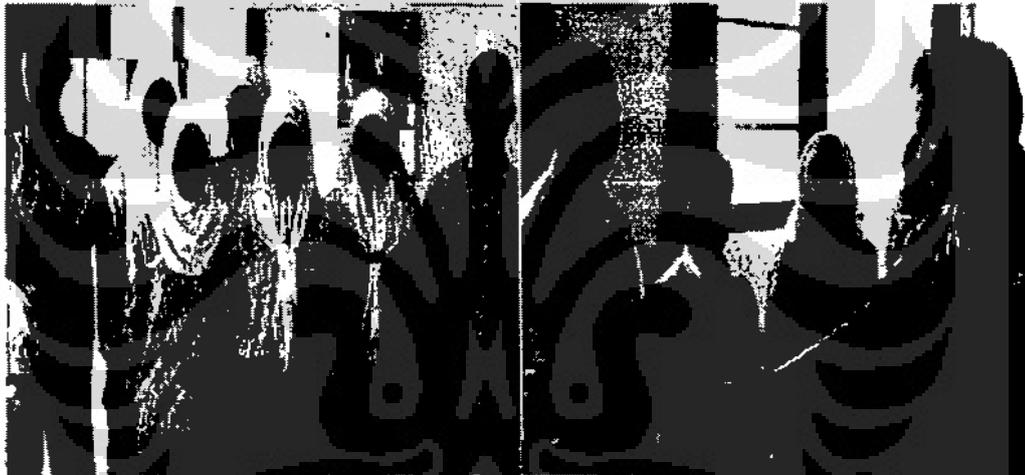
Program beasiswa ini sudah berlangsung sejak tahun 2005 dan saat ini jumlah siswa yang mendapat beasiswa sebanyak 548 dari tingkat Sekolah Dasar (sejak tahun 2007 khusus untuk tingkat SD tidak diberikan lagi karena pertimbangan adanya dana BOS dari pemerintah), Sekolah Menengah Pertama

⁷² Bob Eko Kurniawan, *Dukung Mura Cerdas 2013*, Majalah Sangkarali Vol.V Triwulan 3 08/09, hal 17.

⁷³ BPS Kab. Murung Raya, *Murung Raya dalam angka*, 2008.

dan Sekolah Menengah Atas hingga Perguruan Tinggi,⁷⁴ dengan investasi sebesar Rp. 792.400.000. Misalnya saja untuk tahun 2008-2009 perusahaan memberikan beasiswa kepada siswa SMP sebanyak 38 siswa yang masing masing mendapatkan Rp 125 ribu perbulan, selain itu sebanyak 33 siswa SMU masing masing mendapatkan Rp 250 ribu perbulan dan sebanyak 16 mahasiswi dengan nilai Rp 300 ribu perbulan untuk satu orang. Untuk tahun 2008 total siswa yang menerima 87 orang dengan total dana Rp. 301.200.000,⁷⁵

Gambar 3.3: Pemberian beasiswa oleh PT LC kepada sejumlah siswa yang berprestasi dan kurang mampu



Sumber: Humas PT LC, 2007

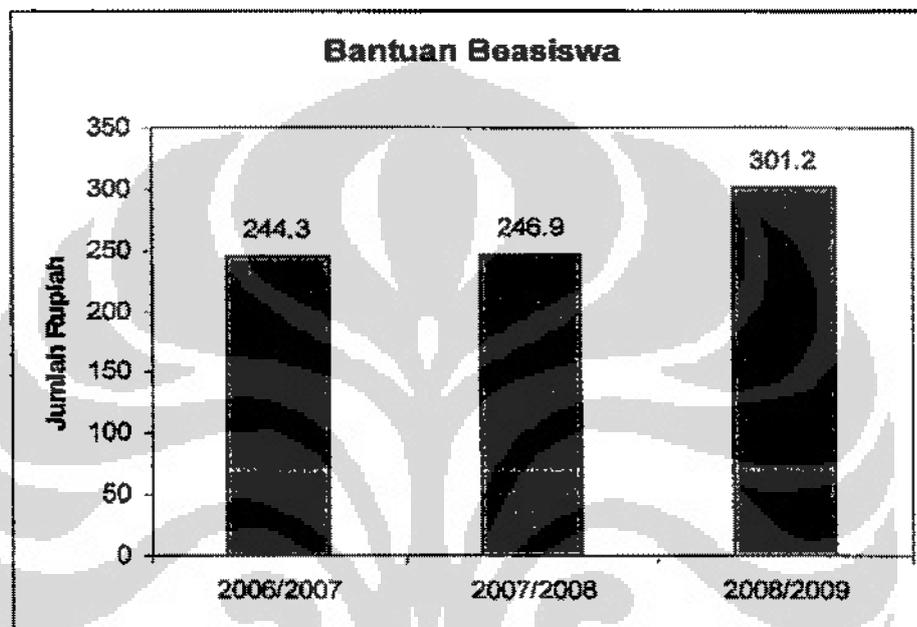
Program beasiswa disosialisasikan ke 10 desa/kelurahan yang berada di wilayah kerja PT.LC. Beasiswa diberikan kepada siswa SMP, SMU dan perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan dan mendapatkan rekomendasi dari Panitia beasiswa tingkat desa yang anggotanya terdiri dari kepala desa, Kepala Sekolah dan wakil BPD. Hal ini dilakukan untuk menjamin asas

⁷⁴ Hasil *depth-interview* dengan Bapak Untung Subagyo, Lurah Muara Tuhup, Rabu 22 April 2009, jam 13.05.

⁷⁵ PT. LC, *RKAB Perbaikan Tahap Konstruksi*, 2009

keadilan dan keterbukaan antara perusahaan dan masyarakat. Setiap desa bisa mengusulkan 2 siswa SMP, 2 siswa SMU dan 1 orang perguruan tinggi.

Gambar 3.4. Bantuan Beasiswa Bidang Pendidikan



Sumber : RKAB Perbaikan Tahap konstruksi, 2009

Melihat gambar diatas dapat dilihat bahwa dana yang diberikan oleh perusahaan untuk pelaksanaan *comdev* di bidang pendidikan ini semakin tahun semakin meningkat.

Dampak langsung yang dirasakan oleh pemberian beasiswa ini adalah selain dapat mengurangi tingkat putus sekolah, juga merangsang prestasi para murid/siswa. Salah satu siswa yang merasa sangat terbantu dengan adanya beasiswa ini adalah Rumiyani, siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Muara Laung.

"Saya adalah anak seorang petani karet dengan penghasilan yang hanya cukup untuk hidup sehari-hari. Karena ibu meninggal sejak masih Kelas V SD, maka selama itu sekolah saya ditanggung oleh Bibi hingga sampai SMA. Memasuki SMA biaya pendidikan lebih tinggi sehingga bibi kesulitan untuk membiayai, karena sekolah berada di daerah lain dan harus tinggal di tempat kos. Tapi bibi memaksa agar saya tetap melanjutkan pendidikan, meskipun biaya makan untuk sehari-hari sebenarnya tidak cukup. Untunglah pas masuk SMA saya mendapat beasiswa dari perusahaan sebanyak 125 ribu perbulan. Itu untuk biaya kos dan belanja. Selain itu kita juga ditanggung biaya SPP dan beli buku bacaan. Ada beberapa teman saya juga dapat beasiswa itu, yang umumnya dari keluarga petani seperti saya. Boleh dikata kita sangat bersyukur dengan beasiswa itu."⁷⁶

Kendala yang dihadapi dalam program pemberian beasiswa ini antara lain karena keterjangkauan pemberian beasiswa yang masih terbatas, selain karena memang ada pembatasan untuk setiap tahunnya, menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia, juga karena masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui prosedur untuk mendapatkan beasiswa. Ada anggapan adanya salah sasaran dalam pemberian beasiswa dalam arti uang digunakan untuk keperluan lain sehingga diusulkan beasiswa diberikan kepada para guru yang akan mengelolanya untuk pendidikan.

Sejumlah program lainnya di bidang pendidikan yang telah dilakukan PT LC antara lain: pada Maret 2007, PT Lahai Coal membantu pembuatan perencanaan penyediaan buku-buku pelajaran dan buku bacaan umum bagi sejumlah SD, SLTP dan SLTA di 11 desa tersebut. Untuk tahap awal, (Tahap I), bantuan buku berupa paket-paket pelajaran diberikan kepada SDN 01 Muara Tuhup dan SDN 01 Tumbang Olong. Kemudian pada Juli 2007, dilakukan penyerahan buku-buku versi cerita anak-anak dan buku pendidikan untuk tingkat Sekolah Dasar. Selain itu pada Januari – Juni 2007, diadakan program bantuan pembuatan buku induk peraturan denda adat Suku Dayak Siang dan Murung terus dilakukan. Program ini termasuk rencana mengadakan lokakarya yang akan melibatkan semua Kepala Adat dan Demang se Kabupaten Murung

⁷⁶ Wawancara, dengan Rumini pada Sabtu 25, April 2009.

Raya. Pada Juli – Desember 2007 diadakan program bantuan pembuatan buku induk peraturan denda adat Suku Dayak Siang dan Murung terus dilakukan. Pertemuan-pertemuan yang melibatkan semua Kepala Adat dan Demang se Kabupaten Murung Raya telah dilakukan selama semester II Tahun 2007. Program ini terus dilanjutkan pada tahun berikutnya (2008) untuk menjaga kesinambungan program.

Dampak dari pemberian bantuan ini adalah tersedianya bahan bacaan yang mencukupi bagi para siswa, yang mampu meningkatkan minat baca para siswa. Kendala yang dihadapi antara lain adalah akses antar daerah yang masih sangat sulit, sehingga tidak semua sekolah mendapat bantuan ini, meski tetap akan diberikan pada masa penganggaran selanjutnya.

Beberapa kegiatan program pendidikan yang dijalankan oleh PT LC dengan dukungan pemerintah daerah Kabupaten Murung Raya juga berjalan dengan baik. Fasilitas-fasilitas penunjang perbaikan pendidikan telah disumbangkan kepada masyarakat. Gedung sekolah, beberapa asrama, guru-guru bantu dan pendamping pendidikan untuk menata manajemen sekolah adalah hasil kerjasama pemerintah dan PT Lahai Coal sebagai pendukung pendidikan.

Sebagai dampak dari program ini, menurut kepala Sekolah SMP 4 Laung Tuhup, Jaya Aksi⁷⁷, telah mendukung pendidikan di Kabupaten Murung Raya, khususnya dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di daerah itu. Hal positif yang paling dirasakan adalah dukungan bantuan fisik, seperti genset dan komputer yang membantu efektifitas pelaksanaan tugas mereka di sekolah. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Pembangunan SMU Tuhup, Edi Parsudi⁷⁸, yang merasakan betul manfaat keberadaan bantuan *comdev* PT Lahai Coal di bidang pendidikan. Salah satunya adalah terkait dengan pengadaan dan perbaikan infrastruktur di sejumlah sekolah di Laung Tuhup yang akan sulit terlaksana jika hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah. SMU Tuhup

⁷⁷ Wawancara dengan kepala Sekolah SMP 4 Laung Tuhup, Jaya Aksi pada Senin, 27 April 2009.

⁷⁸ Wawancara dengan Ketua Pembangunan SMU Tuhup, Edi Parsudi, Selasa 28 April 2009.

sendiri memperoleh bantuan untuk pembangunan sekolah dan perbaikan berbagai sarana sekolah yang sudah rusak. Adanya kondisi sekolah yang lebih kondusif menurutnya dapat merangsang masyarakat untuk menyekolahkan anaknya, apalagi dengan adanya dukungan beasiswa dari pihak PT Lahai Coal. Secara umum keberadaan *comdev* PT Lahai Coal di bidang pendidikan membawa perubahan yang sangat berarti bagi masyarakat di Kabupaten Murung Raya, khususnya di kawasan Kecamatan Luhung Tahup.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini adalah masalah komunikasi dan kesulitan pencapaian wilayah yang sangat sulit di jangkau seperti beberapa guru dan kepala sekolah yang berasal dari desa yang sangat jauh dan terisolir. Hal ini mengakibatkan sulit tercapainya target peserta yang telah di programkan. Beberapa sekolah di desa juga sangat terbatas dalam ketersediaan guru, sehingga mengakibatkan guru tersebut sulit untuk memenuhi undangan pelatihan karena tidak adanya guru pengganti.

III.2.2 Bidang Kesehatan.

Program peningkatan kesehatan masyarakat di Kabupaten Murung Raya ini merupakan salah satu kegiatan BHP Billiton yang ingin membantu memberdayakan masyarakat di wilayah kerja PT.LC agar dapat menerima dan menjalankan prinsip kehidupan sehat melalui pendidikan kesehatan masyarakat yang berkelanjutan.

PT. LC menyadari bahwa derajat kesehatan yang prima merupakan modal dasar pengembangan sumber daya manusia. Untuk itu pada bulan maret 2006, PT.LC mengadakan kajian rona awal kesehatan masyarakat di sejumlah desa di sekitar wilayah kegiatan perusahaan. Berdasarkan hasil kajian ini, pada bulan september tahun 2006, bersama beberapa instansi pemerintahan terkait di bidang kesehatan, organisasi profesi kesehatan, dan LSM, BHP Billiton berinisiatif mengadakan lokakarya antar para pemangku kepentingan (Multi Stakeholder) di bidang kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah.

Sebagai tindak lanjut dari lokakarya tersebut, sejak Triwulan I tahun 2007, BHP Billiton menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan keluarga Berencana Kabupaten Murung Raya dan Yayasan Kusuma Buana, sebuah yayasan kesehatan dari Jakarta, serta dengan Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia untuk melakukan berbagai program dalam mendukung program Pemerintah yaitu Murung Raya Sehat 2010.⁷⁹

Berbagai program itu diantaranya: Program Pelatihan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kesehatan, Program Cope (Client Oriented Provider Efficient) untuk mengendalikan mutu layanan kesehatan, Program pelatihan APN (Asuhan Persalinan Normal) dan Program Pelatihan Pencegahan Infeksi dan keterampilan melakukan layanan Imunisasi untuk tenaga medis dan paramedis dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di puskesmas dan rumah sakit serta mendukung Puskesmas keliling di wilayah kegiatan Perusahaan melalui bantuan transportasi para dokter dan paramedis.

Gambar 3.5. Program Pelatihan COPE



Sumber: Laporan PT.LC, Juli-Desember 2007

⁷⁹ Hasil *depth-interview* dengan Bapak Priya Husada, Koordinator Hubungan Media dan komunikasi PT.LC, Kamis 7 Mei 2009.

Program UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) juga kembali digerakkan bersamaan dengan program Pendampingan terhadap "dokter kecil" dan PMR (Palang Merah Remaja), kecakapan Pramuka Saka Bhakti Husada dalam rangka menanamkan kesadaran terhadap nilai kesehatan sejak usia dini. Sampai dengan bulan Juni ini program kesehatan yang berjalan adalah pendampingan UKS di Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas dengan lokasi sekolah, kelurahan Muara Tuhup, desa Kohong, desa Baloi, desa Tumbang Bauh dan kelurahan Muara Laung. Selain itu pihak perusahaan mengadakan pelatihan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) bagi para guru Penjaskesmas (Pendidikan Jasmani dan Kesehatan) dan pengawas sekolah untuk tingkat SD, SLTP dan SLTA yang meliputi 27 sekolah di Kabupaten Murung Raya. Pelatihan diikuti oleh 32 peserta dan materi pelatihan meliputi kesehatan individu, kesehatan lingkungan sekolah, pendidikan peraturan kebijakan sekolah, bahaya narkoba dan merokok, dan sebagainya.⁸⁰

Pada bulan November 2008, BHP Billiton bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Murung Raya, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Perempuan, Puskesmas Muara Laung, Puskesmas Batu Bua dan Puskesmas Muara Tuhup, melakukan pelatihan Kader Posyandu.

Rangkaian kegiatan pelatihan diawali di Muara Laung I bagi kader posyandu dari Muara Laung I, Muara Laung II dan Pelaci. Di Tumbang Bauh melibatkan kader Posyandu dari Tumbang Bauh, Tumbang Masalo, Hingan Tukung dan Liang Nyaling. Di Maruwei bagi kader posyandu dari Maruwei I, Maruwei II dan Tawai Haui. Di Makunjung bagi kader posyandu Makunjung. Di Batu Tojah bagi kader posyandu Desa Batu Tojah, Tumbang Baloi bagi kader di Tumbang Baloi dan terakhir di Muara Tuhup. Total posyandu yang mengikuti pelatihan sebanyak 16 posyandu.

⁸⁰ Ibid

Gambar 3.6: Peserta pelatihan kader Posyandu, yang terdiri dari ibu-ibu rumah tangga dan remaja dari sejumlah desa/kelurahan di Kecamatan Kuara Laung, Batu Bua dan Muara Tuhup



Sumber: Dokumentasi Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya, 2008.

Program-program ini mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Masyarakat menilai bahwa program-program kesehatan menghasilkan banyak perubahan, terutama dalam peningkatan kualitas masyarakat dan pengadaan berbagai sarana dan prasarana kesehatan yang kini lebih mudah diakses. Pelatihan kader-kader kesehatan yang berfungsi untuk mempermudah pengobatan terhadap masyarakat yang sakit dan sekaligus memberikan penjelasan tentang pencegahan dan pengobatan, mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pengobatan yang cepat dan berbagai sosialisasi kesehatan karena kader-kader tersebut adalah warga masyarakat sendiri. Untuk pelatihan kader-kader posyandu, berdampak pada lahirnya kader-kader posyandu dari masyarakat setempat, yang sangat berperan dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu-ibu dan Balita di daerah tersebut. Selama ini keberadaan

Posyandu kurang mendapat perhatian dari pemerintah dan tidak berjalan secara maksimal, serta kurangnya partisipasi dari masyarakat karena kurangnya pengetahuan mereka. Melalui pelatihan ini mereka antara lain diajarkan bagaimana mengisi Kartu Menuju Sehat (KMS), Kesehatan Ibu dan Balita.⁸¹

Kendala pelaksanaan antara lain faktor cuaca, jarak yang cukup jauh, beberapa desa baru terbentuk posyandu sehingga pengenalan posyandu juga sangat baru, termasuk juga faktor bahasa. Beberapa kendala lainnya adalah kurang aktifnya tenaga medis dan dokter yang dikontrak PT Lahai Coal untuk selalu berada di wilayah masyarakat pada saat masyarakat membutuhkan penanganan serius terhadap pasien. Selain itu dinas kesehatan belum berbuat banyak untuk beberapa tuntutan kebutuhan masyarakat misalnya ketersediaan obat-obatan untuk keperluan puskesmas dan tenaga medis yang selalu berada di tempat tugas.

Dalam kaitannya dengan pembinaan kesehatan pada anak-anak sekolah PT LC mengadakan kegiatan kegiatan Gosok Gigi Serempak yang melebarkan murid Madrasah Ibtidaiyah dan SD N 1 Muara Laung, masing-masing pada 10 dan 11 September 2007. Kegiatan serempak ini juga bertujuan untuk mendorong antusiasmen anak-anak dan menunjukkan bahwa menyikat gigi merupakan kegiatan yang menyenangkan. Kegiatan ini melibatkan pula dokter-dokter cilik yang sebelumnya sudah difasilitasi oleh Yayasan Kusuma Buana (YKB) dengan dukungan PT LC.

Sebelum pelaksanaan kegiatan, YKB memberikan materi tentang perawatan mulut dan gigi di kelas. Kemudian setelah itu dilakuka praktek menyikat gigi secara serentak yang dipandu oleh dokter kecil. Total jumlah peserta kegiatan ini adalah sebanyak 520 orang murid dari kedua sekolah.

Dampak kegiatan ini dirasakan secara nyata oleh para murid yang secara antusias menyambut kegiatan ini. Menurut Ny Sulaeha, salah seorang guru yang

⁸¹ Hasil *depth-interview* dengan dr.Setiawati Ningsih, Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya, Jumat 8 April 2009.

turut membantu dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan ini, kegiatan ini mampu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kesehatan gigi bagi para muridnya, terbukti dari pengakuan sebagian murid-muridnya ketika ia secara langsung berdialog dengan mereka serta orang tua mereka di rumah.

Gambar 3.7: Pelaksanaan kegiatan sikat gigi secara serempak di SDN 1 Muara Laung melibatkan seluruh murid dari kelas I – VI. Kegiatan ini diikuti secara antusias oleh para murid, yang pandu oleh fasilitator dari Yayasan Kusuma Buana (YKB)



Sumber: Dokumentasi Humas PT LC, 2007.

Kendala dari kegiatan ini antara lain masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan gigi ataupun kesehatan secara umum. Upaya penyadaran tidak bisa dilakukan hanya sekali saja, namun harus terus dilakukan dan bila memungkinkan dilakukan secara *door to door* atau mendatangi mereka satu persatu, sementara tenaga penyuluh kesehatan masih terbatas. Hal ini berarti bahwa perbaikan dan penambahan fasilitas kesehatan

berkaitan erat dengan tenaga kesehatan yang harus terus ditingkatkan secara kuantitas dan kualitas.⁸²

Upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat juga dilakukan melalui penyediaan sarana air bersih. Pada tahun 2006, PT Lahai Coal melakukan upaya penyediaan air bersih untuk Desa Muara Tuhup:

- Pembuatan 3 buah sumur bor;
- Pembuatan dan pembangunan tiga tanki air berkapasitas 70 m³ termasuk instalasi pipa ke rumah penduduk. Lokasi: Desa Muara Tuhup;⁸³

Gambar 3.8. Sarana air bersih di desa Muara Tuhup



Sumber: Laporan PT.LC, Januari-Juni 2006.

Program ini pada tahun 2007/2008 dilanjutkan pada 6 desa lainnya. Pengeboran untuk mencari sumber air tanah di Dewa Maruwai I dan Tawai Hauli tidak berhasil. Untuk kedua desa ini, perusahaan memberikan alternatif untuk menggunakan air sungai sebagai air baku untuk air minum. Air dari

⁸² Ibid

⁸³ Hasil *depth-interview* dengan Bapak Priya Husada, Koordinator Hubungan Media dan komunikasi PT.LC, Kamis 7 Mei 2009.

sungai dipompa ke tangki pengumpul dan diolah dengan sistem yang sederhana yaitu dengan sistem saringan pasir lambat.

PT Lahai Coal juga membagikan drum-drum bekas avtur kepada masyarakat dan fasilitas-fasilitas umum yang digunakan untuk tempat penampungan air. Total 1.122 buah drum kosong telah dibagikan selama periode Januari s/d Maret 2007. Pada tahun selanjutnya PT LC kembali membagikan drum-drum bekas avtur kepada masyarakat dan fasilitas-fasilitas umum yang digunakan untuk tempat penampungan air. Total 720 buah drum kosong telah dibagikan selama periode 2008.⁸⁴

Dengan adanya program ini, masyarakat di desa ini 85% dari populasi rumah tangga di kecamatan Muara Tuhup telah memiliki air bersih yang dialirkan ke rumah-rumah, yang merupakan swadaya masyarakat dengan fasilitasi dari perusahaan. Sejumlah tokoh masyarakat menyatakan mendapatkan manfaat besar dari keberadaan program tersebut. Kawasan yang dulunya dikenal sebagai kawasan tandus kini banyak ditemui tanaman-tanaman yang dulunya diusahakan oleh PT Lahai Coal. Bahkan masyarakat sendiri kini sudah secara sadar menjaga kelestarian lingkungan di sekitar daerah mereka.⁸⁵

Kendala utama untuk pelaksanaan program ini secara maksimal adalah kondisi geografis di sejumlah desa yang sulit dijangkau karena berbatuan dan akses yang kendaraan sulit. Selain itu, untuk kesinambungan program, belum semua masyarakat menyadari pentingnya kebersamaan dalam menjaga berbagai infrastruktur secara bersama-sama.

Bantuan lain diwujudkan dalam bidang olahraga, sebagai bagian dari peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, adalah pemberian bantuan berupa sejumlah fasilitas olahraga di kelurahan Muara Tuhup, Desa Penda siron, Desa Rumbang Bauh dan Desa Tumbag Baloi, berupa lapangan bulu tangkis, bola volly da tenis meja, yang keseluruhan emilai Rp 500 juta, pada Agustus 2008. Masyarakat pun ikut berpartisipasi dengan menyumbangkan tanah dan tenaga

⁸⁴ Ibid

⁸⁵ Hasil *depth-interview* dengan Bapak Drs.Syahrir, tokoh masyarakat di Muara Murung, Sabtu 9 April 2009.

melalui KSM-KSM. Kontribusi masyarakat bahkan mencapai Rp 45 juta.

Fasilitas olahraga di kelurahan Mara Tuhup terdiri dari dua lapangan bulutangkis yang dapat difungsikan menjadi satu lapangan bola volly, satu ruang tertutup untuk lapangan tenis meja, satu ruang ganti, satu kantin dan dua kamar kecil. Lapangan ini dibuat dengan pengecoran semen sehingga lebih tahan lama yang seluruhnya dikerjakan oleh masyarakat melali KSM-KSM. Pengelolaan lapangan ini dilakukan secara bergantian setiap bulannya oleh KSM Mawar, KSM Mawaddah, KSM Melati, KSM Suka Maju dan KSM Cempaka. Setiap harinya lapangan ini digunakan mulai pukul 15.00 hingga 18.00. Berdasarkan kesepakatan setiap lapangan yang digunakan dikenakan biaya Rp 3000,- perhari, dimana dana ini digunakan untuk biaya perawatan, sedangkan transaksi di dalam kantin yang dikelola bergilir oleh KSM per bulan setiap harinya mencapai rata-rata Rp 300 ribu. Keuntungan dari kantin ini sebagian disisihkan untuk pemeliharaan dan pengembangan fasilitas olahraga. Tiap sore fasilitas olahraga ini ramai dikunjungi warga, apalagi di tempat tersebut sarana sinyal telpon juga memadai.

Keberadaan fasilitas ini sangat dirasakan oleh masyarakat, sebagaimana disampaikan oleh Noorhidayah, Badan Pengawas KSM Mawar, salah satu KSM yang ditunjuk untuk mengelola fasilitas ini. Menurutnya, keberadaan fasilitas ini memberikan banyak pengetahuan bagi mereka, pertama, mereka belajar soal pengelolaan proyek. Sebuah pelajaran yang dianggap sangat berharga karena mereka, khususnya ibu-ibu biasanya hanya berurusan dengan dapur dan anak. Kedua, mereka juga tahu mengenai masalah olahraga, sesuatu yang jarang mereka geluti. Hal yang masih kurang dirasakan oleh para warga adalah pengetahuan tentang keterampilan-keterampilan tertentu yang bernilai ekonomis, khususnya dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar. Selain itu, menurut Camat Laung Tuhup, Syahrial Pasaribu, bantuan ini

telah membantu pembinaan olahraga dan mewujudkan masyarakat yang sehat di daerahnya.⁸⁶

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini pada awal program adalah masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan manfaat dari berbagai fasilitas tersebut, namun setelah berbagai sosialisasi dan pendekatan yang dilakukan pihak perusahaan dan penda setempat, terjadi perubahan yang mendasar bagi pola hidup sehat masyarakat. Terbukti dengan semakin meningkatnya warga masyarakat yang menggunakan fasilitas tersebut tiap harinya, yang bahkan ada yang datang dari daerah lain.

Terkait dengan peningkatan kualitas lingkungan BHP Billiton merancang sebuah program lingkungan bertitel Program Penanaman dan Pelihara Pohon untuk Kehidupan (PPPK). Program ini melibatkan seluruh karyawan dan keluarganya baik yang berada di Balikpapan maupun yang berada di lapangan. Melalui dua kelompok usaha BHP Billiton yaitu PT LC dan PT MC secara bersamaan melakukan program ini di lapangan. PT LC memusatkan kegiatannya di Kelurahan Muara Tuhup dan desa Batu Tojah, sedangkan PT MC melakukannya di Desa Tumbang Baloi. Seluruh bibit diperoleh dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan kab Murung Raya dan dari tempat persemaian bibit yang dimiliki oleh BHP Billiton dari berbagai tempat sekitar lokasi kegiatan perusahaan. Untuk Kelurahan Muara Tuhup, Kecamatan Laung Tuhup, pusat kegiatan penanaman dilaksanakan di SMP Negeri 02 Muara Tutup, yang dilaksanakan pada 28 November 2007.

Di Puruk Cahu, kegiatan penanaman dilaksanakan oleh karyawan PT LC bersama-sama dengan Bupati Willy Yoseph dan jajaran pegawai pemerintah Murung Raya pada 30 November 2007. Kegiatan penanaman oleh PT MC bersama dengan siswa sekolah dan masyarakat di Desa Baloi dilaksanakan di beberapa lokasi. Total pohon yang ditanam adalah 1.003 pohon dengan melibatkan 122 orang dengan pusat kegiatan penanaman dilaksanakan di SDN Baloi pada 28 November 2007. Dalam kegiatan ini dilakukan pula sosialisasi

⁸⁶ Hasil *depth-interview* dengan Camat Laung Tuhup, Syahrial Pasaribu, Senin, 11 April 2009.

akan pentingnya keberadaan tanaman dan hutan bagi perlindungan lingkungan dan pentingnya peran mereka dalam kegiatan penanaman dan pemeliharaan pohon sebagaimana dicanangkan pemerintah. Kegiatan ini juga dilaksanakan Di Balikpapan, dimana sebanyak 75 karyawan beserta keluarga mereka turut berpartisipasi beserta pemerintah dan masyarakat dalam aksi penanaman serentak, yang dipusatkan di Bendungan Pengendali I (Bendali I) Sepinggang, pada 1 Desember 2007.⁸⁷

Gambar 3.9: Penanaman dan pemeliharaan pohon serempak kerjasama PT LC dengan Pemda, warga masyarakat dan ratusan siswa pelajar di Murung Raya



Sumber: Humas PT LC, 2007

⁸⁷ Hasil *depth-interview* dengan Bapak Drs.Syahrir, tokoh masyarakat di Muara Murung, Sabtu 9 April 2009.

III.2.3 Peningkatan Kapasitas Masyarakat

Untuk peningkatan kapasitas masyarakat sejumlah program yang dijalankan *comdev* PT Lahai Coal antara lain melakukan pendampingan terhadap Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk pengumpulan modal secara mandiri melalui Kelompok Usaha Bersama dalam bentuk “simpan pinjam”. Sampai Juni 2007, dari 7 desa terbentuk 22 KSM dan beranggotakan 586 orang. Dua KSM gagal dan membubarkan diri walaupun anggotanya bergabung dengan KSM yang lain.

Gambar 3.10. Suasana kegiatan salah satu KSM binaan PT.LC



Sumber: Laporan PT.LC, Juli-Desember 2007

Selain membantu dalam hal pendampingan, perusahaan memberikan tambahan dana “modal” bagi KSM yang sudah aktif dan terus berkembang. Sampai Juni 2008, Total dana swadaya yang berhasil dikumpulkan oleh anggota KSM ditambah dengan “dana modal” dari perusahaan (sekitar Rp. 127.500.000,-) telah mencapai Rp. 562.052.250,-.

Pada Januari 2007, pihak perusahaan mengirim 7 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mengikuti “*Training of Trainers (ToT)*” mengenai “Metode Pendekatan dan Pendidikan Teknik-Teknik Program Partisipasi” Pendidikan ini bertujuan untuk membekali anggota LSM tentang teknik dan keahlian untuk memfasilitasi “*Participatory Development Program*” (program

pengembangan yang basiskan partisipasi masyarakat) di daerah terpencil seperti lokasi dimana perusahaan akan beroperasi.

PT LC juga melakukan program pemagangan bagi karyawan lokal, yang diberangkatkan pada Agustus 2007. Dalam hal ini PT LC memberangkatkan 19 karyawan lokal untuk magang di Institut pertambangan Nemangkawai Timika. Program pemagangan ini bertujuan untuk mendapatkan tenaga yang memiliki keahlian dalam bidang elektrik, kendaraan, kelistrikan, mekanik alat berat dan ringan, mekanik produksi, konstruksi dan sipil dan sebagainya. Program ini berlangsung selama 36 bulan (3 tahun) yang terbagi dalam 3 periode pendidikan. Dengan program peningkatan kompetensi dan kapasitas karyawan lokal ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan akan berkembang bersama dengan BHP Hilton.⁸⁸

Gambar 3.11. Para peserta magang berjumlah 19 orang yang dikirim ke Pusat Pelatihan Institut Pertambangan Nemangkawai (IPN) PT Freeport Indonesia (PTFI) Kuala Kencana, Timika, Papua. Mereka mengikuti pemagangan selama 3 (tiga) tahun dengan spesialisasi yang beragam



Sumber: Dokumentasi PT LC, 2008

⁸⁸ Ibid

Dampak dari dilaksanakannya pemagangan ini sangat dirasakan oleh seluruh peserta pemagangan tersebut. Kalau selama ini para pekerja lokal adalah pekerja rendahan dengan gaji yang kurang memadai, maka dengan dukungan pelatihan dan pemagangan yang dilakukan pihak PT LC telah mampu mengangkat derajat kehidupan mereka dalam hal pekerjaan. Dalam hal ini ketersediaan tenaga kerja lokal yang handal bukan lagi yang mustahil untuk diperoleh dari daerah ini. Pihak *comdev* PT LC Coal sendiri, Hikmawati, mengakui bahwa penyediaan tenaga kerja bagi perusahaan senantiasa mengutamakan tenaga kerja lokal. Hampir 75% tenaga kerja yang digunakan saat ini berasal dari sekitar daerah operasi, khususnya dari Kabupaten Murung Raya.

Manfaat pemagangan ini misalnya saja diakui oleh Darman O. Umar, warga Desa Tumbang Olong Kecamatan Uut Murung, yang merasa sangat terbantu dengan adanya proses pemagangan tersebut.

“Sebagai seorang yang berlatar belakang keluarga miskin, saya tak pernah bermimpi untuk bisa melanjutkan pendidikannya lebih jauh. Dalam pemagangan selama tiga tahun ini saya mengambil jurusan teknik sipil dan konstruksi. Awalnya saya hanya karyawan biasa di PT LC, namun diberi kesempatan mengikuti pemagangan tersebut setelah lulus dari seleksi yang dilakukan oleh pihak PT LC. Proses seleksi ini sendiri bersifat terbuka dan dapat diikuti oleh karyawan PT LC yang berasal dari masyarakat di sekitar area yang mendapatkan dampak langsung dari operasi perusahaan.”⁸⁹

Hal yang sama juga diakui oleh Romel Priyanto Dolaksaribu, yang dulunya hanya seorang sopir perusahaan. Ia mengambil spesialis mekanik mesin dan bercita-cita menjadi mekanik yang handal, yang merupakan cita-citanya sejak kecil. Seperti halnya Darman, ia tak pernah bermimpi bisa mengikuti

⁸⁹ Hasil *depth-interview* dengan Darman O. Umar, warga Desa Tumbang Olong Kecamatan Uut Murung, Selasa 12 April 2009.

pemagangan tersebut yang dirasakan manfaatnya bagi pengembangan karirnya di masa yang akan datang.⁹⁰

Tak ada kendala yang berarti dalam pelaksanaan program ini, selain dari keterbatasan jumlah peserta yang belum bisa menjangkau seluruh SDM yang ada karena disesuaikan dengan kapasitas dan keterjangkauan anggaran untuk periode satu penganggaran, karena pemagangan ini memang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Meski demikian pihak PT LC berkomitmen untuk menjadikan program ini tetap berkelanjutan, dalam artian akan terus dilakukan dalam periode tertentu.

Selain itu, PT LC melalui Yayasan Bina Masyarakat Mandiri (YBM2) mengadakan Program Pelatihan Perkebunan Karet untuk masyarakat dampingan yang berasal dari Desa Tumbang Bauh, Liang Nyaling, Batu Tojah, Tumbang Olong I dan Tumbang Olong II. Pelatihan ini dilaksanakan dari 28 – 31 Mei 2008 di Balai Pusat Pengembangan Bibit dan Benih Kabupaten Barito Timur, tepatnya di Desa Rodok, Kecamatan Dusun Tengah. Masyarakat di desa ini sebagian besar merupakan petani karet. Balai ini memberikan pola kemandirian bagi petani karet yaitu mandiri dalam pengembangan bibit, pemupukan hingga ke pemasarannya secara kelompok swadaya. Materi yang diajarkan dalam pelatihan ini antara lain pembuatan bibit karet dengan menggunakan metode Okulasi antara bibit lokal dengan bibit unggul PB260, mengenali bibit yang baik, membuat tempat pembibitan (*nursery*), penyiapan lahan, pengolahan tanah, teknik pemupukan. Pada pelatihan ini petani juga dikenalkan dengan tanaman hortikultura seperti padi sawah dan kacang-kacangan.⁹¹

⁹⁰ Hasil *depth-interview* dengan Romel Priyanto Dolaksaribu, warga Desa Tumbang Olong Kecamatan Uut Murung, Selasa 12 April 2009.

⁹¹ Hasil *depth-interview* dengan Bapak Priya Husada, Koordinator Hubungan Media dan komunikasi PT.LC, Kamis 7 Mei 2009.

Gambar 3.12. Para peserta pelatihan perkebunan karet mendapat pengarahan dari fasilitator. Selain mendapat pengetahuan tentang pertanaman karet petani juga dikenalkan dengan tanaman hortikultura seperti padi sawah dan kacang-kacangan.



Sumber: Dokumentasi PT LC, 2008

Dampak pelatihan ini dirasakan langsung oleh petani, khususnya dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanaman mereka. Selama ini mereka jarang mendapatkan pelatihan serupa dan hanya mengandalkan pada warisan pengetahuan turun-temurun (bertani secara tradisional). Pengetahuan tentang pertanaman lain, khususnya tanaman kacang-kacangan juga sangat dirasakan dampaknya, karena para petani ini pun kini memiliki sumber penghasilan tambahan dengan mengolah lahan kosong yang berada di sekitar rumah atau pekarangan mereka.

Kendala pelaksanaan pelatihan ini, sebagaimana diakui oleh Ernes Honggo, salah seorang fasilitator kegiatan ini adalah kendala bahasa serta tingkat pengetahuan petani yang sebagian besar tidak berpendidikan sama sekali, sehingga metode yang digunakan harus menyesuaikan dengan kondisi

tersebut. Kendala lainnya adalah jangkauan pelatihan yang belum bisa menjangkau seluruh petani karet yang ada sehingga bagi petani lain yang belum mendapat pelatihan beranggapan adanya diskriminasi. Dalam menghadapi kondisi tersebut, pihak perusahaan dan yayasan menjanjikan akan terus melakukan upaya pelatihan bagi para petani hingga semua petani yang ada bisa terlibat dalam pelatihan tersebut.⁹²

Berbagai program perekonomian skala kecil untuk melatih masyarakat mengelola bisnis-bisnis kecil dari sumber daya yang tersedia telah berjalan dengan baik. Hal ini berkat dukungan PT LC berupa pendampingan bagi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), baik melalui dukungan pinjaman lunak maupun penyelenggaraan berbagai pelatihan seperti pelatihan menjahit, memasak, kerajinan tangan, pembuatan pondok-pondok jualan seperti yang telah dilakukan untuk masyarakat di wilayah operasi dan juga wilayah dampak tidak langsung. Kegiatan-kegiatan ini ditanggapi serius dan masyarakat belajar untuk membuatnya menjadi ladang bisnis bagi kelompok masyarakat dan individu.

Keberadaan KSM binaan ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat, seperti yang diakui oleh Hartati, pengurus KSM Bina Karya. Hartati mengakui bahwa dukungan dana dan pendampingan dari PT LC telah mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan tidak hanya mengandalkan penghasilan mereka dari usaha tani subsisten seperti yang mereka lakukan selama ini.

Kendala yang dihadapi dalam program ini adalah bahwa kebanyakan dari usaha-usaha kerajinan yang dilakukan, terfokus untuk para wanita di desa-desa. Namun berbagai kendala dihadapi oleh mereka karena tradisi yang masih dipertahankan bahwa perempuan tidak boleh berada di luar rumah,

⁹² Hasil *depth-interview* dengan Bapak Ernes Honggo, Koordinator Hubungan Media dan komunikasi PT.LC, Rabu 13 April 2009.

memanfaatkan waktu untuk kepentingan yang menurut kaum laki-laki bukan untuk melayani keluarga.

Peningkatan kapasitas masyarakat juga dilakukan melalui pemberian bantuan (donasi) pada masyarakat berdasarkan proposal yang diajukan. Misalnya pada Januari – Juni 2007, PT LC memberikan bantuan sumbangan/donasi dan sponsorship kepada berbagai pihak, masyarakat dan pemerintah setempat berdasarkan proposal yang disampaikan kepada perusahaan. Selama semester I Tahun 2007 ada sekitar 20 proposal dari berbagai kegiatan yang disetujui oleh perusahaan. Pada tahun 2008 jumlah proposal yang diajukan masyarakat dan direalisasikan mencapai 26 proposal.

Kendala yang kerap dihadapi dalam program donasi ini antara lain adalah tingginya ekspektasi atau pengharapan masyarakat akan PT LC yang menganggap bahwa semua persoalan mereka akan terselesaikan dengan keberadaan *comdev* PT LC dalam membantu mereka.

Secara umum kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan *comdev* PT LC adalah lemahnya sistem koordinasi yang terintegrasi di beberapa pihak yang terlibat. Belum jelasnya aturan main yang spesifik membuat bantuan dari program pengembangan masyarakat tidak tepat sasaran sehingga berimplikasi pada hasil yang tidak sesuai dengan perencanaan.⁹³

II.3. Menuju Sebuah Model Interaksi Masyarakat Lokal dan Perusahaan multinasional yang Saling Menguntungkan di Negara Berkembang.

Perusahaan multinasional selama ini digambarkan sebagai sisi buruk dari globalisasi, dimana di sejumlah kasus menunjukkan adanya hubungan yang buruk antara perusahaan multinasional dengan masyarakat lokal di daerah mereka beroperasi. Perusahaan Multinasional bisa menjadi bencana Nasional karena rawan pelanggaran HAM dan bisa menjadi kekuatan penghambat proses

⁹³ Hasil *depth-interview* dengan Bapak Priya Husada, Koordinator Hubungan Media dan komunikasi PT.LC, Kamis 7 Mei 2009.

demokratisasi di Negara-negara sedang berkembang. Emmy Hafid (Direktur Eksekutif WALHI) dalam diskusi bertema "Tanggungjawab *Transnational Corporations* dalam HAM" menyatakan bahwa perusahaan Multinasional di tanah air lebih banyak menimbulkan berbagai pengrusakan dari pada keuntungan. Berbagai kerusakan itu antara lain perampasan tanah, penghancuran tradisi, perempasan hak penduduk atas angka hidup yang sehat, penghancuran sumber daya alam serta pelecehan seksual.⁹⁴

Meski demikian asumsi ini dapat dibantah dengan adanya sejumlah Perusahaan multinasional yang justru memiliki hubungan yang baik dan saling menguntungkan dengan masyarakat lokal, sebagaimana yang terjadi dengan BHP Billiton melalui salah satu perusahaannya, yaitu PT LC, yang beroperasi di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah.

PT LC melalui pelaksanaan CSR yang berbentuk *comdev* di bidang kesehatan, pendidikan, peningkatan kapasitas masyarakat yang secara umum ternyata berdampak positif bagi masyarakat lokal. Melalui berbagai program pengembangan masyarakat yang dilakukannya telah ikut meningkatkan derajat kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Hal ini bisa menjadi awal model hubungan Perusahaan multinasional dan masyarakat lokal yang saling menguntungkan, dimana biasanya Perusahaan multinasional yang hadir di negara berkembang cenderung konfliktual. Hubungan yang cenderung konfliktual ini tidak sepenuhnya benar jika melihat apa yang terjadi dengan BHP Billiton dengan masyarakat lokal di Kabupaten Murung Raya. Dalam hal ini masyarakat lokal mendapatkan sejumlah manfaat dengan keberadaan PT LC, begitu pun sebaliknya perusahaan pun mendapatkan hal yang sama, selama berbagai program tersebut dilaksanakan dengan baik.

Beberapa manfaat langsung yang diperoleh masyarakat lokal dari adanya pelaksanaan CSR PT LC sebagai perusahaan multinasional sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya antara lain: *pertama*, dalam hal ketenagakerjaan. Salah satu persoalan utama di negara berkembang adalah

⁹⁴ *Kompas*, Perusahaan Multinasional Bisa Jadi Bencana, Jakarta, 1 Januari 2006

banyaknya pengangguran akibat kurangnya lapangan kerja yang tersedia. Keberadaan Perusahaan multinasional setidaknya dapat mengisi kekosongan tersebut dengan merekrut langsung tenaga kerja dari daerah dimana ia beroperasi. Untuk kasus PT LC sendiri sebanyak 75% karyawan perusahaan ini berasal dari masyarakat sekitar daerah operasi. Posisi untuk para karyawan lokal ini disesuaikan dengan tingkat pendidikan karyawan tersebut, meskipun sebagian besar adalah tenaga-tenaga lapangan, karena kondisi SDM yang terbatas dari segi kualitas pendidikan. Meski demikian dalam proses ini juga terjadi proses transfer pengetahuan dan teknologi, karena seluruh pekerja yang dipekerjakan di perusahaan sebelumnya dibekali dengan pelatihan dan bahkan sebagian di antaranya dimagangkan di perusahaan-perusahaan multinasional lainnya. Nilai lebih yang diperoleh masyarakat, selain mendapatkan lapangan kerja, juga mendapatkan tambahan pengetahuan yang bisa berguna bagi pengembangan karier mereka meski nantinya tidak bekerja di PT LC lagi.

Tidak hanya itu Perusahaan multinasional juga dapat berperan dengan secara tidak langsung menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, misalnya melalui dukungan dana dan pendampingan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau sejenisnya. Di Kabupaten Murung Raya misalnya, PT LC mengucurkan dana yang cukup besar bagi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), yang dalam perkembangannya mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar, khususnya dari kalangan ibu-ibu rumah tangga. KSM-KSM ini dengan dukungan dana dan pendampingan dari perusahaan mampu beroperasi secara sehat dan bahkan menjadi percontohan bagi daerah lain. Tercatat 22 KSM kini sudah terbentuk dan tersebar di 7 desa dengan total anggota keseluruhan sebesar 586 orang. Bayangkan jika keberadaan KSM ini terus ditingkatkan jumlahnya mencakup seluruh desa yang berjumlah puluhan di Kabupaten Murung Raya, berapa banyak tenaga kerja yang bisa diserap dari KSM ini?

Kedua, keberadaan perusahaan multinasional melalui konsep *comdev*-nya mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat melalui

berbagai program *comdev* mereka. Misalnya melalui pemberian bantuan beasiswa, pelatihan bagi guru dan tenaga kesehatan, pengadaan bahan-bahan ajar, penyediaan sarana air bersih dan pemeliharaan lingkungan sekitar melalui program ramah lingkungan dan penanaman pohon secara massif. Sebagaimana program pendidikan dan kesehatan yang telah dilakukan PT LC di Kabupaten Murung Raya telah memberi perubahan yang mendasar bagi daerah tersebut dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia. Meski belum seluruh masyarakat tersebut belum sepenuhnya mendapat manfaat dari berbagai program tersebut, namun melalui konsep partisipasi dan pembangunan keberlanjutan yang digunakan dalam *comdev* PT LC target tersebut sangat tidak mustahil dapat terealisasi hanya dalam beberapa tahun mendatang. Program kesehatan ini juga telah mengubah gaya hidup masyarakat secara signifikan karena gencarnya sosialisasi yang dilakukan.

Ketiga, pengadaan infrastruktur bagi masyarakat, misalnya pembangunan jalan yang bisa digunakan secara bersama antara perusahaan dan masyarakat setempat, pembangunan dan perbaikan berbagai sarana layanan masyarakat, seperti sekolah, tempat ibadah, puskesmas, sarana air bersih, olahraga dan sebagainya. Kontribusi PT LC dalam hal pengadaan infrastruktur sudah tergolong memadai dan memberi manfaat bagi masyarakat lokal. Pengadaan sarana air bersih misalnya, kini telah menjangkau 85% rumah tangga yang ada di Kecamatan Muara Tuhup, sarana olahraga yang kini banyak dimanfaatkan masyarakat, sejumlah sekolah dan fasilitas-fasilitas publik lainnya telah sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

Keempat, bagi pemerintah daerah dan pusat, selain berkontribusi langsung melalui pajak, perusahaan multinasional juga turut mendukung pembangunan di daerah melalui berbagai program kemitraan yang dilaksanakan antara pmda dan pihak perusahaan.

Kelima, aspek yang tak kalah pentingnya adalah keberadaan perusahaan multinasional dalam konteks PT LC telah mengangkat harkat dan martabat masyarakat lokal. Daerah yang dulunya tertinggal dari segi pembangunan dan

kualitas SDM, kini dapat dengan bangga menyatakan dirinya sederajat dengan masyarakat dari daerah lain. Mereka kini telah memiliki sejumlah fasilitas-fasilitas penting dan SDM yang lebih berkualitas dari segi pendidikan dan kesehatan, serta memiliki lingkungan yang lebih terjaga. Transfer pola pikir yang lebih modern tak pelak lagi menjadi dampak yang tak kalah pentingnya bagi masyarakat lokal, yang kini lebih teratur dan bermartabat.

Dalam hal ini kehadiran perusahaan multinasional di negara berkembang dapat menjadi sebuah jalan keluar untuk dapat menjawab beberapa kesenjangan ekonomi di negara tujuan investasinya, dimana perusahaan multinasional ini dapat membantu memajukan proses pembangunan yang membutuhkan dana, mengurangi tingkat pengangguran dan juga mentransfer teknologi dan keahlian yang dimiliki *home country* perusahaan multinasional tersebut, memperkenalkan pola pikir yang lebih moder, dan mengangkat harkat dan martabat masyarakat setempat.

Bagi perusahaan sendiri sejumlah manfaat yang akan diperoleh antara lain:

Pertama, mengurangi risiko dan tuduhan terhadap perlakuan tidak pantas yang diterima perusahaan. Perusahaan yang menjalankan CSR secara konsisten akan mendapat dukungan luas dari komunitas yang merasakan manfaat dari aktivitas yang dijalankannya. CSR akan mengangkat citra perusahaan, yang dalam rentang waktu yang panjang akan meningkatkan reputasi perusahaan. PT LC sefama beroperasi di Kabupaten Murung Raya belum pernah mendapatkan penentangan yang keras dari masyarakat. Semua persoalan yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat akan segera didiskusikan melalui forum terbuka di forum Hapakat. Keterbukaan dan kondisi dialogis antara kedua belah pihak ini pada akhirnya menghilangkan segala kebuntuan ataupun konflik yang mungkin terjadi.

Kedua, CSR dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu perusahaan meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan suatu krisis. Sebagai contoh adalah sebuah perusahaan produsen *consumer goods* yang beberapa waktu yang

lalu dilanda isu adanya kandungan bahan berbahaya dalam produknya. Namun karena perusahaan tersebut dianggap konsisten dalam menjalankan CSR-nya maka masyarakat menyikapinya dengan tenang sehingga relatif tidak mempengaruhi aktivitas dan kinerjanya. Dalam kasus PT LC pun masyarakat cenderung membela keberadaan PT LC ketika dihadapkan pada isu lingkungan, karena PT LC sendiri telah menunjukkan komitmennya dalam hal peningkatan kualitas lingkungan melalui berbagai program lingkungan yang dilakukannya, yang melibatkan langsung masyarakat. Ketika terjadi isu lingkungan ini pun masyarakat biasanya tidak segan mengutarakannya melalui forum Hapakat yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan itu.

Ketiga, keterlibatan dan kebanggaan karyawan. Karyawan akan merasa bangga bekerja pada perusahaan yang memiliki reputasi yang baik, yang secara konsisten melakukan upaya-upaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Kebanggaan ini pada akhirnya akan menghasilkan loyalitas sehingga mereka merasa lebih termotivasi untuk bekerja lebih keras demi kemajuan perusahaan. Pada kasus PT LC sendiri melalui konsep "Nihil Kerugian" menunjukkan tekad untuk menciptakan sebuah tempat bekerja yang bebas dari kecelakaan, penyakit dan insiden. Bagi karyawan, konsep ini tidak hanya menjadi diartikan sebagai sifat kehati-hatian dalam bekerja, namun juga mengandung makna tanggungjawab untuk bekerja maksimal bagi perusahaan.

Keempat, CSR yang dilaksanakan secara konsisten akan mampu memperbaiki dan mempererat hubungan antara perusahaan dengan para *stakeholdersnya*. Pelaksanaan CSR secara konsisten menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kepedulian terhadap pihak-pihak yang berkontribusi terhadap lancarnya berbagai aktivitas serta kemajuan yang mereka raih.

Kelima, meningkatnya penjualan. Konsumen akan lebih menyukai produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang secara konsisten menjalankan CSR-nya sehingga memiliki reputasi yang baik.

Keenam, insentif-insentif lainnya seperti insentif pajak dan berbagai perlakuan khusus lainnya. Perusahaan memperoleh beberapa keuntungan karena menerapkan tanggungjawab sosialnya antara lain: untuk mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan *brand image* perusahaan; layak mendapatkan ijin untuk beroperasi (*social license to operate*), mereduksi risiko bisnis perusahaan; melebarkan akses ke sumber daya; membentangkan akses menuju *market*; mereduksi biaya; memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*, memperbaiki hubungan dengan *regulator*; dan meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.

Apa yang telah dilakukan oleh PT LC di Murung Raya telah sejalan dengan konsep *Triple Bottom Line* yang diperkenalkan oleh John Elkington. Menurut Elkington, perusahaan yang ingin berkelanjutan haruslah memperhatikan “3P” yaitu *profit* atau keuntungan, *people* atau pemenuhan kesejahteraan masyarakat dan *planet* atau turut berkontribusi aktif menjaga kelestarian lingkungan.⁹⁵ Dalam hal ini PT LC selain memperoleh keuntungan dari hasil eksplorasi sumber daya alam yang ada di Murung Raya, antara lain berupa hak eksplorasi batu bara untuk beberapa tahun ke depan, PT LC juga berkontribusi dalam hal pengembangan masyarakat melalui program *comdev* yang dilakukannya dan berkontribusi bagi lingkungan melalui berbagai program lingkungan yang dilakukannya bersama masyarakat. Bahkan menjadi suatu catatan penting tentang aktivitas *comdev* PT LC selama ini, bahwa meskipun perusahaan ini belum memperoleh untung dari aktivitasnya tersebut (masih dalam proses), namun telah memberi andil yang besar bagi pengembangan masyarakat dan lingkungan di sekitarnya, sehingga dapat dikatakan bahwa PT LC “belum ambil namun sudah andil”.

Keberadaan BHP Billiton (PT LC) sebagai Perusahaan multinasional yang mampu bekerjasama secara saling menguntungkan dengan masyarakat lokal dalam konteks negara berkembang ini sebenarnya bukanlah hal yang baru dan kini malah banyak dikembangkan oleh sejumlah Perusahaan multinasional di

⁹⁵ Yusuf Wibisono, *op.cit.* hal. 32

sejumlah negara berkembang. Dima Jamali dalam penelitiannya tentang strategi pelaksanaan CSR Perusahaan multinasional di negara berkembang terhadap delapan perusahaan Perusahaan multinasional (*Microsoft, Tetra Pak, Societe Nationale D'Assurance (SNA), Byblos Bank, Sanita, SMLC, Bank Audi dan Le Vendome*) mengembangkan konsep yang dikembangkan oleh G.P.Lantos⁹⁶, yang menggunakan Klasifikasi Carroll (*Carroll's classification*) sebagai dasar untuk melihat pelaksanaan CSR pada perusahaan, yaitu: 1) Tanggung jawab ekonomi: menguntungkan bagi pemegang saham, menyediakan pekerjaan yang bagus bagi pekerjanya, menghasilkan produk yang berkualitas bagi pelanggan; 2) Tanggung jawab hukum: mengikuti hukum dan berlaku sesuai aturan permainan; 3) Tanggung jawab etik: menjalankan bisnis dengan moral, mengerjakan apa yang benar, apa yang harus dan fair, dan tidak menimbulkan kerusakan; 4) Tanggung jawab filantropis: memberikan kontribusi secara sukarela kepada masyarakat, memberikan waktu dan uang untuk pekerjaan yang baik.

Dari Klasifikasi Carroll tersebut Lantos membuat klasifikasi yang berkaitan dengannya: 1) *Ethical CSR*: secara moral memilih untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dari segi ekonomi, hukum, dan etika; 2) *Altruistic CSR*: memenuhi tanggung jawab filantropik perusahaan, melakukan pencegahan timbulnya kerusakan (*ethical CSR*) untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa memperhitungkan apakah hal itu menguntungkan perusahaan; 3) *Strategic CSR*: memenuhi tanggung jawab filantropik yang menguntungkan perusahaan melalui publikasi positif dan *goodwill*.

Dima Jamali dalam penelitiannya ini menemukan bahwa dua di antara perusahaan tersebut, *Microsoft* dan *Petra Park* menerapkan pendekatan *Strategic CSR*, yaitu memenuhi tanggung jawab filantropik yang menguntungkan perusahaan melalui publikasi positif dan *goodwill*. Sedangkan

⁹⁶ Lantos, G. P. *The Ethicality of Altruistic Corporate Social Responsibility*. *Journal of Consumer Marketing* 19(3): 205–230.

enam perusahaan lainnya menerapkan pendekatan *Altruistic CSR*, yaitu melalui pemenuhan tanggung jawab filantropik perusahaan dengan melakukan pencegahan timbulnya kerusakan (*ethical CSR*) untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa memperhitungkan apakah hal itu menguntungkan perusahaan.⁹⁷ Secara keseluruhan kedelapan perusahaan tersebut telah menerapkan *CSR* sebagai sebuah bentuk hubungan saling menguntungkan antara Perusahaan multinasional dengan masyarakat lokal.

Pada kasus lainnya ditemukan pula pada *Starbucks*, sebuah perusahaan kopi multinasional yang memiliki cabang produksi di berbagai negara. *Starbucks* sebagai perusahaan yang menjual kopi menentukan bentuk pelaksanaan *CSR* mereka dengan membantu komunitas petani kopi, membantu komunitas di sekitar gerai-gerai *Starbucks*, mensejahterakan karyawan mereka, mengembangkan dan menerapkan strategi pengelolaan lingkungan yang difokuskan sebagai bagian dari pengembangan daerah penghasil kopi yang penting bagi mereka, mengkampanyekan kesehatan masyarakat, misalnya melalui mencantumkan informasi nutrisi pada makanan dan minuman yang disajikan, mengadopsi pendekatan holistik dan jangka panjang untuk mempromosikan kesehatan dan mengurangi kadar lemak pada produksi-produknya dan lain-lain⁹⁸.

Jika dikaitkan antara peran *CSR* yang dilakukan PT LC di Murung Raya dengan klarifikasi Carroll atau (*Carroll's classification*) dan lebih lanjut dikembangkan oleh Lantos, sebagaimana dijelaskan di atas, maka kita dapat mengategorikan PT. LC dalam *Altruistic CSR*, yaitu yang memenuhi tanggung jawab filantropik perusahaan dengan melakukan pencegahan timbulnya kerusakan (*ethical CSR*) untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa memperhitungkan apakah hal itu menguntungkan perusahaan. Hal ini bisa dilihat dari pelaksanaan *CSR* PT LC

⁹⁷ Dima Jamali. The Case for Strategic Corporate Social Responsibility in Developing Countries. *Journal Business and Society Review*, 2007. PP 112:1 1–27

⁹⁸ Gunawan Widjaya, *op.cit* hal. 91

yang dilakukan meski belum dalam tahap produksi (belum memproduksi atau masih dalam tahap eksplorasi).

Dikaitkan dengan keberadaan CSR pada Perusahaan multinasional dapat dilihat dari tinjauan yang dikemukakan Former.⁹⁹ Menurutnya, pada saat Perusahaan multinasional memulai *go international* setidaknya terdapat dua teori yang mempengaruhi pola pikir Perusahaan multinasional dalam memandang CSR. Kedua teori ini adalah *Neo-Liberalisme* dan *Dependency Theory*. Dalam pandangan *Neo-Liberalisme*, Perusahaan multinasional dipandang sebagai agen yang membawa peralihan modal dari negara kaya ke negara berkembang, dari tempat yang kelebihan modal ke tempat yang kekurangan modal. Transfer modal ini dianggap sebagai *win-win situation*, bagi negara kaya diuntungkan dari sumber daya yang lebih murah, dan bagi negara berkembang diuntungkan oleh datangnya modal. Keuntungan lain yang sering disebutkan bagi negara berkembang adalah adanya modernisasi karena datangnya teknologi baru dari negara maju. Perusahaan multinasional juga dianggap melakukan *transfer of knowledge*. Praktek Perusahaan multinasional di negara berkembang juga diharapkan membawa budaya perusahaan di negara maju, seperti adanya hak pekerja yang lebih baik. Berdasarkan teori ini, Perusahaan multinasional telah membawa perbaikan bagi masyarakat secara umum, terutama melalui penyediaan tenaga kerja. Bahkan jika dicermati, Perusahaan multinasional seolah-olah memberi lebih banyak keuntungan bagi negara tujuan daripada negara asal perusahaan.

Teori kedua adalah *dependency theory*, yang isinya sangat kontras dengan *Neo-Liberalisme*. Menurut teori ini, meskipun Perusahaan multinasional merelokasi produksinya ke negara tujuan, tetap saja modal milik Perusahaan multinasional berada di negara asalnya. Lebih lanjut lagi, negara tujuan sebenarnya tidak dalam posisi setara pada saat menentukan syarat beroperasinya Perusahaan multinasional di negara tersebut, sehingga negara

⁹⁹ Rike Maria Former. *Global Consciousness – When Danish Companies Venture to India, An Investigation into Corporate Social Responsibility Implementation by Danish Companies in India*, 2005.

asal Perusahaan multinasional tetap lebih diuntungkan. Perusahaan multinasional dalam teori ini dianggap sebagai *agent of under-development*. Artinya, Perusahaan multinasional pada dasarnya tidak membuat negara tujuan lebih maju, karena Perusahaan multinasional cenderung berinvestasi pada sektor yang *labour-intensive* dan tidak banyak berkontribusi dalam melakukan *transfer of knowledge*, termasuk keahlian teknis.¹⁰⁰

Kedua teori ini dinilai sama-sama mengasumsikan bahwa sumber daya modal sangat mudah dipindahkan, namun kesimpulan kedua teori ini berbeda. *Neo-Liberalisme* menganggap penanaman modal dalam jangka panjang akan membawa negara tujuan sama kompetitifnya dengan negara asal, sedangkan *defendency theory* menganggap penanaman modal dapat dialihkan kembali kemana saja, sepanjang menguntungkan, sehingga kesetaraan tidak akan sempat tercapai.¹⁰¹

Dalam kaitannya dengan CSR, sebagaimana dikatakan Widagdo, perusahaan Perusahaan multinasional yang menganut neo-liberalisme akan merasa telah berkontribusi pada CSR sejak awal operasinya di negara tujuan, sedangkan bagi penganut *defendency theory* CSR masih panjang dan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan Perusahaan multinasional.¹⁰²

Terlepas dari kedua pendekatan tersebut, telah disadari bagi Perusahaan multinasional pentingnya CSR bagi mereka. Hubungan yang saling menguntungkan ini memang masih banyak mendapatkan kritikan, karena terkadang hubungan ini bersifat semu atau hanya menjadi strategi perusahaan dalam mengambil simpati masyarakat dan mendongkrak penjualan mereka, bukan disertai niat yang tulus. Namun kita pun dapat berdalih bahwa selama upaya-upaya tersebut memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat dan tetap memberi keuntungan bagi perusahaan maka tak ada salahnya untuk tetap melanjutkan hubungan tersebut. Justru di sinilah esensi dari konsep *Triple*

¹⁰⁰ *Ibid*

¹⁰¹ *Ibid*

¹⁰² Hanindiyo Widagdo. *Corporate Social Responsibilities pada Multinational Corporations*. International Business, 2009.

Bottom Line dari Elkington, yaitu bagaimana dalam hubungan antara perusahaan dengan lingkungan sekitarnya senantiasa terjalin hubungan yang saling menguntungkan, dimana perusahaan selain mencari keuntungan namun tidak melupakan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya dan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Untuk kasus di Indonesia sendiri, keberadaan Perusahaan multinasional dalam beberapa kasus berdampak positif bagi masyarakat lokal dimana Perusahaan multinasional itu beroperasi. Hal ini terutama terjadi pada perusahaan yang secara konsisten menerapkan konsep CSR di perusahaannya. Penerapan CSR oleh Perusahaan multinasional di Indonesia dinilai semakin meningkat baik dalam kuantitas maupun kualitas. Selain keragaman kegiatan dan pengelolaannya semakin bervariasi, dilihat dari kontribusi finansial, jumlahnya semakin besar. Penelitian *PIRAC* pada tahun 2001 menunjukkan bahwa dana CSR di Indonesia mencapai lebih dari 115 miliar rupiah atau sekitar 11.5 juta dollar AS dari 180 perusahaan yang dibelanjakan untuk 279 kegiatan sosial yang terekam oleh media massa. Meskipun dana ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan dana CSR di Amerika Serikat, dilihat dari angka kumulatif tersebut, perkembangan CSR di Indonesia cukup menggembirakan¹⁰³.

Terhadap kecenderungan Perusahaan multinasional dalam menerapkan CSR, menurut Helg¹⁰⁴, setidaknya ada tujuh faktor yang mempengaruhi implementasi hal tersebut yaitu:

1) *Cultur factor*

Melalui dimensi kultural ini Perusahaan multinasional dapat lebih efektif ketika melakukan bisnis internasionalnya. Pemahaman kultur ini sangat penting mengingat seringkali terjadi perbedaan yang sangat signifikan. Di negara berkembang, pekerja anak-anak adalah hal yang wajar, namun tidak di negara maju. Perusahaan multinasional harus memilih apakah

¹⁰³ Edi Suharto. *Pekerjaan Sosial Industri, CSR dan Comdev*. Disampaikan pada workshop tentang CSR, Lembaga Studi Pembangunan (LSP)-STKS Bandung, 29 Nopember 2006.

¹⁰⁴ Asa Helg. *Corporate Social Responsibility from a Nigerian Perspective*. Goteborgs Universitet, Handelshogskolan, 2007.

akan menggunakan standar CSR di negara asalnya atau mengikuti standar di negara tujuan. Perusahaan multinasional juga perlu mempertimbangkan perbedaan kultur yang ekstrim tersebut sebelum memutuskan untuk beroperasi di wilayah tersebut.

2) *Cultur system*

Implementasi CSR dipengaruhi oleh banyak dimensi. Permasalahan akan makin kompleks bagi Perusahaan multinasional yang memiliki *stakeholders* dari berbagai latar belakang dan multikultur. Pendekatan *cultur system* ini dianggap dapat memudahkan pemahaman hubungan antara budaya di tempat asal Perusahaan multinasional dengan pengaruh global. Pengaruh global ini makin penting mengingat derasnya arus globalisasi.

3) *Non-Governmental Organization*

NGO's atau LSM merupakan lembaga yang bukan afiliasi dari pemerintah. LSM biasanya memiliki kesamaan ide atau identitas sebagai dasar pendiriannya. Mereka bisa bersifat operasional, *advisory*, hingga advokasi. Belakangan ini *NGO's* sebagai bagian *cultural system* menjadi pembahasan tersendiri bagi praktisi dan pemerhati CSR. *NGO's* ditengarai memiliki pengaruh yang lebih kuat daripada pihak lain terhadap implementasi CSR bagi Perusahaan multinasional. Interaksi Perusahaan multinasional dan *NGO's* hampir sama penting dengan relasi antara Perusahaan multinasional dengan investornya. Hubungan Perusahaan multinasional dan *NGO's* terutama pada sisi reputasi Perusahaan multinasional dan *public relation*. *NGO's* seringkali menekan Perusahaan multinasional yang tidak berperilaku etis, maupun yang tidak mematuhi hukum yang berlaku. Mereka menuntut Perusahaan multinasional menjadi "warga negara yang baik". Pada umumnya benturan antara Perusahaan multinasional dan *NGO's* disebabkan karena kurangnya transparansi dan keterbukaan. Dua perusahaan besar *NIKE* dan *GAP* menyelesaikan konfliknya dengan *NGO's* melalui publikasi mengenai *suply-chain*

mereka, dan menjelaskan dimana benturan mereka dengan para *supplier* tersebut.

4) *Laws and Regulation*

Pemenuhan kewajiban hukum termasuk salah satu unsur dalam *CSR*, sebagaimana dalam piramida *CSR*. Hukum di suatu negara merupakan kodifikasi dari norma-norma yang membedakan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ketidakpatuhan dan pelanggaran hukum akan mengundang sanksi dan mempengaruhi citra perusahaan multinasional di negara tersebut. Selain hukum di suatu negara, ada juga hukum internasional yang harus ditaati oleh Perusahaan multinasional. Bedanya adalah hukum internasional merupakan kesepakatan berbagai negara, bukan ditetapkan oleh otoritas negara tertentu. Suatu negara yang telah meratifikasi sebuah hukum internasional, terikat pada hukum tersebut, dan Perusahaan multinasional beroperasi di sana harus juga mematuhi.

5) *Global standards and codes of conduct*

Standar global bukanlah hal yang baru. Sejak 1948, berbagai perjanjian antar-perusahaan maupun pemerintah ditandatangani sebagai bentuk kesepakatan etika moral yang perlu diikuti dalam operasi perusahaan multinasional. Hal ini juga berarti kesulitan besar bagi perusahaan multinasional untuk mempelajari dan memenuhi masing-masing standar tersebut. Untuk menjembatani hal tersebut, telah dibuat standar global, di antaranya *OECD Guideliness*, *Global Compact UN*, dan *Sullivan Principles*. Untuk standar yang lebih spesifik adalah *SA8000*, *CERES Principles*, *Accountability 1000*, *OHSAS, 18001*, *ISO 14001* dan sebagainya.

6) *National and regional standars*

Etika di tiap wilayah berbeda-beda. Perbedaan tata nilai ini kadangkala telah dinyatakan dalam standar kode etik, namun di tempat lain belum. Masing-masing standar ini berbeda-beda, ada yang mengandung banyak persyaratan dan ada yang relatif sedikit sehingga lebih mudah dipenuhi.

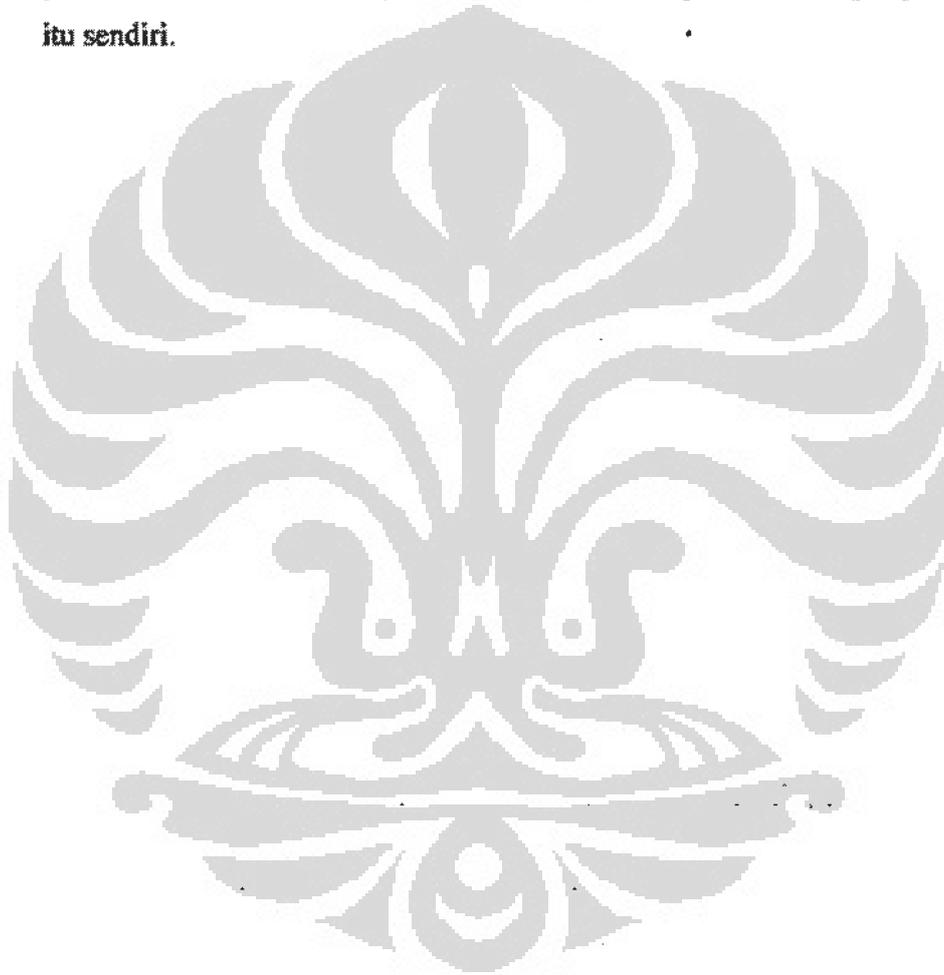
7) *The state of responsible competitiveness*

Tingkat *responsible competitiveness* di suatu wilayah turut mendorong Perusahaan multinasional menerapkan CSR, melalui tuntutan *stakeholders* atas CSR suatu Perusahaan multinasional di wilayah tersebut. Tingkat *responsible competitiveness* ini diketahui melalui 21 faktor, di antaranya adalah ratifikasi perjanjian lingkungan hidup, tenaga kerja, sistem perpajakan, tingkat korupsi, standar akuntansi beserta auditnya serta kebebasan pers.

Kesimpulan dari sejumlah kasus di atas menunjukkan bahwa hubungan antara Perusahaan multinasional dan masyarakat lokal dimana ia beroperasi adalah gabungan dari berbagai faktor, yang saling melengkapi. Penerapan CSR ini tentunya tidak hanya semata-mata hanya demi promosi perusahaan, tetapi harus benar-benar menjadi komitmen perusahaan untuk menerapkannya sebagai sebuah bentuk keinginan baik perusahaan (*altruisme*) dan sudah menjadi tuntutan zaman. CSR yang baik dilakukan melalui perencanaan yang matang dan melibatkan masyarakat dan berbagai *stakeholder* lainnya mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasinya. Apa yang dilakukan PT LC melalui forum Hapakat adalah salah satu contoh dari proses ini. Melalui forum Hapakat inilah segala sesuatu didiskusikan, sehingga antara perusahaan dan masyarakat benar-benar terjalin hubungan yang dialogis.

Hubungan akan menjadi saling menguntungkan bila Perusahaan multinasional menerapkan konsep CSR dalam perusahaannya secara konsisten. Dalam hal ini CSR menjembatani perusahaan dan masyarakat untuk saling bekerjasama secara saling menguntungkan. Sebuah catatan penting bagi keberadaan PT LC di Muara Murung adalah komitmen CSR dari MNC ini yang sudah ada sejak awal. Ini sangat jarang dilakukan ditemukan pada perusahaan Perusahaan multinasional lainnya, baik yang pernah beroperasi di Indonesia maupun dalam skala global. Pada sejumlah kasus malah terlihat bahwa pelaksanaan CSR baru dilakukan jika Perusahaan multinasional tersebut

mengalami masalah atau konflik dengan masyarakat lokal atau bersifat reaktif. Sejumlah Perusahaan multinasional mungkin melakukan CSR dalam periode awal produksi mereka, namun umumnya ini dilakukan jika dianggap memiliki nilai ekonomis bagi perusahaan. Pada kasus PT LC justru menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR telah melekat pada Perusahaan multinasional tersebut sejak proses awal atau telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan perusahaan itu sendiri.



BAB IV PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Globalisasi ekonomi ditandai dengan semakin menjamurnya perusahaan-perusahaan multinasional atau *Multinational Corporations (MNC's)*, yang kekuasaannya, dari segi jangkauan operasi maupun kekayaan, jauh melampaui banyak negara di dunia ini. Perusahaan multinasional tidak pelak dewasa ini memainkan peran yang penting dalam tata perekonomian global.

Perusahaan multinasional merupakan wujud dari paradigma baru dalam jiwa globalisasi kegiatan ekonomi yang kegiatan bisnisnya bersifat internasional, dan lokasi produksinya terletak di beberapa negara. Perusahaan-perusahaan ini berskala besar dan mengendalikan semua aktivitas yang mendatangkan pendapatan di beberapa negara.

Tidak dapat disangkal bahwa kehadiran perusahaan multinasional di negara berkembang dapat menjadi sebuah jalan keluar untuk dapat menjawab beberapa kesenjangan ekonomi di negara tujuan investasinya, dimana perusahaan multinasional ini dapat membantu memajukan proses pembangunan yang membutuhkan dana, mengurangi tingkat pengangguran dan juga mentransfer teknologi dan keahlian yang dimiliki *home country* perusahaan multinasional tersebut. Namun di sisi lain, perusahaan multinasional juga memiliki pemahaman yang sangat kapitalis yang mengedepankan upaya memaksimalkan keuntungan (*profit oriented*) sehingga dalam implementasinya perusahaan multinasional lebih bersifat eksploitatif terhadap sumberdaya demi mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga bagi banyak orang perusahaan multinasional menjadi simbol segala keburukan dari globalisasi.

Indonesia sebagai negara dengan sumber daya alam yang berlimpah kemudian menjadi salah satu tujuan perusahaan multinasional ini untuk memperluas kegiatan bisnisnya. Kehadiran perusahaan multinasional di

beberapa daerah di Indonesia, membawa dampak yang beraneka ragam terhadap lingkungan sekitar operasionalnya. Sebagai lingkungan sosial, masyarakat memang menjadi salah satu pihak yang merasakan dampak kehadiran perusahaan multinasional tersebut. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa aspek sosial dalam pengelolaan sumber daya alam ini kurang mendapatkan perhatian.

Persoalan tentang perusahaan multinasional tidak hanya terbatas kepada masalah lingkungan saja tetapi sudah menyangkut pula pada masalah sosial ekonomi, dan budaya masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perusahaan harus dapat mendefinisikan dengan baik bagaimana konsep tanggung jawab sosial yang tepat diterapkan bagi lingkungan dimana perusahaan tersebut beroperasi. Dalam konteks ini lah yang kemudian melahirkan konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

CSR merupakan bentuk program kegiatan pengembangan masyarakat sebagai kompensasi yang wajib diberikan perusahaan multinasional yang melakukan investasi di negara berkembang. *CSR* diharapkan menjadi sebuah instrumen kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan perusahaan multinasional dalam tujuannya untuk menciptakan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan (*Sustainable Development*).

Upaya membangun perusahaan yang tidak hanya berorientasi profit tapi juga tetap memperhatikan lingkungan dan masyarakatnya dalam kerangka *CSR* dapat dilakukan melalui penerapan konsep *triple bottom line*. Menurut Elkington, perusahaan yang ingin berkelanjutan haruslah memperhatikan "3P". Selain mengejar keuntungan (*Profit*), perusahaan juga mesti memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*People*) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*Planet*). Dalam gagasan ini, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpihak pada *single bottom line*, yaitu aspek ekonomi yang direfleksikan

dalam kondisi *financial*-nya saja, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya.

BHP Billiton, salah satu perusahaan penanam modal asing (PMA) di Indonesia, merupakan sebuah perusahaan multinasional besar di dunia asal Australia dengan lebih dari 100 operasi dan kantor di 26 negara, yang berinvestasi di sektor tambang batubara. Perusahaan ini telah menanamkan investasinya dan telah memegang ijin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) di Kabupaten Murung Raya (Mura) Kalimantan Tengah.

Dalam perjalanan investasinya di Kalimantan Tengah sejak tahun 1992, BHP Billiton yang telah menanamkan investasinya sebesar 66 juta dolar AS atau sekitar Rp 594 miliar di lokasi blok Haju, salah satu lokasi dari luas keseluruhan konsensi BHP Billiton group yang mencapai 46.620 hektar, belum pernah ada konflik maupun friksi sosial besar yang terjadi selain masalah pembebasan lahan. Hal ini dikarenakan meski telah melewati tahap eksplorasi dan masih dalam proses konstruksi (perusahaan menargetkan mulai memproduksi pada November 2009), perusahaan ini secara sekilas telah memberi andil bagi masyarakat di lingkaran tambang dalam pelaksanaan program *community development* sebagai bentuk tanggungjawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).

Dengan menanamkan komitmennya untuk berpihak pada masyarakat sekitar lokasi tambang dengan semboyan “belum ambil sudah andil”, dapat dilihat BHP Billiton berupaya agar dapat diterima daerah lingkungan operasionalnya. Dimana masyarakat lokal dan perekonomian daerah dapat bertumbuh bersama dan mendapatkan manfaat yang berkelanjutan atas keberadaan perusahaan tersebut melalui investasi dalam pembangunan sosial ekonomi, pendidikan, infrastruktur dasar dan program kesehatan serta kebersihan.

Meski telah melewati tahap eksplorasi dan masih dalam proses konstruksi, dimana perusahaan menargetkan mulai memproduksi pada

November 2009, perusahaan ini telah memberi andil bagi masyarakat di lingkaran tambang. Dengan menanamkan komitmennya untuk berpihak pada masyarakat sekitar lokasi tambang, dapat dilihat bahwa PT LC berupaya agar masyarakat lokal dan perekonomian daerah mendapat manfaat yang berkelanjutan atas keberadaan perusahaan tersebut melalui investasi dalam pembangunan sosial ekonomi, pendidikan, infrastruktur dasar dan program kesehatan serta kebersihan.

Hal ini terlihat dalam program pengembangan masyarakat/*community development (Comdev)* yang telah dilakukan semenjak awal kegiatan eksplorasi, melalui program pengembangan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, air dan sanitasi, kesempatan kerja serta usaha bagi penduduk lokal. Dalam pelaksanaannya, PT.LC memiliki komitmen yang tinggi untuk bekerjasama dengan masyarakat sekitar wilayah pertambangannya, termasuk dengan pemerintah daerah, LSM dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya dalam rangka mendapatkan izin beroperasi sekaligus menjamin kegiatan PT LC.

Pelaksanaan program *comdev* sebagai tanggung jawab PT.LC, dijalankan sendiri oleh perusahaan pada tingkat masyarakat, namun tingkat konsultasi dan kordinasinya tetap melalui pemerintah. Beberapa program *comdev* yang menjadi kebijakan dan tanggungjawab PT.LC dalam konsepnya yang telah berjalan adalah di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan peningkatan kapasitas masyarakat.

Berbagai program *comdev* yang dilakukan di bidang pendidikan antara lain pemberian beasiswa terhadap murid SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi, mencakup pembayaran SPP, biaya pembelian buku-buku dan biaya hidup perbulan bagi murid/siswa yang benar-benar membutuhkan. Beasiswa ini selain diberikan pada siswa yang tidak mampu juga pada siswa yang berprestasi. PT LC juga memberikan bantuan buku-buku bacaan umum bagi para siswa di seluruh sekolah yang berada di sekitar wilayah lokasi perusahaan ini. Selain itu dilakukan juga pembangunan/perbaikan sekolah dan fasilitas-

fasilitas pendidikan lainnya. Di bidang kesehatan program *comdev* PT LC antara lain pelatihan bagi tenaga kesehatan, pembangunan berbagai infrastruktur kesehatan, pengaktifan dan pelatihan bagi kader-kader posyandu, pemberian fasilitas air bersih, gerakan penyehatan lingkungan dan pengadaan fasilitas olahraga dalam rangka menyehatkan masyarakat lokal setempat. Di bidang pengembangan masyarakat dilakukan melalui bantuan dana dan pendampingan bagi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), pemagangan bagi karyawan yang berasal dari daerah sekitar daerah operasi dan bantuan-bantuan lainnya.

Berbagai bantuan melalui *comdev* ini sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan antara lain koordinasi yang masih harus dimantapkan, kondisi geografis yang kurang mendukung dan perlunya dialog yang lebih intensif antara perusahaan dan masyarakat dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program.

Secara umum, pelaksanaan CSR sebuah perusahaan multinasional di Indonesia, biasanya dilakukan melalui berbagai bentuk pendekatan, yaitu, keterlibatan langsung, melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan, bermitra dengan pihak lain, mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu.¹⁰⁵

Pendekatan CSR PT LC di Kabupaten Murung Raya dilakukan melalui keterlibatan langsung, dimana perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, sebuah perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti *corporate secretary* atau *public affair manager* atau menjadi bagian dari tugas pejabat *public relation*. Selain itu PT LC juga melakukan mitra dengan lembaga

¹⁰⁵ Priyanto Susiloadi. *Implementasi Corporate Social Responsibility untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan*. Jurnal Spirit Publik Vol. 4, No. 2, Oktober 2008 Hal. 123 – 130.

lain. Dalam hal ini PT LC melakukan kerjasama dengan lembaga sosial/organisasi non-pemerintah (*NGO/LSM*), antara lain dengan Yayasan Bina Masyarakat Mandiri (YBM2) dan Yayasan Kusuma Buana (YKB), dan instansi pemerintah.

Dalam melihat hubungan yang saling menguntungkan antara Perusahaan multinasional dan masyarakat lokal dalam konteks negara berkembang, pada kasus PT LC ditemukan bahwa antara perusahaan dan masyarakat dapat terjalin hubungan yang saling menguntungkan. Di sinilah peran *CSR* dalam menjembatani hubungan tersebut agar bisa saling menguntungkan satu sama lain. Hubungan yang saling menguntungkan antara Perusahaan multinasional dengan masyarakat lokal dalam kasus PT LC dengan masyarakat Kabupaten Murung Raya menjadi pembuktian dari hipotesa dari penelitian ini yang berkorelasi positif.

Hubungan saling menguntungkan ini terkait pula dengan konsep *Triple Bottom Line*, bahwa perusahaan yang ingin tetap eksis dan berkelanjutan selain mengejar keuntungan (*profit*), haruslah tidak melupakan masyarakat (*people*) dan lingkungan (*planet*).

Jika dikaitkan antara peran *CSR* yang dilakukan PT LC di Murung Raya dengan klarifikasi Carroll atau (*Carroll's classification*) dan lebih lanjut dikembangkan oleh Lantos, maka kita dapat mengategorikan PT LC dalam *Altruistic CSR*, yaitu yang memenuhi tanggung jawab filantropik perusahaan dengan melakukan pencegahan timbulnya kerusakan (*ethical CSR*) untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa memperhitungkan apakah hal itu menguntungkan perusahaan. Hal ini bisa dilihat dari pelaksanaan *CSR* PT LC yang dilakukan meski belum dalam tahap produksi (belum berproduksi atau masih dalam tahap eksplorasi).

IV.2. Rekomendasi

Dalam rangka meningkatkan peran PT LC sebagai sebuah Perusahaan multinasional di Kabupaten Murung yang merupakan wilayah operasinya adalah:

1. Meningkatkan hubungan dan koordinasi dengan pemda setempat, agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan antara perusahaan dan pemda. Dalam hal ini perusahaan bisa memperluas jangkauan pelaksanaan *comdev*-nya dengan tidak menggarap program yang sebenarnya juga sudah menjadi program pemda.
2. Agar seluruh program yang dilaksanakan benar-benar mencapai sasaran, maka pihak PT LC perlu mengidentifikasi secara detil aspek-aspek yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata berdasar pada keinginan masyarakat. Jangkauan pelaksanaan *comdev* juga perlu diperluas hingga mencapai daerah-daerah pelosok, dimana masyarakatnya sebenarnya adalah mereka yang paling membutuhkan bantuan dan dukungan.
3. Perlunya dukungan bantuan *comdev* bagi sektor-sektor lain, selain dari pendidikan, kesehatan dan pengembangan masyarakat, seperti yang selama ini dilakukan.
4. Dalam hal eksplorasi hasil tambang di wilayah tersebut hendaknya tetap mempertimbangkan keseimbangan lingkungan. Jangan sampai yang terjadi nantinya adalah eksplorasi yang berlebihan, sehingga apa yang masyarakat peroleh dari manfaat keberadaan PT LC tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh eksplorasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambadar, Jackie. *Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Praktik di Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008.
- Anoraga, Pandji. *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*. Penerbit Pustaka Jaya, Jakarta, 1995.
- Anonim. *Murung Raya dalam Angka*. BPS Kerjasama BPS dan Bappeda Murung Raya, 2008.
- Anoraga, Pandji. *Perusahaan Multinasional: Penanaman Modal Asing*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1995.
- Freeman, Colleen, dkk. *Menggugat Rezim Korporasi: Panduan Riset Aksi Berbasis HAM*. Yogyakarta: Penerbit Satunama, 2008.
- Gilpin, Robert. *Global Political Economy: Understanding The International Economic Order*. New Jersey: Princeton University Press, 2001.
- Griffiths, Martin dan Terry O'Callaghan. *International Relations: The Key Concepts*. London & New York : Routledge, 2003
- Hirts, Paul dan Grahame Thompson, *Globalisasi adalah Mitos*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.
- Irawan, Prasetyo. *Logika dan Prosedur Penelitian*, Jakarta:STIA-LAN Press, 1999.
- Jackson, Robert dan Georg Sorensen. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Kotler, Phillip dan Lee, Nancy. *Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*. John Willey Inc, 2005.
- Lairson, Thomas D. dan Skidmore, David. *International Political Economy: The Struggle for Power and Wealth*. Harcourt Brace College Publishers, 1997.
- Low, Nicholas dan Brendan Gleeson. *Politik Hijau: Kritik terhadap Politik Konvensional Menuju Politik Berwawasan Lingkungan dan Keadilan*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009.
- Martin, Griffiths dan O'Callaghan, Terry. *International Relations: The Key Concepts*. London & New York: Routledge, 2003.

- Nash, June & Kirch. *Corporate Culture and Social Responsibility: The Case Toxic Wastes in a New England Community*, 1994.
- Nopirin. *Ekonomi Internasional*. Edisi 3, BPFE Jogjakarta, 1999.
- Pareira, Andre H. *Negara dalam Studi Hubungan Internasional: Perubahan dan Kesenambungan*. PACIS, 1999
- Solihin, Ismail. *Corporate Social Responsibility: From Charity to Sustainability*. Jakarta: Penerbit SalembaEmpat, 2009.
- Stiglitz, Joseph E. *Making Globalization Work: Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia yang Lebih Adil*. Bandung: Penerbit Mizan, 2007.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Penerbit Alfabeta Bandung, 2005.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- _____. *Pekerjaan Sosial Industri, CSR dan Comdev*. Disampaikan pada workshop tentang CSR, Lembaga Studi Pembangunan (LSP)-STKS Bandung, 29 Nopember 2006.
- Sullivan, Michael P. *Globalism Versus Realism: International Relations, Third Debate, Transnasionalism, Power Politics, and the Realities of the Present System*. Westview Press Inc, 1982.
- Syahdan, Pusparida. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Trans Nasional Amerika: Studi Kasus PT Freeport Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2001.
- Tesoriero, Jim Ife Frank. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Paul Hirts dan Grahame Thompson. 2001. *Globalisasi adalah Mitos*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Rumansi, Chris. *Dampak Operasional Multinational Corporation (MNC) terhadap Masyarakat Lokal: Studi kasus PT. Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika-Papua Periode 2001-2005*. Tesis S2 Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.

Yanuar, Ikbar, 2006. *Ekonomi Politik Internasional 1: Konsep dan Teori*. PT Refika Aditama, Bandung.

Wibisono, Yusuf. *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility (CSR)*. Gresik: Fascho Publishing, 2006

Widjaja, Gunawan dan Yeremia Ardi Pratama. *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan tanpa CSR*. Jakarta: Penerbit Forum Sahabat, 2008.

Jurnal:

Aditya W, Budut. *Papua Vs. Freeport: Bukan Bagi Saham, Tapi Bagi Hasil Pengolahan*. Jurnal Indonesia Corporation, Edisi 22 Januari 2005.

Anderson, Sarah. *Kebangkitan Kekuatan Korporasi*. Termuat dalam Jurnal WACANA, Edisi 19. Tahun VI 2005, "Kuasa Korporasi: Dari Homogenisasi Rasa Sampai Hegemoni Pikir." Yogyakarta: Insist Press. Hal 31 – 49.

Jamali, Dima. *The Case for Strategic Corporate Social Responsibility in Developing Countries*. *Journal Business and Society Review*, 2007. PP 112:1 1–27.

Jamil, Mohammad, C.Z., K. Alwi dan R. Mohamed. *Corporate Social Responsibility Disclosure in the Annual Reports of Malaysian Companies: A Longitudinal Study (WP-io/2001; Kedah, Malaysia: Universiti Utara Malaysia)*, 2001.

Kurniawan, Bob Eko. *Dukung Mura Cerdas 2013*, Majalah Sangkarali Vol.V Triwulan 3 08/09, hal 17.

Rusfadia S., Jahja. *Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Corporate Social Responsibility Perusahaan Ekstraktif*. Galang, Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani, Vol. 1, No. 2, Januari 2006.

Rochman, Achwan. *Corporate Social Responsibility: Pertikaian Paradigma dan Arah Perkembangan*. Galang, Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani, Vol. 1, No. 2, Januari 2006. Hal 84

Sembiring, Simon F. *Dana CSR Jangan Masuk Ke Kas Daerah*. Majalah Bisnis & CSR, Januari 2008, hal 110.

Susiloadi, Priyanto. *Implementasi Corporate Social Responsibility untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan*. Jurnal Spirit Publik Vol. 4, No. 2, Oktober 2008. Hal. 123 – 130.

Thompson, Herb dan MacWilliam, Scott. *The Political Economy of Papua New Guinea*. Journal of Contemporary Asia, 1992.

Wibowo, I. *Sejarah Globalisasi dan Korporasi*. Termuat dalam Jurnal WACANA, Edisi 19. Tahun VI 2005, "Kuasa Korporasi: Dari Homogenisasi Rasa Sampai Hegemoni Pikiran." Yogyakarta: Insist Press. 2005.

Internet:

Anonim. Diakses pada <http://www.apbi-icma.com/news.php?pid=6133&act=detail>

Anonim. Diakses pada http://www.majalahtambang.com/detail_berita.php?category=18&newsnr=1075, 5 Maret 2009

Anonim. BHP Billiton Profile. *About Us*. Diakses pada <http://sustainability.bhpbilliton.com/2003/overview/profile.html>, 5 Maret 2009.

Anonim. Milimeter Indonesia. *Batu Bara Kalteng*. Diakses pada <http://milimeterindonesia.com/news/kalimantan/batu-bara-kalteng.html>, 22 Mei 2009.

Soda, Egenius. PT Lahai Coal: *Andil Dulu Baru Ambil*. Diakses pada http://www.majalahtambang.com/detail_berita.php?category=18&newsnr=1075, 5 Maret 2009.

Dokumen:

Laporan Kerja PT Lahai Coal 2007

Laporan Kerja PY Lahai Coal 2008

RKAB PT Lahai Coal. *Perbaikan Tahap Konstruksi*, 2009